



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DI LEVEL PEMERINTAH PUSAT,  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA  
(Studi Kasus pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Timur)**

**TESIS**

**DIAN PERMATA SARI  
0606152535**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DI LEVEL PEMERINTAH PUSAT,  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA  
(Studi Kasus pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Timur)**

**TESIS**

**Diajukan salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi**

**DIAN PERMATA SARI  
0606152535**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2011**



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011



(Dian Permata Sari)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dian Permata Sari**

**NPM : 0606152535**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 14 Januari 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN

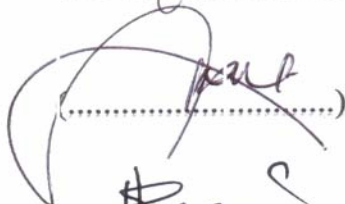
Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dian Permata Sari  
NPM : 0606152535  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Penerimaan Pajak di Level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Fauziah Zen (.....) 

Penguji I : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc (.....) 

Penguji II : Ir. Hania Rahma, M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan studi di MPKP.

Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dosen pembimbing, para pimpinan dan staf MPKP maupun teman-teman, Karena itu, perkenanlah saya mengucapkan terima kasih.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fauziah sebagai dosen pembimbing, yang ditengah kesibukan mengajar maupun meneliti, bahkan ketika berada di luar negeri maupun luar kota, masih dapat dan bersedia memberi arahan, saran-saran, maupun koreksi dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen penguji ; Bapak Raksaka Mahi, Ibu Hania Rahma dan Bapak Iman Rozani.

Selanjutnya saya menghaturkan terima kasih kepada para pimpinan khusus Dr. Andi Fahmi Lubis, dan staf administratif program MPKP ; Mas Haris, Mas Triman, Mbak Ira dan teman-teman yang lain. Terima kasih karena selalu penuh perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat maupun fasilitas selama masa studi maupun penulisan tesis ini.

Kepada teman-teman kuliah khususnya teman-teman seangkatan, terima kasih karena telah membuat saya terus bersemangat menyelesaikan tesis ini. Saya tidak dapat membalas kebaikan teman-teman, karena itu saya akan selalu mengenangnya.

Khususnya kepada Papah, Mamah dan kakak-kakak terima kasih atas toleransi dan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Kepada para keponakanku, maafkan tante Dian karena selama beberapa bulan terakhir ini tidak dapat selalu bersama-sama dengan kalian.

Wassalammualaikum wr. wb.,

Jakarta, Januari 2011

**Dian Permata Sari**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Permata Sari

NPM : 0606152535

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Penerimaan Pajak di Level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2011

Yang menyatakan



(Dian Permata Sari)

## ABSTRAK

Nama : Dian Permata Sari

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Analisis Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Penerimaan Pajak di Level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)

Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

Kata kunci:

Pajak, potensi pajak, kebijakan publik

## ABSTRACT

Name : Dian Permata Sari  
Study Program : Master Planning and Public Policy  
Thesis Title : Influence Analysis of Public Policy to Tax Revenue in the Levels of Central Government, Provincial Government and Regency/City in Indonesia (A Case Study Level Government District in East Java Province)

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected.

Keywords : Tax, tax potential, public policy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	<b>vi</b>
<b>KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERSAMAAN</b>	<b>xv</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Studi	3
1.3. Sistematika Penulisan	4
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>6</b>
2.1. Konsep dan Pengertian Pajak	6
2.1.1. Definisi Pajak	6
2.1.2. Basis Pajak	7
2.1.3. Kriteria Sistem Pajak yang Ideal	8
2.1.4. Klasifikasi Pajak	10
2.2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah	12
2.2.1. Pajak Pusat	13
2.2.2. Pajak Daerah	14
2.3. Kinerja Pajak	17
2.3.1. Nilai Penerimaan Pajak	18
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak	22
2.4.1. Faktor Internal Perekonomian	22
2.4.2. Efisiensi Sistem Perpajakan	27
2.4.3. Faktor Eksternal Perekonomian	30
2.5. Sistem Pajak di Indonesia	31
2.5.1. Pajak Pusat	31
2.5.2. Pajak Daerah	32
2.5.3. Bagi Hasil Pajak	33



2.6.	Dampak Kebijakan Publik terhadap Penerimaan Pajak	35
2.6.1.	Kebijakan Ekonomi Sebagai Kebijakan Publik	36
2.6.2.	Dampak Kebijakan Publik terhadap Potensi Penerimaan Pajak	37
2.6.3.	Dampak Kebijakan Publik terhadap Efisiensi Sistem Pajak	38
<b>3.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>39</b>
3.1.	Disain Penelitian	39
3.2.	Metode Analisis	39
3.2.1.	Analisis Deskriptif	39
3.2.2.	Ekonometrika	40
3.3.	Kerangka Pikir Penelitian	40
3.4.	Data dan Sumber Data	45
3.5.	Model-Model yang akan Diestimasi	45
3.5.1.	Model 1 : Kinerja Pajak Pemerintah Pusat	46
3.5.1.1.	Operasionalisasi Variabel	49
3.5.1.2.	Hasil yang Diharapkan	50
3.5.2.	Model 2 : Kinerja Pajak Pemerintah Provinsi Periode 1994-2006	51
3.5.2.1.	Model Regresi	51
3.5.2.2.	Operasionalisasi Variabel	54
3.5.2.3.	Hasil yang Diharapkan	56
3.5.3.	Model 3 : Kinerja Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2000-2007	57
3.5.3.1.	Operasionalisasi Variabel	58
3.5.3.2.	Hasil yang Diharapkan	59
3.6.	Uji Asumsi-asumsi Klasik	60
3.6.1.	Uji Multikolinearitas	61
3.6.2.	Uji Otokorelasi	64
3.6.3.	Uji Heteroskedastisitas	65
3.7.	Nilai $R^2$ Statistik t, Statistik F	66
<b>4.</b>	<b>GRAFIKAN UMUM PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH</b>	<b>69</b>
4.1.	Perkembangan Kinerja Pajak Pemerintah Pusat	69
4.1.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak Nominal	73
4.1.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Riil	75
4.1.3.	Perkembangan Rasio Pajak	76
4.1.4.	Perkembangan Struktur Penerimaan Pajak	78
4.2.	Perkembangan Kinerja Pajak Pemerintah Daerah Provinsi	79
4.2.1.	Penerimaan Pajak Nominal	81
4.2.2.	Perkembangan Pajak Riil	82
4.2.3.	Perkembangan Rasio Pajak	83

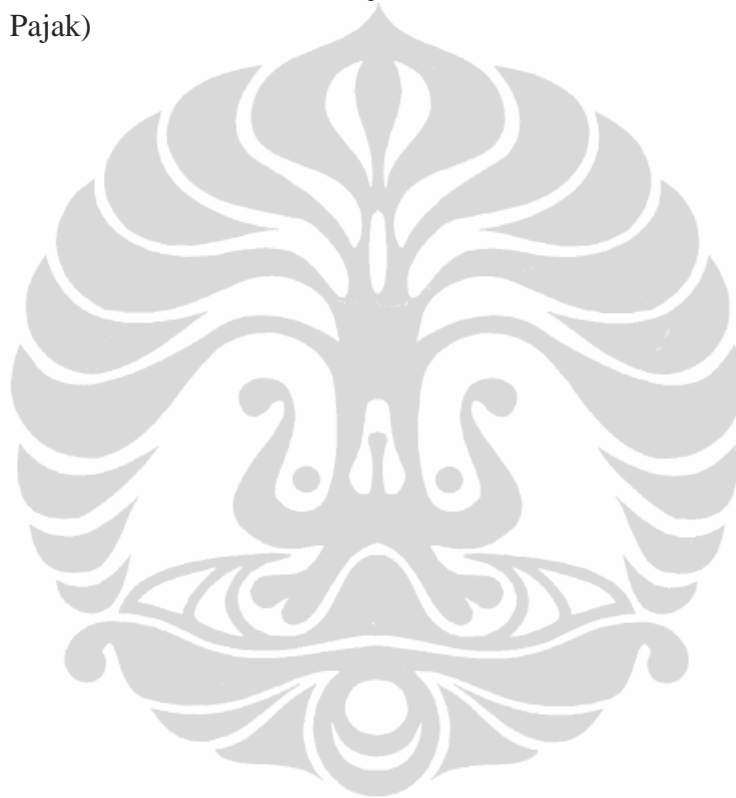
4.2.4.	Perkembangan Struktur Penerimaan Pajak (Porsi Pajak dalam PAD)	84
4.3.	Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86
4.3.1.	Penerimaan Pajak Nominal	87
4.3.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Riil	88
4.3.3.	Perkembangan Rasio Pajak	89
4.3.4.	Perkembangan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD	90
<b>5.</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PAJAK</b>	<b>91</b>
5.1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Pusat	91
5.1.1	Uji-uji Asumsi Klasik	91
5.1.2	Intepretasi Hasil	93
5.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Provinsi	99
5.2.1	Uji-uji Asumsi Klasik	101
5.2.2	Intepretasi Hasil	103
5.3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	113
5.3.1	Uji-uji Asumsi Klasik	115
5.3.2	Intepretasi Hasil	117
<b>6.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>129</b>
6.1.	Kesimpulan	129
6.1.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak Riil	129
6.2.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Riil	130
6.2.	Saran	135
6.2.1.	Saran Studi Lebih Lanjut	135
6.2.2.	Saran Kebijakan	136
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>138</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>142</b>

## Daftar Tabel

Tabel	1.1	Perkembangan Rasio Pajak Beberapa Negara Asia Periode 2000-2006	2
	2.1.	Penerimaan Nominal Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2005	19
	2.2.	Pajak Nominal dan Pajak Riil Pemerintah Pusat Indonesia Periode 2002-2005	21
	2.3.	Pajak -Pajak Daerah di Indonesia	33
	2.4.	Bagi Hasil Pajak Menurut UU No.33/2004	35
	3.1.	Variabel-variabel Bebas yang Diduga Mempengaruhi Penerimaan Pajak Riil pada Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	44
	3.2.	Data yang Dibutuhkan, Jenis Data dan Sumber Data	45
	3.3.	Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan Pada Model 1	49
	3.4.	Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 1	51
	3.5.	Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan Pada Model 2	54
	3.6.	Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 2	56
	3.7.	Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan Pada Model 3	59
	3.8.	Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 3	60
	4.1.	Perkembangan Indikator Kinerja Pajak Pemerintah Pusat	70
	4.2.	Laju Pertumbuhan Kinerja Pajak Pemerintah Pusat Periode 1971-2006 (% per tahun)	71
	4.3.	Statistik Deskriptif Indikator-Indikator Kinerja Pajak Pemerintah Pusat Periode 1971-2006	72
	4.4.	Indikator Penerimaan Pajak Periode 1994-2006 Beberapa Provinsi Terpilih	80
	4.5.	Statistik Deskriptif Indikator-Indikator Kinerja Pajak 25 Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2000-2007	86
	5.1.	Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Pusat	91
	5.2.	Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Provinsi	100
	5.3.	Peranan Penerimaan Pajak yang Berhubungan dengan Kepemilikan Kendaraan dalam Penerimaan Pajak Provinsi	107
	5.4.	Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota	114
	5.5.	Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Retribusi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	121
	5.6.	Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2007	123

## Daftar Grafik

Grafik 4.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak Nominal Pemerintah Pusat 1971-2006 (Rp Miliar)	74
4.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Riil Pemerintah Pusat 1971-2006 (Rp Miliar)	76
4.3.	Perkembangan Rasio Pajak Indonesia Periode 1971-2006 (% PDB Harga Berlaku)	77
4.4.	Perkembangan Porsi Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Total Penerimaan Pajak (% Total Penerimaan Pajak)	78



## Daftar Gambar

Gambar	4.1.	Perbandingan Pajak Nominal 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006 (Rupiah)	82
	4.2.	Perbandingan Pajak Riil 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006 (Rupiah)	83
	4.3.	Perbandingan Rasio Pajak 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006 (Rupiah)	84
	4.4.	Perbandingan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006 (Rupiah)	85
	4.5.	Perbandingan Pajak Nominal pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2007 (Rupiah)	88
	4.6.	Perbandingan Pajak Riil pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2007 (Rupiah)	88
	4.7.	Perbandingan Rasio Pajak pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2007	89
	4.8.	Perbandingan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD Pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2007 (Rupiah)	90

## Daftar Persamaan

Persamaan	2.1	Nilai Riil Penerimaan Pajak	20
	2.2	Porsi Sektor Modern	24
	2.3	Tingkat Keterbukaan Ekonomi	25



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penyedia barang publik dalam rangka meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (fungsi alokasi), memperbaiki distribusi pendapatan (fungsi distribusi) dan menjaga/memperbaiki stabilitas ekonomi makro (fungsi stabilisasi), pemerintah pusat dan daerah membutuhkan sumber penerimaan (Stiglitz, 2000). Umumnya sumber penerimaan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerimaan pajak (*tax revenue*) dan penerimaan bukan pajak (*non tax revenue*). Pada saat perekonomian semakin maju, maka penerimaan pemerintah semakin mengandalkan penerimaan pajak (Rosen, 2002). Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa di negara-negara berpendapatan tinggi, penerimaan pajak pusat ditambah daerah merupakan sekitar 90% pendapatan pemerintah (Musgrave dan Musgrave, 1985; Rosen, 2002). Jika penerimaan pajak atau porsi penerimaan pajak makin besar maka kelangsungan pemerintahan akan semakin terjaga. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar kesejahteraan rakyat dapat terus menerus diperbaiki. Karena itu penerimaan pajak pemerintah menjadi sangat penting untuk dipertahankan dan atau diperbaiki.

Penerimaan pajak pemerintah umumnya diukur dengan beberapa indikator yaitu nilai penerimaan pajak, rasio pajak, rasio antara penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajak. Penerimaan pajak pemerintah setidak-tidaknya menggambarkan dua hal. Pertama, tingkat kemajuan/modernisasi perekonomian. Jika perekonomian makin modern maka potensi penerimaan pajak semakin besar. Kedua, tingkat efisiensi sistem perpajakan, *ceteris paribus*, jika sistem pajak makin efisien, maka potensi penerimaan pajak yang dapat terealisasi juga makin besar.

Tingkat kemajuan perekonomian suatu negara dapat berjalan secara alamiah tetapi tingkat kemajuan ekonomi juga tidak lepas dari intervensi pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut disebut juga sebagai

kebijakan publik. Tingkat efisiensi pajak, dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan publik. Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik sangat menentukan perkembangan penerimaan pajak, baik melalui dampaknya terhadap potensi penerimaan dan perbaikan efisiensi sistem pajak.

Sampai saat ini penerimaan pajak khususnya pemerintah daerah di Indonesia relatif masih sangat rendah. Pada tingkat pemerintah pusat rasio pajak Indonesia sampai tahun 2008 masih lebih rendah dari 15%. Artinya penerimaan pajak nominal di Indonesia masih lebih rendah dari 15% nilai harga berlaku produk agregat (PDB harga berlaku). Angka ini relatif rendah dibanding dengan rasio pajak di negara-negara maju yang umumnya sudah mencapai minimal 30%. Rasio pajak Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Perkembangan Rasio Pajak Beberapa Negara Asia  
Periode 2000-2006

Negara	2000	2006
Cina	12,7	16,6
Korea Selatan	15,6	19,5
Indonesia	8,3	12,3
Malaysia	11,6	15,1
Pilipina	13,7	14,3

Sumber: Diolah dari data Asian Development Bank,  
Key Development Indicator 2007

Rasio pajak akan semakin rendah bila tingkat pemerintahan makin rendah. Studi Devas (1989) menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi rasio pajak umumnya lebih rendah dari 2%. Artinya penerimaan pajak nominal pada tingkat provinsi hanya merupakan 2% nilai nominal produksi agregat (PDRB harga berlaku). Sedangkan pada tingkat kabupaten dan atau kotamadya rasio pajak umumnya lebih rendah dari 1%. Pola tersebut di atas belum berubah sampai saat ini. Data-data terbaru menunjukkan hanya Provinsi Bali dan DKI Jakarta yang rasio pajaknya di sekitar angka 2%. Propinsi-propinsi lainnya umumnya masih tetap lebih rendah dari 1%. Rasio pajak pada tingkat kabupaten/kota jauh lebih



rendah lagi. Bahkan masih banyak (ratusan) kabupaten/kota yang rasio pajaknya lebih rendah dari 0,5%.

Fakta-fakta di atas menimbulkan pertanyaan ”Bagaimana perkembangan penerimaan pajak pemerintah pusat dan daerah di Indonesia?. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah? Secara lebih spesifik; ”Bagaimana pengaruh perkembangan potensi penerimaan (pertumbuhan dan perkembangan ekonomi) terhadap penerimaan pajak? Bagaimana dampak kebijakan publik terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia?

## **1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Studi**

Tujuan dan ruang lingkup studi adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

### **Tujuan Studi**

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui studi ini:

1. Mempelajari dan membandingkan perkembangan penerimaan pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
2. Mempelajari dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
3. Secara lebih khusus ingin mengetahui dampak kebijakan publik terhadap pendapatan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia

### **Ruang Lingkup Studi**

Adapun ruang lingkup studi ini dibatasi pada hal-hal di bawah ini agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih dalam dan lebih terfokus.

1. Penerimaan pajak yang digunakan adalah penerimaan pajak riil yaitu penerimaan pajak nominal dibagi dengan Indeks Harga Implisit (IHI) atau deflator PDB
2. Periode pengamatan untuk analisis kinerja pajak pemerintah pusat adalah tahun 1971-2008.

3. Periode pengamatan untuk analisis kinerja pajak pemerintah provinsi adalah 1994-2006. Sampel yang digunakan untuk analisis kinerja pajak pemerintah provinsi adalah 24 provinsi yang bukan merupakan provinsi pemekaran, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Alasan tidak memasukkan provinsi pemekaran adalah konsistensi data dan keseragaman data. Daerah-daerah pemekaran berdiri pada tahun yang berbeda-beda dan laporan data APBD selain tidak berkesinambungan, juga kurang konsisten. Sedangkan alasan tidak memasukan Provinsi DKI Jakarta adalah karena DKI Jakarta merupakan Pemerintahan Tingkat I sekaligus Tingkat II. Selain itu DKI Jakarta jika dibanding dengan provinsi lain, tingkat kemajuan relatif tinggi, sehingga dapat mengganggu homogenitas data.
4. Periode pengamatan untuk analisis pada tingkat pemerintah kabupaten/kota adalah tahun 2000-2007. Sampel yang dipilih adalah 25 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan Jawa Timur adalah selain data kabupaten/kota relatif lengkap, juga bukan daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga hubungan antara penerimaan pajak dengan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhinya lebih representatif.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Studi ini ditulis dalam bentuk tesis yang terdiri atas lima bab pembahasan.

#### **Bab 1: Pendahuluan**

Dalam Bab Pendahuluan, akan diuraikan latar belakang penelitian, tujuan dan ruang lingkup penelitian, metodologi dan sistematika pembahasan.

#### **Bab 2: Telaah Teoritis**

Bab Dua akan menguraikan kerangka teoritis yang digunakan dalam studi, dilengkapi dengan hasil studi-studi sebelumnya yang berhubungan dengan studi ini.

### Bab 3 : Metode Penelitian

Bab Tiga berisi uraian tentang metodologi yang digunakan dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

### Bab 4 : Grafikan Umum Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah

Bab Empat akan memberikan gambaran umum tentang perkembangan penerimaan pajak pemerintah pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan statistik deskriptif.

### Bab 5: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Bab Lima adalah bab analisis dengan menggunakan statistik non parametrik dengan model ekonometrika.

### Bab 6: Kesimpulan dan Saran

Bab Enam merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran penelitian dan saran kebijakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari studi.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Pajak sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dikenal dalam peradaban manusia. Nenek moyang kita, misalnya Kekaisaran Romawi Kuno sekitar 20 abad yang lalu telah melakukan pemungutan pajak. Secara umum ada kesamaan tujuan dari pemungutan pajak, yaitu membiayai aktivitas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

#### 2.1. Konsep dan Pengertian Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Di bawah ini adalah beberapa definisi singkat tentang pajak yang disampaikan oleh beberapa ahli (ekonom).

*“Taxes and charges are withdrawn from the private sector without leaving the government with a liability to the payee...Taxes are compulsory imposts, whereas charges and borrowing involve voluntary transactions.”* (Musgrave dan Musgrave, 1989, halaman 212).

*“Taxes are compulsory payments to government”* (Rosen, 2003).

*“ A tax is a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return...the levy is partly used to provide public goods in return, but the size is also determined by other factors. Taxes are, therefore, transfer of money to public sectors, but they exclude loan transactions and direct payments for publicly produced goods and services.”* ( James dan Nobes, 1992).

Dari definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pajak adalah transfer sumber daya dari sektor rumah tangga dan perusahaan kepada sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan. Pajak memiliki sifat khusus, yaitu pemungutannya tidak berkaitan dengan balas jasa langsung. Jika pembayaran kepada sektor publik dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh, pembayaran tersebut disebut *charges* (retribusi).

Dalam teori ekonomi modern, pajak memiliki dua fungsi, yaitu sumber penghasilan pemerintah dan instrumen kebijakan ekonomi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi. Yang dimaksud dengan pajak sebagai alat pemerintah untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi adalah pajak dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki keadilan khususnya distribusi pendapatan dan kekayaan, mengelola keinginan bekerja dan menjaga stabilitas perekonomian makro (Stiglitz, 2000).

Dari sudut pandang ilmu hukum, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah dengan mekanisme pemungutan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Dari sudut pandang hukum, ciri khas pajak adalah sifatnya yang dapat mengenakan sanksi bagi mereka yang berupaya menghindarinya.

*“Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, yang penagihannya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang ditunjuk bagi pembayarannya, serta gunanya untuk biaya umum menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional berkesinambungan”.* (Andriani, seperti yang dikutip Dirjen Pajak tahun 2006)

### **2.1.2. Basis Pajak**

Salah satu definisi dari basis pajak (*tax bases*) adalah seperti yang disampaikan Rosen (2003), yaitu item-item dan atau aktivitas-aktivitas yang dapat dikenakan pajak (*The item or the activity that is to be taxed*). Item-item yang dimaksud antara lain adalah kekayaan, penghasilan, sedangkan aktivitas yang dapat dikenakan pajak antara lain adalah konsumsi dan produksi.

James dan Nobes (1992) menyatakan bahwa pajak dapat diklasifikasi berdasarkan basis pajaknya. Pajak dapat didasarkan pada stok sesuatu misalnya pajak barang modal (*capital taxes*) atau aliran sesuatu yang dapat dipajakkan (*current taxes*), seperti pajak penghasilan.

Semakin banyak dan bervariasi basis pajak maka potensi penerimaan pajak makin besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah dan variasi basis

pajak, yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan aspek politik. Jika perekonomian semakin berkembang maka kegiatan ekonomi akan semakin terkonsentrasi di sektor modern, yaitu industri dan jasa. Dalam arti output ekonomi dan kesempatan kerja terkonsentrasi di sektor modern. Pada saat yang sama umumnya aktivitas perekonomian juga akan semakin terkonsentrasi di perkotaan. Perkembangan-perkembangan tersebut akan memperluas dan mempergemuk basis pajak karena bertambahnya obyek pajak dan subyek pajak.

### 2.1.3. Kriteria Sistem Pajak yang Ideal

Kriteria sistem pajak yang ideal pertama kali disampaikan oleh Adam Smith (1776) sehingga dikenal sebagai kriteria ideal Smith (*Smith's Canon*). Ada beberapa elemen pokok dari kriteria ideal Smith, yaitu keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), kenyamanan (*convenience*) dan efisiensi (*efficiency*). Dalam perkembangan selanjutnya para ekonom menambah kriteria dan atau memperjelas makna-makna kriteria ideal yang disampaikan oleh Smith.

#### Keadilan

Pengertian keadilan dikaitkan dengan keadilan kontribusi individu dalam menanggung beban pajak. Dimensi keadilan mencakup keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal bermakna bahwa individu yang memiliki kemampuan membayar lebih tinggi harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Keadilan horizontal berarti individu yang memiliki kemampuan membayar pajak yang sama, harus dikenakan beban pajak yang sama juga.

Pandangan tentang keadilan pajak dijelaskan oleh teori azas manfaat (*benefit principles*) dan azas kemampuan membayar (*ability to pay principles*).

Berdasarkan azas kemampuan membayar, maka individu atau institusi yang memiliki kemampuan membayar pajak lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Ukuran yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan membayar adalah kekayaan (*wealth*) yang dimiliki dan atau penghasilan bersih (*net income*). Jika kekayaan atau penghasilan neto makin besar, maka beban pajaknya juga makin besar. Sedangkan menurut azas manfaat (*benefit principles*)

pihak-pihak yang memperoleh manfaat yang lebih besar dari penyediaan barang publik, mereka dikenakan beban pajak yang lebih besar. Misalnya pengenaan pajak bahan bakar minyak (pajak BBM) dan pajak jalan dilandaskan pada prinsip azas manfaat.

### **Kepastian**

Unsur kepastian mencakup aspek obyektivitas dalam penentuan beban pajak atau pengenaan pajak. Pemungutan pajak harus bersifat non arbitrase. Karena itu unsur kepastian pajak amat membutuhkan kejelasan hukum pajak dan penegakkannya. Dalam konteks perekonomian modern kepastian dapat ditafsirkan bahwa para wajib pajak tidak perlu melakukan negosiasi dengan fiskus perihal pembayaran pajak mereka. Unsur kepastian amat dibutuhkan untuk menekan seminimum mungkin penghindaran ataupun penggelapan pajak oleh para wajib pajak dan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para petugas pajak.

### **Kenyamanan**

Kenyamanan berkaitan dengan sistem atau tata cara pemungutan atau pembayaran pajak. Unsur kenyamanan dikatakan makin baik bila prosedur pengisian formulir makin sederhana dan jelas, penentuan waktu pemberitahuan dan pelunasan, serta penyelesaian masalah-masalah juga sederhana dan jelas. Kenyamanan juga semakin baik bila pemungutan pajak semakin demokratis, dalam arti ada keseimbangan antara hak dan kewajiban para aparatur pajak dengan wajib pajak.

### **Efisiensi**

Secara teknis efisiensi berarti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil atau jauh lebih kecil dibanding dengan penerimaan pajak. Dapat juga dikatakan bahwa biaya marginal pemungutan pajak harus lebih kecil atau jauh lebih kecil dari penerimaan marginal pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, efisiensi mengacu kepada pengertian bahwa dampak negatif pajak yaitu inefisiensi alokasi sumber daya dalam bentuk kesejahteraan yang hilang (*dead weight loss*), menurunkan pasokan input (seperti

berkurang jam kerja dan menurunnya investasi) maupun berkurangnya output dan semakin mahalnya harga output, harus ditekan seminimum mungkin. Sebaliknya dampak positif pemungutan pajak seperti perbaikan distribusi pendapatan dan peningkatan efisiensi harus dimaksimalkan.

### **Penerimaan Politis (*Political acceptable*)**

Pajak dalam kehidupan modern yang umumnya demokratis pada dasarnya merupakan keputusan politis. Karena itu pemungutan pajak membutuhkan persetujuan rakyat yang diwakili oleh anggota legislatif. Itu sebabnya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh legislatif.

#### **2.1.4. Klasifikasi Pajak**

Pajak yang dipungut dapat diklasifikasi dari berbagai sudut pandang. Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa pajak dapat diklasifikasikan menurut tempat pemungutan dan atau siapa yang dipungut. Pajak dapat dipungut menurut:

- pasar input atau output
- penjual atau pembeli
- rumah tangga atau perusahaan
- pemilik faktor produksi atau pengguna faktor produksi.

Selanjutnya pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan:

#### **- Pajak personal (*personal tax*) dan pajak in rem (*in rem tax*):**

Dimana pajak personal dipungut berdasarkan siapa wajib pajak. Misalnya PPh dapat dikategorikan sebagai pajak personal karena dipungut dengan melihat siapa wajib pajak (kemampuan membayar pajak berdasarkan kategori pendapatan kena pajak).

Sedangkan pajak in rem dipungut berdasarkan aktivitas wajib pajak. Misalnya PPN dapat dikategorikan sebagai pajak in rem karena dipungut berdasarkan aktivitas seseorang atau badan. Seseorang yang membeli televisi dipungut pajak PPN, bukan karena kaya atau miskin tetapi karena aktivitas ekonominya membeli televisi.



### - Pajak langsung (*direct tax*) dan tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak langsung (*direct taxes*) adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh pembayar terakhir (*last tax payer*). Pajak langsung dapat juga didefinisikan sebagai pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak (wajib pajak) yang lain. Contoh pajak-pajak yang merupakan pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak property (pajak bumi dan bangunan). Karena beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain, maka keunggulan utama dari pemungutan pajak langsung adalah sangat baik dalam hal keadilan. Namun kelemahan dari pajak langsung adalah mekanisme pemungutannya relatif sulit. Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pemungutan pajak langsung adalah sulitnya mengukur tingkat kekayaan dan atau pendapatan seseorang. Umumnya wajib pajak cenderung memberikan laporan yang memperkecil nilai kekayaan dan atau penghasilan sesungguhnya (*under report*). Kecenderungan ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar.

Pajak tidak langsung (*indirect taxes*) adalah pemungutan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada wajib pajak yang lain (*tax incidence*). Contoh pajak tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pergeseran beban pajak dalam pemungutan PPN dapat terjadi dari sisi penawaran (*supply*) kepada pihak di sisi permintaan (*demand*) atau sebaliknya.

### - Pajak positif (*positive tax*) dan pajak negatif (*negative tax*)

Pajak positif adalah pajak yang sifatnya mengurangi daya beli atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pajak negatif adalah sebaliknya bersifat menambah daya beli atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pajak negatif disebut juga sebagai subsidi.

Pengkategorian langsung dari pajak adalah pajak nominal (*nominal tax*) dan persentasi (*percentage tax*).

Pajak nominal (*nominal taxes*) adalah pajak yang pemungutannya ditentukan berdasarkan nilai tertentu dari basis pajak. Sedangkan pajak persentasi (*percentage tax*) adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan persentasi tertentu dari basis pajak.

Pajak persentasi dalam dikelompokkan menjadi pajak proposional (*proportional tax*), pajak progresif (*progresive tax*) dan pajak regresif (*regressive tax*).

Pajak proporsional adalah pajak yang persentasinya terhadap basis pajak tidak berubah. Menurut Rosen (2003) pajak proporsional adalah pajak yang tarif marginalnya tidak berubah.

*A Proportional Tax has a structure where the marginal tax rate is constant and equal to the average tax rate*

Contoh dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah PPN yang ditetapkan 10%. Tarif pajak tersebut menyebabkan setiap rupiah pembelian barang/jasa yang masuk kategori terkena pajak akan dikenakan pajak sebesar sepuluh persen. Bila nilai pembelian barang/jasanya makin besar maka beban pajaknya makin besar, namun tarif pajaknya tidak berubah. Misalkan bila nilai pembelian barang/jasa adalah Rp.10 juta, beban pajak menjadi Rp.1 juta, namun tarif pajak tetap 10%.

Pajak progresif adalah pajak yang tarifnya makin tinggi bila basis pajaknya makin besar. Atau menurut Rosen (2003), pajak progresif adalah pajak yang tarif marginalnya terus meningkat dan menjadi lebih besar dari tarif rata-rata.

*A Progressive Tax has a structure where the marginal tax rate is increasing and greater than the average tax rate.*

Contoh pajak progresif dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah PPN barang mewah (PPN-BM) dan pajak penghasilan. Di Indonesia, pengenaan tarif PPh terdiri atas beberapa lapis yang ditentukan oleh lapis pendapatan kena pajak.

Pajak regresif (*regressive tax*) adalah pajak yang tarif pajaknya menurun bila basis pajaknya makin besar. Tujuan pajak regresif umumnya adalah mendorong output dan atau keinginan bekerja.

## **2.2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah**

Pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan otoritas pemerintah yang memungutnya. Berdasarkan kategori tersebut pajak dapat dikelompokkan menurut pajak pusat dan daerah. Karena studi ini memfokuskan analisis pada pajak pusat

dan daerah, maka akan diuraikan dengan cukup komprehensif tentang pajak pusat dan daerah.

### 2.2.1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Batasan-batasan pajak mana yang harus atau boleh dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan politik. Dalam uraian ini yang akan dibahas adalah sudut pandang ekonomi saja.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas pemerintah. Dari sudut pandang ekonomi tugas-tugas pemerintah disebut sebagai tugas-tugas penyediaan barang/jasa publik (*public goods provision*). Berdasarkan hal tersebut ada pandangan bahwa pajak yang dipungut pemerintah pusat sebaiknya adalah pajak yang digunakan untuk membiayai barang/jasa publik berskala nasional (*national public goods*). Yang dimaksud dengan barang publik nasional adalah barang publik yang eksternalitasnya berskala nasional, seperti pertahanan keamanan, pengadilan dan kegiatan-kegiatan politik luar negeri.

Ilmu ekonomi juga memandang pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi alokasi (*allocation*), perbaikan distribusi pendapatan (*distribution*) dan menjaga stabilitas perekonomian (*stabilization*). Ketiga fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi fiskal pemerintah (misalnya, Musgrave dan Musgrave 1989). Berdasarkan hal tersebut, maka pajak yang dipungut pemerintah pusat adalah pajak yang efektif mempengaruhi perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, maka umumnya pajak yang dipungut pemerintah pusat merupakan pajak-pajak yang besar dan gemuk, seperti PPh dan PPN. Tidaklah mengherankan bila umumnya porsi penerimaan pajak pemerintah pusat jauh lebih besar dari porsi penerimaan pemerintah daerah.

Pengalaman negara maju seperti Amerika menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terdiri atas pajak individu dan perusahaan merupakan 59 % total penerimaan pajak pemerintah pusat (*federal tax income*). Selain itu pemerintah pusat juga memungut pajak bea cukai (*excise dan custom*).

### 2.2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Secara teoritis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak-pajak yang memiliki eksternalitas lokal. Sekalipun masih tetap terjadi perdebatan tentang seberapa besar porsi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, para ahli ekonomi perpajakan setuju dengan pajak karena berbagai pertimbangan.

Bahl dan Bird (2008) menyatakan ada manfaat positif dari pemungutan pajak daerah. Manfaat pertama adalah manfaat yang dikaitkan dengan manfaat pelaksanaan desentralisasi, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah, menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan dukungan politis daerah terhadap kebijakan-kebijakan publik. Tujuan akhir yang diharapkan adalah membaiknya kesejahteraan rakyat daerah.

Manfaat kedua adalah manfaat yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak, tanpa mengganggu atau terlalu mengganggu perekonomian ataupun mengurangi penerimaan pajak pemerintah pusat. Alasannya adalah pemerintah daerah dapat memungut pajak-pajak dengan biaya yang lebih rendah, dibanding dengan bila dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga umumnya lebih memahami potensi daerahnya dibanding dengan pemerintah pusat.

Manfaat ketiga adalah pajak pusat dapat mengurangi beban anggaran pemerintah pusat karena meningkatnya penerimaan pemerintah daerah.

*“One reason fiscal decentralization may increase revenue is because, by involving subnational governments more directly in taxation, a greater share of GDP may be reached by the tax system...The revenue mobilization hypothesis is essentially that subnational government have the potential – and, if the governmental transfer system is properly designed, the incentive- to reach the traditional income, consumption and wealth tax bases in ways that the central government cannot.*

*If this hypothesis is correct, increases government revenue will not be offset by reduction in the central government tax revenue. Indeed, increased subnational revenue mobilization will reduce the need for*

*intergovernmental transfer from central revenue*” (Bahl dan Bird, 2008, halaman 3)

Birds dan Bahl (2008) selanjutnya membuat beberapa klasifikasi tentang apa yang dimaksud dengan pajak daerah.

*“ A completely local tax might perhaps be as one that satisfies six distinct conditions:*

- (1) Local government can decide whether to levy the tax or not*
  - (2) They can also determine the precise base of the tax*
  - (3) They can decide the tax rate*
  - (4) In the case of “direct” taxes, they assess the tax imposed on any particular tax payer*
  - (5) They administer the tax*
  - (6) They get to keep all they collect*
- (Bahl dan Bird, 2008, halaman 3).

Dalam dunia nyata tidak semua asumsi-asumsi tersebut di atas dapat dipenuhi. Misalnya dalam konteks Indonesia, beberapa pajak penting seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor tarifnya diputuskan oleh pemerintah.

Bahl dan Bird (2008), juga menguraikan empat syarat utama tentang kategori pajak daerah yang baik.

*“Four basic principles for assigning revenue to subnational government may be suggested:*

- First, subnational taxes should be not unduly distort the allocation of resources*
- Second, to the extent possible governments at all levels should bear significant responsibility at the margin for financing the expenditure for which they are political responsible.*
- Third, ideally own-resources revenue should be sufficient to enable at least the richest subnational governments to finance from their own resources all locally provided services that primarily benefit local residents.*

- *Fourth, to the extent possible, subnational revenues should be burden only local residents, preferably in relation to the perceived benefits they receive from local services.”*

(Bahl dan Bird, 2008, halaman 8).

Syarat-syarat di atas sebenarnya mengandung unsur-unsur pajak ideal dalam klasifikasi Smith. Dengan demikian baik pajak pusat maupun daerah sebaiknya memperhatikan aspek efisiensi, kepastian, keadilan dan kenyamanan.

Devas (1989) menyampaikan beberapa patokan atau tolok ukur dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, seperti berikut ini:

1. Hasil (*Yield*) :

Yang mencakup aspek-aspek stabilitas hasil pajak, mudah diprediksi, aspek elastisitas pajak terhadap inflasi, serta perbandingan antara hasil pajak dengan biaya pemungutan pajak.

2. Keadilan (*equity*) :

Dasar pemungutan pajak harus jelas dan obyektif. Tidak sewenang-wenang. Memperhatikan keadilan vertikal dan horisontal

3. Daya guna Ekonomi (*efficiency*):

Pajak daerah tidak boleh menyebabkan distorsi alokasi sumber daya.

4. Kemampuan pelaksanaan (*ability to implement*) :

Pemungutan pajak daerah harus mampu dan mau dilaksanakan secara politik dan manajerial

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a local revenue resources*) :

- Harus jelas kepada daerah mana pajak harus dibayar
- Tempat memungut harus diusahakan agar sama dengan tempat akhir beban pajak
- Jangan mempertajam perbedaan-perbedaan dengan daerah lain
- Tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan manajerial daerah

Stiglitz (2000) secara agak khusus memberi perhatian terhadap masalah pengalihan beban pajak (*tax incidence*) dalam pengenaan pajak daerah (*local tax*). Ada perbedaan dampak dalam jangka pendek dengan jangka panjang.

Contoh pertama adalah pemungutan pajak barang modal (*local capital tax*). Dalam jangka pendek akan menurunkan daya tarik investasi di daerah yang bersangkutan. Dalam jangka panjang ada kemungkinan para investor memindahkan barang modalnya ke daerah lain yang pajaknya lebih rendah. Akibatnya dalam jangka panjang beban pajak barang modal tidak dirasakan oleh pemilik barang modal tetapi pemilik tanah dan pekerja lokal. Sebab dengan berkurangnya barang modal di daerah tersebut maka produktivitas lahan dan pekerja akan turun. Sewa lahan dan upah pekerja juga akan turun.

Contoh kedua adalah pengenaan pajak properti (PBB). Cakupan PBB adalah tanah, bangunan, barang modal dan peralatan produksi. Dampak beban pajak yang dirasakan berbeda-beda. Pengenaan pajak tanah akan menyebabkan beban pajak digeser ke pemilik lahan, karena pasokan tanah adalah inelastis sempurna. Sebaliknya dalam jangka panjang pasokan bangunan cenderung bersifat elastis, sehingga investor dapat lebih bebas memilih daerah investasi. Dengan demikian salah satu basis utama pajak properti dalam jangka panjang akan mudah berpindah.

### **2.3. Kinerja Pajak**

Analisis kinerja pajak tidak dapat dilepaskan dari konsep kinerja penerimaan pemerintah. Purohit (2008) menyatakan bahwa kinerja penerimaan pemerintah memberikan gambaran tentang perubahan relatif dari penerimaan pajak dan bukan pajak pemerintah pusat dan atau daerah. Analisis kinerja penerimaan mencakup laju pertumbuhan, basis penerimaan, daya cakup dan struktur penerimaan. Analisis kinerja penerimaan juga membahas tentang persoalan efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak dan non pajak.

*“Revenue performance indicates the relative changes in yield from tax and non tax revenue of national or subnational government. It takes account the changes in rates, base, and coverage related to the structure of revenue resources. It also incorporated issues related to efficiency in governance of tax and non tax sources.”* (Purohit, 2008. Halaman 7).

Berdasarkan pandangan di atas maka analisis kinerja pajak adalah analisis yang lebih spesifik dari kinerja penerimaan pemerintah. Analisis kinerja pajak

mencakup analisis tentang pertumbuhan penerimaan pajak, perubahan struktur penerimaan dan efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak.

Beberapa ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pajak adalah penerimaan pajak (*tax revenue*), rasio pajak (*tax ratio*), daya cakupan pajak (*tax coverage*) dan struktur penerimaan pajak (*tax revenue structure*).

### **2.3.1. Nilai Penerimaan Pajak**

Nilai penerimaan pajak diukur dengan nilai nominal dan nilai riil penerimaan pajak.

#### **Nilai Nominal Penerimaan Pajak**

Yang dimaksud dengan nilai nominal penerimaan pajak adalah nilai penerimaan pajak dalam satuan nominal mata uang. Nilai nominal pajak dapat dilihat pada laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, penerimaan nominal pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penerimaan nominal pajak pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penerimaan nominal pajak pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Tabel 2.1 di bawah ini memberikan contoh dalam kehidupan nyata di Indonesia tentang penerimaan nominal pajak pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya selama beberapa tahun terakhir.



Tabel 2.1  
Penerimaan Nominal Pajak  
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota  
Surabaya Tahun 2002-2005  
(Rp Miliar)

Tahun	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Kota Surabaya
2002	219.628	1.553.8	151,5
2003	254.140	1.910,5	200,1
2004	280.559	2.540.1	237,2
2005	347.031	3.089,1	269,2

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan dan BPS

Catatan: Penerimaan pajak nominal Pemerintah Kota Surabaya tidak termasuk Bagi Hasil Pajak

Data pada Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa nilai penerimaan pajak nominal pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya selama tahun 2002-2005 terus membesar. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan nominal penerimaan pajak. Berdasarkan data-data di atas dan dengan menggunakan metode bunga majemuk (*compound interest*) dapat diketahui bahwa selama periode 2002-2005 laju pertumbuhan penerimaan nominal pajak pemerintah pusat adalah 16,5% per tahun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 7,5% per tahun dan pemerintah Kota Surabaya adalah 15% per tahun

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penerimaan nominal pajak yang semakin besar dari tahun ke tahun tidaklah selalu berarti kinerja pajak makin baik. Peningkatan penerimaan pajak nominal dapat menunjukkan kinerja pajak membaik bila perekonomian tidak mengalami inflasi atau laju inflasi sangat rendah. Dengan mempertimbangkan laju inflasi maka penerimaan pajak nominal kurang akurat digunakan sebagai ukuran kinerja pajak. Terutama bila laju inflasi makin tinggi.

Di negara-negara sedang berkembang (NSB), penggunaan penerimaan pajak nominal sebagai indikator kinerja pajak harus dilakukan dengan sangat hati-

hati. Hal ini disebabkan laju inflasi di NSB umumnya lebih tinggi dari 10% per tahun.<sup>1</sup>

### Nilai Riil Penerimaan Pajak

Jika ada inflasi, maka indikator kinerja pajak lebih baik menggunakan nilai riil penerimaan pajak. Nilai riil penerimaan pajak adalah nilai nominal penerimaan pajak dibagi dengan Indeks Harga Umum. Salah satu indeks harga umum yang dapat digunakan adalah Indeks Harga Implisit (IHI) atau juga dikenal dengan nama deflator PDB (*GDP deflator*) dalam konteks pemerintah pusat dan deflator PDRB dalam konteks pemerintah daerah.

Nilai riil penerimaan pajak, dapat dihitung dengan formula yang sederhana seperti di bawah ini.<sup>2</sup>

$$TAXR = \frac{TAX}{IHI} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

TAXR = Penerimaan Riil Pajak  
 TAX = Penerimaan Nominal Pajak  
 IHI = Indeks Harga Implisit

Dari persamaan di atas dapat dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika laju inflasi sama dengan nol persen per tahun, maka laju pertumbuhan penerimaan riil pajak adalah sama dengan laju pertumbuhan pajak nominal
2. Jika ada inflasi maka laju pertumbuhan penerimaan riil pajak lebih rendah dari laju pertumbuhan penerimaan nominal pajak.

---

<sup>1</sup> Laporan Bank Dunia (World Bank) misalnya laporan tahun 2005 menunjukkan bahwa laju inflasi di NSB umumnya di atas 10% per tahun. Hal ini sangat kontras dengan laju inflasi di Negara-negara maju yang umumnya lebih rendah dari 5% per tahun. Dengan laju inflasi sebesar 10% per tahun, maka setiap tujuh tahun daya beli umumnya (penerimaan pajak khususnya) akan menjadi separuhnya saja.

<sup>2</sup> Perhitungan penerimaan pajak riil. Sebenarnya merupakan adaptasi dari perhitungan penerimaan riil atau pendapatan riil individu misalnya pekerja, yaitu pendapatan nominal pekerja dibagi dengan indeks harga umum. Dapat dilihat lebih lanjut misalnya dalam (Hubbard dan O. Brien, 2006)

3. Bila laju inflasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penerimaan nominal pajak, maka laju pertumbuhan penerimaan riil pajak adalah negatif.

Salah satu keuntungan penggunaan indikator penerimaan pajak riil adalah segera diketahuinya perkembangan daya beli penerimaan pajak. Bila laju inflasi lebih tinggi dari laju penerimaan nominal pajak maka seperti telah disampaikan sebelumnya, laju pertumbuhan penerimaan pajak riil adalah negatif. Artinya sekalipun jumlah nominal penerimaan pajak makin besar, daya belinya semakin rendah.

Tabel 2.2 di bawah ini memberikan contoh sederhana tentang keterkaitan antara pajak nominal, indeks harga umum (IHI) dan pajak riil.

Tabel 2.2  
Pajak Nominal dan Pajak Riil Pemerintah Pusat Indonesia  
Periode 2002-2005

Tahun	Pajak Nominal (Rp.Miliar)	IHI	Pajak Riil (Rp.Miliar)
2002	219,628	126	1,741
2003	254,140	130	1,962
2004	280,559	139	2,024
2005	347,031	158	2,190
Perubahan 2002-2005 (% per tahun)	16,5	7,9	7,9

Sumber: Diolah dari data BPS dan Departemen Keuangan

Data pada Tabel 2.2 di atas yang perlu diamati adalah kecenderungan perubahannya (tren perkembangannya). Selama periode 2002-2005 nilai nominal penerimaan pajak pemerintah pusat tumbuh rata-rata 16,5% per tahun. Pada periode yang sama laju inflasi diukur dengan IHI adalah 7,9%. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan riil pajak selama periode 2002-2005 adalah 7,9% per tahun. Artinya walaupun penerimaan nominal pajak pemerintah pusat tumbuh 16,5%, namun daya beli pajak (penerimaan riil pajak) pemerintah pusat hanya tumbuh sebesar 7,9 % per tahun karena ada inflasi sebesar 7,9% per tahun. Hal ini menunjukkan inflasi mempunyai dampak menurunkan daya beli penerimaan pajak. Bila laju inflasi makin tinggi maka laju penurunan daya beli dari penerimaan pajak akan semakin cepat.

Dalam konteks kebijakan fiskal, yang lebih berpengaruh terhadap kemampuan sektor publik dalam mengarahkan atau mempengaruhi kinerja makro adalah penerimaan pajak riil. Bila penerimaan pajak riil makin tinggi, maka jumlah output agregat yang dapat dibeli oleh pemerintah akan semakin besar. *Ceteris paribus* hal ini akan mendorong pertumbuhan permintaan agregat melalui dampak multiplier dan proses akselerasi.

## **2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak**

Secara garis besar, ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi kinerja pajak, yaitu faktor internal perekonomian, faktor eksternal perekonomian dan efisiensi sistem pemungutan pajak.

### **2.4.1. Faktor Internal Perekonomian**

Yang dimaksud dengan faktor-faktor internal adalah faktor-faktor yang sebenarnya berada di bawah kontrol atau otoritas pemerintahan. Dalam konteks pajak pusat, faktor internal adalah perekonomian nasional. Sedangkan dalam konteks pemerintah daerah adalah perekonomian daerah. Faktor-faktor internal inilah yang memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak.

Ada beberapa indikator utama yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian potensi penerimaan pajak (*tax generating capacity*). Indikator-indikator tersebut adalah pendapatan per kapita atau output agregat per kapita, struktur produksi, struktur kesempatan kerja, tingkat keterbukaan ekonomi, porsi penduduk perkotaan (Todaro, 2003; Purohit, 2008).

### **Pendapatan per Kapita**

Dalam analisis ekonomi makro yang dimaksud dengan pendapatan per kapita adalah total output agregat riil dibagi dengan jumlah penduduk. Output agregat riil diukur dengan PDB atau PDRB harga konstan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bila pendapatan perkapita makin besar maka rata-rata kue ekonomi yang dibagi kepada setiap penduduk makin besar. Selanjutnya dapat juga dikatakan jika output agregat riil per kapita makin tinggi, maka tingkat kemakmuran rakyat makin tinggi.

Bank Dunia (World Bank) menggunakan angka *Gross National Income* (GNI) yaitu PDB riil per kapita yang disesuaikan dengan *Purchasing Power Parity* (PPP), untuk menyusun kategori tingkat kemajuan suatu perekonomian. Laporan Bank Dunia tahun 2005 menyatakan bahwa GNI per kapita sebuah negara adalah  $\leq$  US\$765, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Bila GNI per kapita diantara US\$765 sampai dengan US\$3.035 negara tersebut dikategorikan berpendapatan menengah ke bawah. Bila diantara US\$3.036 sampai dengan US\$9,385 negara tersebut dikategorikan berpendapatan menengah ke bawah. Bila GNI per kapita suatu negara  $\geq$  US\$9.836 negara tersebut dikatakan berpendapatan tinggi.

Bila pendapatan per kapita sebuah negara semakin tinggi, maka *ceteris paribus* potensi penerimaan pajaknya akan semakin besar. Umumnya pada saat pendapatan per kapita makin tinggi, maka kuantitas khususnya barang modal dan tenaga kerja bertambah besar, sedangkan kualitas inputnya membaik. Hal ini akan mendorong pertumbuhan produktivitas input yang akan meningkatkan balas jasa terhadap input. Di sisi output, umumnya ketika output per kapita makin tinggi, jumlah dan variasi produksi barang/jasa juga makin banyak dan nilai tambahnya makin tinggi. Faktor-faktor tersebut membuat basis pajak semakin kuat, luas dan beragam.

### **Struktur Produksi**

Istilah struktur produksi mengacu kepada pengertian tentang berapa persen porsi output sektoral terhadap PDB harga konstan di suatu negara. Dalam konteks perekonomian daerah, struktur produksi mengacu kepada pengertian berapa persen sumbangan output agregat masing-masing sektor terhadap PDRB harga konstan provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan standar internasional, seperti juga yang digunakan dalam laporan BPS, output agregat suatu perekonomian dapat dikelompokkan menjadi 9 sektor yang terdiri atas, pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

Sembilan sektor tersebut dikelompokkan lagi menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer yang terdiri atas sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Sektor primer mencakup pertanian; pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi. Sektor tersier mencakup perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

Yang dimaksud dengan sektor modern adalah sektor sekunder dan tersier. Ciri utama dari sektor modern adalah nilai tambahnya lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dari sektor primer dan badan usahanya berbentuk formal. Jika perekonomian semakin maju, maka perusahaan-perusahaan yang berada di sektor modern selain berbentuk formal, berskala besar dan seringkali merupakan perusahaan multi nasional (Purohit, 2008). Dapat dikatakan bahwa jika porsi sektor modern makin besar, maka *ceteris paribus* jumlah obyek pajak makin banyak dan nilai obyek pajak makin tinggi. Pada saat yang bersamaan jumlah wajib pajak makin banyak dan kemampuan membayar para wajib pajak juga makin besar.

Porsi sektor modern dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

$$\text{PORMO} = \frac{\text{QSEKMO}}{\text{YR}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana:

- PORMO = Porsi Sektor Modern  
 QSEKMO = Nilai output agregat riil (PDB atau PDRB harga konstan) sektor sekunder dan tersier  
 YR = PDB atau PDRB harga konstan

Jika nilai pormo makin besar, maka peranan sektor modern makin besar. Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis ketika porsi sektor modern makin besar maka *ceteris paribus* potensi penerimaan pajak makin besar.

### Struktur Kesempatan Kerja

Istilah struktur kesempatan kerja dalam penelitian ini mengacu kepada komposisi lapangan kerja yang tersedia dalam perekonomian menurut sektor produksi. Jika perekonomian makin modern, maka porsi angkatan kerja yang bekerja di sektor sekunder dan tersier akan semakin besar. Di sektor modern, upah atau gaji para pekerja umumnya lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dari pada di sektor primer. Selain itu juga para pekerja terikat dengan kontrak kerja formal. Dua karakteristik tersebut menyebabkan bila perekonomian makin modern, maka potensi penerimaan pajak penghasilan akan semakin besar, karena semakin banyak pekerja yang dapat dikenakan PPh dan mereka teridentifikasi dengan baik.

Bila perekonomian semakin modern, konsumsi para pekerja juga semakin tinggi, sehingga potensi penerimaan pajak penjualan (PPN) dan PPN barang mewah juga semakin besar.

### Tingkat Keterbukaan Ekonomi

Tingkat keterbukaan ekonomi mengacu kepada pengertian tentang tingkat interaksi suatu perekonomian dengan luar perekonomian tersebut. Interaksi antara satu perekonomian dengan perekonomian lainnya, terutama melalui ekspor dan impor. Itulah sebabnya, salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan perekonomian adalah porsi total nilai ekspor ditambah impor dibandingkan dengan total nilai PDB atau PDRB.

Formula penghitungan tingkat keterbukaan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$OPEN = \frac{(X + M)}{Y} \times 100 \dots\dots\dots(2.3)$$

Dimana:

- OPEN = Tingkat Keterbukaan Ekonomi
- X = Nilai Ekspor Harga berlaku
- M = Nilai Impor Harga Berlaku
- Y = PDB atau PDRB Harga berlaku

Bila nilai OPEN makin besar, maka tingkat keterbukaan ekonomi juga makin besar. Seharusnya bila tingkat keterbukaan ekonomi makin besar maka potensi penerimaan PPN atau PPN-BM juga makin besar, karena jumlah barang/jasa yang dapat dikenakan pajak juga semakin besar (Purohit, 2008). Tetapi faktor kebijakan pemerintah dapat lebih menentukan potensi penerimaan pajak. Bila pemerintah menempuh kebijakan pembebasan pajak untuk barang ekspor dan atau impor, investasi asing maupun PPh bagi perusahaan asing, maka keterbukaan ekonomi tidak terlalu bermanfaat untuk menaikkan penerimaan pajak.

Argumen yang umumnya digunakan untuk kebijakan penghapusan atau keringanan pajak barang ekspor, barang impor maupun investasi dan pajak perusahaan asing adalah menstimulir pertumbuhan ekonomi dan mempercepat modernisasi perekonomian.

### **Porsi Penduduk Perkotaan**

Porsi penduduk perkotaan menunjukkan berapa persen penduduk suatu negara atau daerah yang tinggal di wilayah urban (kota).

Wilayah kota sering dinilai sebagai wilayah yang lebih maju dari wilayah desa, setidaknya- tidaknya berdasarkan beberapa alasan di bawah ini:

1. Infrastrukturnya seperti jalan, listrik, transportasi dan infrastruktur keuangan di wilayah perkotaan jauh lebih baik dan lebih banyak dibanding dengan di wilayah pedesaan dibanding wilayah pedesaan.
2. Kualitas SDM di wilayah perkotaan lebih baik dibanding kualitas SDM di wilayah pedesaan.
3. Porsi sektor formal di wilayah perkotaan lebih besar bahkan jauh lebih besar dibanding di wilayah pedesaan.

Karena ketiga alasan tersebut di atas, maka potensi ekonomi wilayah perkotaan lebih besar atau jauh lebih besar dibanding dengan wilayah pedesaan. Dengan demikian, *ceteris paribus* potensi pajak wilayah perkotaan jauh lebih besar dibanding dengan wilayah pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bila porsi penduduk yang tinggal di wilayah urban (perkotaan) makin besar, maka *ceteris paribus* potensi penerimaan pajak makin besar.



Bahl, et all. (1990) menyatakan bahwa meningkatnya urbanisasi akan meningkatkan penerimaan pajak properti, pajak kendaraan bermotor, pajak-pajak iklan, hiburan dan lain-lain. Umumnya pajak-pajak ini diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Potensi pajak tersebut mungkin saja sulit terealisasi, bila perkembangan ekonomi kota masih dalam tahap awal, biaya pemungutannya besar dan jumlah aparatur pajak tidak memadai, sedangkan kualitas aparatur masih rendah.

#### 2.4.2. Efisiensi Sistem Perpajakan

(Faria dan Yucelik, 1995) melihat adanya hubungan antara kebijakan pajak dengan efisiensi sistem pajak. Efisiensi sistem pajak sangat ditentukan oleh efisiensi sistem administrasi pajak. Kebijakan pajak tidak akan meningkatkan kinerja pajak tanpa disertai daya dukung administrasi pajak. Hubungan kedua elemen tersebut dapat dilihat dalam persamaan sederhana di bawah ini.

$$\text{Tax Revenue/GDP} = (\text{Tax Base/GDP}) \times (\text{Tax Collected/Tax Base})$$

Tax Revenue/GDP menggambarkan kinerja pajak pemerintah, dimana jika nilainya makin besar maka kinerja pajak makin baik. Tax Base/GDP menggambarkan kebijakan pajak yang ditempuh pemerintah. Sedangkan Tax Collected/Tax Base menggambarkan efisiensi sistem (administrasi) pajak. Jika nilai rasio Tax Collected/Tax Base makin besar maka sistem pajak semakin efisien, karena porsi potensi pajak yang dapat digarap semakin besar.

Sistem perpajakan dikatakan makin efisien bila dengan sumber daya yang sama atau biaya pemungutan yang sama, pajak yang berhasil dikumpulkan semakin besar. Atau untuk mencapai target pemungutan pajak yang sama dibutuhkan biaya pemungutan (pengorbanan sumber daya) yang lebih kecil.

Dari sudut pandang analisis ekonomi, efisiensi pemungutan pajak dikaitkan dengan berapa besar biaya ekonomi dari pemungutan pajak dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Biaya ekonomi dari pemungutan pajak antara lain; berkurangnya keinginan bekerja, turunnya laju investasi dan kesejahteraan yang hilang akibat pemungutan pajak (*dead weight loss*). Sedangkan

manfaat ekonomi dari pemungutan pajak antara lain peningkatan efisiensi alokasi sumber daya dan perbaikan distribusi pendapatan.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat efisiensi sistem pemungutan pajak, yaitu kuantitas dan kualitas aparatur pajak (fiskus), institusi dan sistem pemungutan pajak (*sentralistis* atau *desentralistis*).

### **Kuantitas dan Kualitas Fiskus**

Jumlah aparatur pajak yang semakin besar, *ceteris paribus* pada awalnya dapat meningkatkan penerimaan karena semakin banyaknya obyek pajak atau subyek pajak yang dapat digarap. Tetapi jika jumlah fiskus terus ditambah, suatu ketika penambahan biaya pemungutan pajak menjadi lebih besar dari penambahan penerimaan pajak. Gejala ini yang di sebut sebagai *The Law of Diminishing Return*.

Penambahan jumlah petugas pajak tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas, akan menyebabkan biaya marjinal pemungutan pajak menjadi lebih besar dari manfaat marjinalnya, yaitu tambahan penerimaan pajaknya. Kualitas petugas pajak dapat diukur dari latar belakang pendidikan dan latihan serta pengalaman kerja. Jika tingkat pendidikannya makin tinggi, semakin banyak pelatihan-pelatihan yang dijalani dan semakin lama tahun kerjanya, maka aparatur pajak akan semakin produktif.

### **Institusi**

Perbaikan kuantitas dan kualitas fiskus dapat memperbaiki efisiensi pemungutan pajak. Namun aparatur pajak yang cakap sekalipun umumnya lebih mengkonsentrasikan diri pada efisiensi teknis pemungutan pajak. Untuk memperbaiki efisiensi ekonomi pemungutan pajak dibutuhkan perbaikan atau penataan kelembagaan (institusi).

Definisi yang paling sederhana dari institusi adalah seperangkat aturan atau tata nilai baku yang disepakati untuk ditaati dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kolektif. Institusi yang paling menentukan dalam sistem perpajakan adalah institusi politik (*political institution*). Rosen (2003) mendefinisikan lembaga politik sebagai berikut,

*“Political Institutions are rules and generally accepted procedures that evolve for determining what government does and how government outlays are financed”.*

Lembaga-lembaga politik adalah aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang secara umum diterima untuk memutuskan apa yang harus pemerintah lakukan dan bagaimana pemerintah membiayainya. Contoh lembaga politik dalam kehidupan sehari-hari adalah suara mayoritas (*majority rule*) dan pemerintah yang berkuasa (*representative government*).

Dari definisi di atas, tingkat efisiensi sistem perpajakan ditentukan oleh kekuatan politik rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah yang berkuasa. Keputusan politik yang benar dapat mendorong kepada perbaikan atau peningkatan efisiensi teknis dan atau ekonomis sistem pemungutan pajak. Maksudnya adalah, keputusan pemerintah dan DPR bukan saja dapat meningkatkan keahlian atau produktivitas para aparatur pajak, tetapi di sisi lain dapat mengoptimalkan manfaat sosial (*social benefit*) dari pemungutan pajak dan meminimumkan biaya sosial (*social cost*) dari pemungutan pajak.

### **Sentralisasi atau Desentralisasi**

Sistem pajak yang sentralistik akan menyebabkan pemerintah daerah relatif tidak memiliki kekuatan atau wewenang dalam pemungutan pajak. Sebaliknya sistem pajak yang desentralistik memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan atau otoritas yang besar dalam pemungutan pajak.

Jika sistem pajaknya sangat sentralistik maka kinerja pajak pemerintah daerah akan buruk. Namun jika sistem pajaknya desentralistik, kinerja pajak pemerintah daerah dapat saja menjadi lebih baik.

Mana yang lebih baik antara sistem sentralisasi atau desentralisasi masih tetap menjadi perdebatan. Salah satu alasan, kelompok yang mendukung desentralisasi pajak adalah bahwa dengan desentralisasi, semakin banyak objek-objek pajak yang lepas dari garapan pemerintah pusat, dapat digarap oleh pemerintah daerah. Karena itu desentralisasi pajak tidak akan menimbulkan tumpang tindih pemungutan, selama sistem pemungutan pajak masih belum efisien atau belum mampu menggarap sebagian besar potensi pajak.

## Reformasi Pajak

Upaya yang paling umum dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan adalah reformasi pajak (*tax reform*). Stotsky (1995) mengakui bahwa reformasi pajak pelaksanaannya sangat kompleks dan berat, karena berkaitan dengan berbagai kekuatan politik dan ekonomi. Namun reformasi pajak dibutuhkan dan harus dilakukan bila ternyata sistem pajak menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan dan maraknya kejahatan-kejahatan pajak.

*”Reforming the tax system in any country is a complicated undertaking, with its scope and direction frequently circumscribed by many political and economic factors. One unmistakable common goal of tax reform is the simplification of existing tax systems in recognition that overly complicated tax systems tend to generate inefficiencies, inequalities, high compliance costs, and tax evasion”.* (Stotsky, 1995, halaman 279)

Definisi di atas menunjukkan bahwa reformasi pajak pada prinsipnya adalah peningkatan efisiensi pajak melalui penyederhanaan sistem pajak.

### 2.4.3. Faktor Eksternal Perekonomian

Yang dimaksud dengan faktor-faktor eksternal perekonomian adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan kontrol kekuasaan pemerintah. Dalam konteks pemerintah pusat, khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB) faktor-faktor eksternal dapat berupa perkembangan ekonomi internasional atau kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah-pemerintah negara-negara maju. Sedangkan dalam konteks pemerintah daerah yang faktor eksternalnya lebih luas, yaitu perkembangan perekonomian nasional dan terutama kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat.

### Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional

Dalam konteks pemerintah pusat, perkembangan ekonomi internasional seperti pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan atau negara-negara pesaing, kemajuan teknologi dan perkembangan-perkembangan harga dunia untuk komoditi strategis dapat mempengaruhi kinerja pajak pemerintah pusat. Misalnya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi negara maju dapat menurunkan ekspor

NSB sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Muaranya adalah menurunnya penerimaan pajak.

Kebijakan ekonomi negara-negara maju juga dapat mempengaruhi kinerja pajak pemerintah melalui pengaruhnya kepada kinerja ekonomi makro. Misalkan kebijakan protektif oleh pemerintah negara-negara maju dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi NSB karena menurunnya ekspor. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan menurunkan kinerja pajak.

Kejutan-kejutan eksternal (*external shock*) juga dapat mempengaruhi kinerja pajak melalui pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi makro. Misalkan, kenaikan harga energi yang tinggi dan mendadak akan mempengaruhi secara negatif penawaran agregat. Hal ini dapat membawa perekonomian domestik ke dalam kondisi resesi.

Cara berpikir yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan dampak perkembangan ekonomi nasional dan internasional terhadap kinerja pajak pemerintah daerah.

### **Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat**

Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pusat mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pajak pemerintah daerah. Misalkan pemerintah pusat menempuh kebijakan kontraktif dalam jangka panjang. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang akhirnya mempengaruhi kinerja pajak pemerintah daerah.

## **2.5. Sistem Pajak di Indonesia**

Perkembangan sistem pajak di Indonesia, yang terbaru dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 (UU No.33/2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah. Berdasarkan UU No.33.2004 sistem pajak Indonesia mengenal pajak pusat, pajak daerah dan bagi hasil pajak.

### **2.5.1. Pajak Pusat**

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan pajak yang dipungut oleh pusat di Indonesia, relatif sama dengan

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di negara-negara lain. Perubahan beberapa undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat – daerah tidak merubah secara drastis basis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di Indonesia. Sampai saat ini pemerintah pusat tetap mempertahankan pajak pendapatan perusahaan (badan) dan pribadi, pajak penjualan serta pajak-pajak yang berasal dari minyak bumi dan gas alam.

### **2.5.2. Pajak Daerah**

UU No.33 tahun 2004 bab 4 pasal 5 menyatakan salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan bab 5 pasal 6 ayat 1 menyatakan salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Namun UU No.33 tahun 2004 tidak mengatur secara rinci tentang pajak-pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Undang-Undang yang mengatur pajak daerah menurut Eckardt dan Shah (2006) adalah UU No.34 tahun 2000 pasal 2, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk memberlakukan pajak baru, selama memenuhi prinsip-prinsip pajak yang baik, di bawah ini:

1. Yang diberlakukan adalah pajak bukan restribusi
2. Basis pajak berada di wilayah bersangkutan dan tidak mudah berpindah
3. Pemungutan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Basis pajak bukan merupakan basis pajak pemerintah provinsi dan nasional
5. Potensi penerimaan pajak tersebut cukup besar
6. Pemungutan pajak tidak menimbulkan distorsi ekonomi
7. Pemungutan pajak mempertimbangkan aspek keadilan
8. Pemungutan pajak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup

Tabel 2.3 di bawah ini adalah pajak-pajak yang boleh dipungut pemerintah daerah di Indonesia, seperti yang diringkas oleh Eckard dan Shah (2006).

Tabel 2.3  
Pajak-Pajak Daerah di Indonesia

Jenis Pajak	Tingkat Pemerintah	Basis Pajak
Pajak Kendaraan Bermotor	Provinsi	Nilai Kendaraan Bermotor (tahunan)
Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor	Provinsi	Harga penjualan kembali kendaraan bermotor (tahunan)
Pajak BBM	Provinsi	Nilai konsumsi BBM (tingkat eceran, tidak termasuk PPN)
Pajak Air Tanah	Provinsi	Konsumsi Air
Pajak Hotel	Kabupaten/Kota	Nilai Omset
Pajak Restoran	Kabupaten/Kota	Nilai Omset
Pajak Hiburan	Kabupaten/Kota	Nilai Omset
Pajak Reklame	Kabupaten/Kota	Nilai Sewa Iklan
Pajak Penerangan Jalan	Kabupaten/Kota	Konsumsi Listrik (harga eceran, tidak termasuk PPN)
Pajak Tambang Kelas C	Kabupaten/Kota	Nilai Pasar mineral-mineral yang diekstraksi
Pajak Perparkiran	Kabupaten/Kota	Iuran Parkir

Sumber: Eckardt dan Shah (2006), Tabel 7.5, halaman 247

### 2.5.3. Bagi Hasil Pajak

UU No.33 tahun 2004 yang mengatur dana bagi hasil adalah Bab IV, pasal 5 sampai dengan Bab IV, pasal 21.

Ketentuan Umum poin (19) UU No.33 tahun 2004 menyatakan bahwa dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan poin (20) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Bab II, pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Bab IV pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan. Sedangkan bab 6 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu sumber dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil.

Sedangkan cakupan Dana Bagi Hasil, di atur oleh UU No.33, bab 6 (bagian 2) pasal 11, seperti yang dikutip di bawah ini.

Dana Bagi Hasil  
Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. kehutanan;
  - b. pertambangan umum;
  - c. perikanan;
  - d. pertambangan minyak bumi;
  - e. pertambangan gas bumi; dan
  - f. pertambangan panas bumi.

Selanjutnya bab 6 pasal 12 sampai dengan pasal 21 mengatur distribusi bagi hasil, yang dapat diringkas seperti pada Tabel 2.4 di bawah ini.



Tabel 2.4.  
Bagi Hasil Pajak Menurut UU No.33 tahun 2004

Sumber Pendapatan	Pemerintah Pusat	PemdaProvinsi Penghasil	Pemda Kabupaten/Kota Penghasil	Seluruh Pemda Kabupaten/Kota dalam	Seluruh Pemda Provinsi (dibagi rata)
PPh Individu	80,0	8,0	12,0		
PBB	9,0	16,2	64,8		10,0
		16,0	64,0		20,0
PBB kawasan Pertambangan	20,0	16,0	64,0		
Royalti Pertambangan	20,0	16,0	32,0	32,0	
HPH	20,0	16,0	32,0	32,0	
Royalti Perikanan	20,0				80
Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0	
Minyak Bumi: -Porsi Dasar - Porsi Untuk Menambah Anggaran Pendidikan Dasar	84,5	3,0 0,1	6,0 0,2	6,0 0,2	
Gas Alam: -Porsi Dasar -Porsi Untuk Menambah Anggaran Pendidikan Dasar	69,5	6,0 0,1	12,0 0,2	12,0 0,2	

Sumber: UU No.33 tahun 2004.

Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih berupaya mengontrol pajak-pajak yang sangat potensial, yaitu PPh Individu, Minyak Bumi Dan Gas Alam, dengan mengambil bagian terbesar dalam distribusi bagi hasil.

Sedangkan untuk bagian bagi hasil lainnya yang menikmati porsi paling besar adalah pemerintah kabupaten/kota, baik pemerintah kabupaten/kota penghasil (yang bersangkutan) dan kabupaten/kota lainnya yang berada dalam satu provinsi penghasil (yang bersangkutan).

## 2.6. Dampak Kebijakan Publik Terhadap Penerimaan Pajak

Ada begitu banyak definisi kebijakan publik yang diajukan oleh para ahli. Salah satu definisi yang paling luas cakupannya antara lain adalah; *“whatever government choose to do or not to do”*. Sedangkan definisi yang lebih spesifik antara lain adalah, *“ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern,”*.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Definisi-definisi di atas, adalah pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip Young dan Quinn (2002). Ulasan lebih detail tentang definisi-definisi tersebut di atas, dapat dilihat lebih lanjut dalam Suharto, 2005 halaman 44-57.

Sedangkan Mustopadidjaya (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

*“Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan”* (Mustopadidjaya, 2002, halaman 5)

Sekalipun banyak definisi kebijakan publik, namun memiliki satu kesamaan yaitu bahwa kebijakan publik adalah langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki keadaan berdasarkan sudut pandang yang normatif atau yang seharusnya.

### **2.6.1. Kebijakan Ekonomi Sebagai Kebijakan Publik**

Mustopadidjaya (2005) dengan mengutip Chenery (1958) mengklafisikasikan ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ekonomi dibutuhkan karena salah satu kelemahan dari mekanisme pasar adalah terjadinya kegagalan pasar (*market failures*), yaitu pasar gagal menjadi alat alokasi yang efisien. Mekanisme pasar juga ternyata sering kali kurang kondusif dalam memperbaiki keadilan. Kebijakan ekonomi dapat dipandang sebagai kebijakan publik karena bertujuan memperbaiki kesejahteraan sosial, dengan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kinerja atau hasil mekanisme pasar.

Intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai langkah seperti; intervensi harga, pembatasan jumlah produksi atau penetapan kuota, pengenaan pajak, pemberian subsidi dan penyaluran kredit. Tujuan utama dari langkah-langkah tersebut adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sisi permintaan dan penawaran agregat.

Kebijakan ekonomi yang paling umum dikenal adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki kesamaan tujuan, yaitu mempertahankan dan/atau memperbaiki kinerja ekonomi makro yang pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial.

(Mankiw, 2000; Blanchard, 2004; Dornbush, 2008). Perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter terletak pada instrumen, sifat dan mekanisme kerja.

Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dan subsidi. Keunggulan kebijakan fiskal adalah jarak antara waktu pengambilan kebijakan fiskal dengan dampak kebijakan tersebut (*outside lag*) relatif singkat. Keterbatasan kebijakan fiskal adalah jarak antara terlihatnya gejala ekonomi seperti inflasi dan resesi dengan pengambilan keputusan (*inside lag*) relatif panjang. Hal ini disebabkan anggaran negara yang harus ditetapkan berkaitan dengan kebijakan fiskal, harus terlebih dahulu disetujui legislatif (parlemen atau DPR).

Instrumen kebijakan moneter terutama adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto dan rasio cadangan wajib minimum. Instrumen-instrumen tersebut diarahkan untuk mengatur jumlah uang beredar, yang mempunyai dampak terhadap suku bunga. Selanjutnya tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat khususnya investasi. Dengan demikian kebijakan moneter awalnya akan mempengaruhi keseimbangan sektor moneter yang nantinya mempengaruhi sektor riil. Mekanisme kerja kebijakan moneter menyebabkan kelemahan sektor moneter adalah memiliki *outside lag* yang relatif lama. Namun keunggulan kebijakan moneter adalah *inside lag* yang relatif pendek. Hal ini disebabkan kebijakan tidak memerlukan persetujuan legislatif.<sup>4</sup>

### **2.6.2. Dampak Kebijakan Publik Terhadap Potensi Penerimaan Pajak**

Dampak kebijakan ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan moneter terhadap potensi penerimaan pajak dapat dilihat dari sudut pandang jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terutama berdampak terhadap permintaan agregat. Kebijakan ekspansif yaitu fiskal dan atau moneter ekspansif akan menstimulir permintaan agregat. Hal ini *ceteris paribus* akan meningkatkan penerimaan pajak karena ekonomi mengalami pertumbuhan. Namun kebijakan ekspansif kurang baik dilakukan bila perekonomian telah

---

<sup>4</sup> Ulasan tentang perbedaan-perbedaan antara kebijakan fiskal, dapat diikuti dalam tema pembahasan perdebatan kebijakan ekonomi, seperti pada Mankiw (1999) dan Blanchard (2005)

mencapai kondisi *full employment*, karena akan menimbulkan masalah inflasi yang semakin tinggi, sedangkan output agregat tidak dapat tumbuh lagi.

Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal dan moneter diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi perekonomian. Misalkan kebijakan perpajakan dan perkreditan diharapkan akan meningkatkan investasi, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas produksi. Pertumbuhan kapasitas produksi dalam jangka panjang memungkinkan perekonomian mengalami pertumbuhan tanpa laju inflasi yang tinggi. Dengan demikian, dalam jangka panjang penerimaan pajak riil dapat terus ditingkatkan.

### **2.6.3. Dampak Kebijakan Publik terhadap Efisiensi Sistem Pajak**

Efisiensi sistem pajak secara sederhana dapat diukur dengan membandingkan biaya pemungutan pajak per unit penerimaan pajak. Bila target penerimaan pajak yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah, maka biaya per unit pemungutan pajak akan menurun sehingga efisiensi sistem pajak dikatakan membaik.

Kebijakan publik dapat meningkatkan efisiensi sistem pajak melalui perbaikan kuantitas dan kualitas SDM serta perbaikan organisasi dan manajemen pajak. Dalam konteks Indonesia, perbaikan-perbaikan sistem pajak yang bersifat menyeluruh dikenal sebagai reformasi pajak. Perbaikan efisiensi sistem pajak juga dapat dilakukan dengan kebijakan desentralisasi.

Kebijakan publik yang diarahkan untuk memperbaiki efisiensi sistem pajak juga dapat dilakukan secara bertahap, namun konsisten dan berkesinambungan.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Disain Penelitian**

Studi ini merupakan studi empiris mengenai kinerja penerimaan pemerintah di Indonesia dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi tentang kinerja pajak pemerintah ini dilakukan pada tingkat nasional (pemerintah pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis deskriptif dan ekonometrika. Kedua analisis tersebut digunakan untuk saling melengkapi.

Seluruh analisis menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

#### **3.2. Metode Analisis**

Seperti telah disampaikan sebelumnya, metode kuantitatif: analisis deskriptif dan ekonometrika.

##### **3.2.1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Analisis deskriptif digunakan saling melengkapi, khususnya dengan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif digunakan dalam analisis perkembangan penerimaan pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Analisis deskriptif lebih ditekankan pada perkembangan variabel-variabel penerimaan pajak, struktur penerimaan pajak dan perbandingan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Analisis deskriptif juga akan mengamati nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai deviasi standar variabel-variabel yang diamati.

### 3.2.2. Ekonometrika

Analisis ekonometrika akan digunakan pada saat melakukan analisis tingkat signifikansi, besar dan arah hubungan antara kinerja penerimaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhinya.

Data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*) dan panel (*panel data*), yaitu kombinasi data *cross section* dan *time series*. Data runtut waktu digunakan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah pusat. Data panel digunakan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

### 3.3. Kerangka Pikir Penelitian

Studi tentang penerimaan pajak umumnya membahas bagaimana perkembangan penerimaan dan faktor-faktor apa penyebabnya. Umumnya variabel-variabel yang dipelajari adalah variabel-variabel ekonomi. Yang membedakan antara satu studi dengan studi yang lain adalah variabel-variabel yang digunakan, wilayah dan atau periode observasi.

Secara teoritis penerimaan pajak ditentukan oleh potensi penerimaan pajak dan tingkat efisiensi pemungutan (sistem pajak). Namun demikian potensi penerimaan pajak secara langsung ditentukan oleh faktor-faktor lain yaitu kebijakan pemerintah (kebijakan publik) dan faktor-faktor yang biasanya dikenal sebagai faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang diluar kemampuan kontrol pemerintah. Efisiensi sistem pajak sangat ditentukan atau dapat diperbaiki terutama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

#### Potensi Penerimaan Pajak

Potensi penerimaan pajak ditentukan oleh besarnya output agregat riil yang diukur dengan melihat nilai output agregat riil (PDB harga konstan atau PDRB harga konstan) atau output riil per kapita. Bila nilai output riil atau output riil per kapita makin tinggi maka *ceteris paribus* potensi pajak makin besar. (Purohit, 2001 dan Tanzi, 1990).

Potensi penerimaan pajak juga dapat diukur dari tingkat modernisasi perekonomian, dimana bila perekonomian makin modern, maka *ceteris paribus* potensi penerimaan pajak makin besar. Modernisasi perekonomian diukur dengan porsi output sektor industri dan jasa dalam output agregat. Bila porsi sektor modern makin besar maka potensi penerimaan pajak makin besar. Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat modernisasi perekonomian adalah porsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Jika porsi penduduk yang tinggal di perkotaan makin besar, maka *ceteris paribus* perekonomian dikatakan makin modern, sehingga potensi penerimaan pajak makin besar. Dalam studi ini ukuran tingkat modernisasi perekonomian adalah porsi output sektor industri dan jasa dalam total output agregat (Purohit,2001).

### **Kebijakan Publik**

Dalam studi ini, kebijakan publik yang dibahas adalah kebijakan publik yang berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak dan atau peningkatan efisiensi sistem pajak.

Kebijakan publik yang secara teoritis berpengaruh besar terhadap potensi penerimaan pajak adalah kebijakan harga energi, yang dalam konteks Indonesia adalah Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga BBM. Kenaikan TDL dan harga BBM secara teoritis, *ceteris paribus*, menyebabkan pasokan agregat mengalami kontraksi (*adverse supply shock*). Hal ini *ceteris paribus* akan menurunkan potensi penerimaan pajak karena perekonomian mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yang disertai inflasi.

Kebijakan publik yang ditujukan terutama untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi pajak juga akan mempengaruhi kinerja pajak. Dalam konteks Indonesia, dua kebijakan publik yang dipandang berpengaruh terhadap penerimaan pajak riil adalah reformasi pajak dan pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia, telah dilakukan beberapa kali reformasi pajak, terutama adalah reformasi pajak tahun 1984 dan reformasi pajak tahun 2000. Pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, berlandaskan UU No.23/1999. Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif diharapkan meningkatkan potensi penerimaan pajak, melalui

perbaikan pengelolaan perekonomian. Otonomi daerah juga diharapkan memperbaiki efisiensi sistem pajak, khususnya pada tingkat pemerintah daerah.

### **Faktor-Faktor Lainnya**

Yang tercakup dalam faktor-faktor lainnya adalah faktor-faktor yang sulit secara tepat dikelompokkan dalam potensi penerimaan pajak ataupun kebijakan publik, yaitu penerimaan pajak tahun sebelumnya, nilai tukar nominal rupiah dan krisis ekonomi Indonesia 1997-1999.

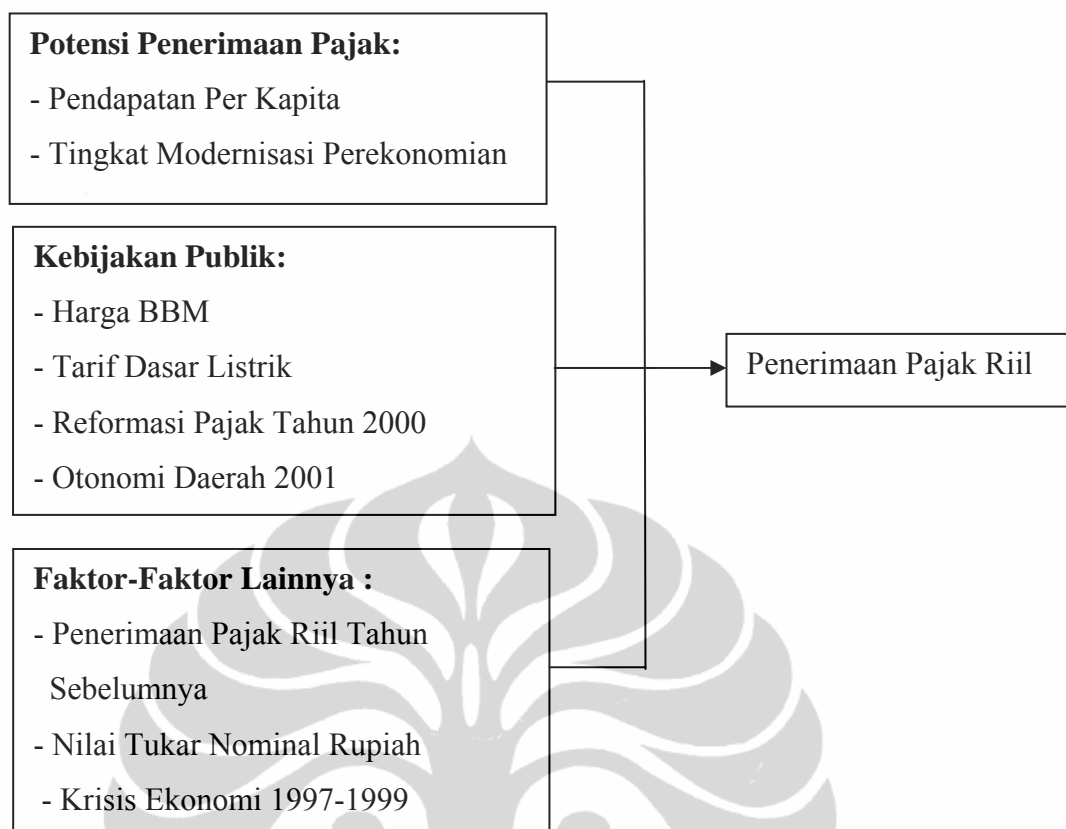
Secara teoritis, besar kemungkinan bahwa penerimaan pajak pada satu tahun tertentu dipengaruhi oleh penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hubungan tersebut berkaitan dengan dimensi teknologi, kelembagaan dan psikologis.

Nilai tukar nominal secara teoritis dapat memberikan gambaran tentang perkembangan eksternal, terutama bila perekonomian menganut sistem kurs mengambang (*flexible exchange rate*). Namun di Indonesia, selama periode pengamatan 1971-2006 telah terjadi beberapa kali perubahan sistem nilai tukar. Misalnya, sampai periode 1970an Indonesia menganut sistem kurs tetap, sedangkan sejak akhir 1997 Indonesia menganut sistem kurs mengambang.

Faktor eksternal juga dapat dicerminkan pada kondisi krisis ekonomi Indonesia 1997-1999. Dampak krisis ekonomi 1997-1999 yang kontraktif menyebabkan secara teoritis penerimaan pajak pada periode tersebut menurun.

Hubungan antara variabel terikat (penerimaan pajak) dengan variabel-variabel penjelas seperti yang diuraikan sebelumnya dapat disederhanakan dalam bentuk diagram di bawah ini.





Studi ini menggunakan tiga model regresi. Variabel terikat pada setiap model regresi adalah sama yaitu penerimaan pajak riil. Sedangkan variabel bebas yang digunakan pada tiga model adalah disesuaikan dengan kebutuhan atau relevansi analisis regresi.

Dasar pertimbangan penggunaan variabel bebas pada setiap model adalah apakah variabel-variabel tersebut dianggap berpengaruh terhadap penerimaan pajak riil pada tingkat pemerintah yang diamati.

Pada analisis tingkat pemerintah pusat, variabel peranan sektor industri dan jasa dalam perekonomian (PORMO) tidak dimasukkan dalam model regresi. Dasar pertimbangannya adalah karena dominannya peranan perekonomian DKI Jakarta dalam sektor modern perekonomian Indonesia. Selama periode pengamatan, PDRB DKI Jakarta menyumbang sekitar 17% PDB Indonesia. Sekitar 99,5% output perekonomian DKI Jakarta berasal dari sektor modern, sedangkan sumbangan sektor modern dalam perekonomian nasional sekitar 70% PDB. Dengan demikian peranan sektor modern DKI Jakarta adalah sekitar 22% output sektor modern nasional. Selain itu kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, yaitu

kebijakan fiskal (seperti subsidi dan *tax holiday*) maupun kebijakan moneter terutama perkreditan, pada akhirnya mempengaruhi peningkatan pendapatan per kapita.

Pada tingkat provinsi, provinsi-provinsi yang tidak dimasukkan dalam analisis adalah provinsi-provinsi pemekaran, Nangroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Tidak dimasukkannya provinsi-provinsi tersebut didasarkan pertimbangan menjaga homogenitas data.

Pada analisis tingkat kabupaten/kota variabel-variabel dummy: krisis ekonomi 1997-1999, otonomi daerah, dan reformasi pajak tahun 2000 tidak relevan digunakan dalam analisis, karena periode pengamatannya tahun 2000-2007. Tetapi kenaikan tarif dasar listrik relevan digunakan, sebab data menunjukkan bahwa lebih dari 80% penerimaan pajak riil kabupaten/kota bersumber pada pajak penerangan jalan.

Tabel 3.1 merupakan ringkasan yang menunjukkan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam setiap model regresi.

Tabel 3.1

Variabel-Variabel Bebas yang Diduga Mempengaruhi Penerimaan Pajak Riil pada Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
LTAXR-1	v	v	v
LYRC	v	v	v
LPRATA	v	v	v
LKURS	v	v	v
OTO	v	v	x
R2000	v	v	x
LPORMO	x	v	v
TDLJATIM	x	x	v
KRISIS	v	v	x

Catatan: v = variabel bebas digunakan dalam model;  
x = variabel bebas tidak digunakan dalam model.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu dan panel. Sumber data untuk penelitian ini terutama adalah; Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Bank Indonesia. Tabel 3.2 di bawah ini memberikan gambaran tentang data yang dibutuhkan, jenis dan sumber data.

Tabel 3.2  
Data yang Dibutuhkan, Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber Data
Indikator makro; output agregat (PDB dan PDRB berdasarkan produksi dan pengeluaran), Indeks Harga Umum yaitu Indeks Harga Implisit (deflator PDRB), data-data lain yang mendukung seperti harga listrik, harga BBM	Sekunder	BPS dan Bank Indonesia Lain-lain
Keuangan Pemerintah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD provinsi); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota)	Sekunder	BI , Kementerian Keuangan dan BPS untuk data APBN dan APBD
Pembagian Wilayah Administratif	Sekunder	BPS
Jumlah Penduduk atau indikator kependudukan dan ketenagakerjaan	Sekunder	BPS

### 3.5. Model-Model yang akan Diestimasi

Seluruh model regresi berbentuk logaritma berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, transformasi dalam bentuk logaritma akan memperkecil deviasi standar, sehingga diharapkan hasil regresi menjadi lebih baik. Kedua, koefisien regresi memberikan gambaran tentang elastisitas atau sensitivitas variabel terikat terhadap variabel bebas. Berapa persen variabel terikat akan berubah bila satu

variabel bebas yang mempengaruhi berubah 1% *ceteris paribus* (Studenmund, 2006). Hal ini memungkinkan identifikasi variabel-variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat.

### 3.5.1. Model 1 : Penerimaan Pajak Riil Pemerintah Pusat

Jika dinyatakan dalam persamaan matematika, maka hubungan antara penerimaan pajak riil pusat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti diringkas dalam Tabel 3.1 di atas, dinyatakan sebagai berikut,

$$\text{TAXR} = f(\text{TAXR}_{-1}, \text{YRC}, \text{PRATA}, \text{KURS}) \dots \dots \dots (3.1)$$

Bila dinyatakan dalam bentuk persamaan yang lebih eksplisit,

$$\text{TAXR} = A_0 \text{TAXR}_{-1}^{\alpha_1} \text{LYRC}^{\alpha_2} \text{LPRATA}^{\alpha_3} \text{LKURS}^{\alpha_4} e^{\varepsilon} \dots \dots \dots (3.2)$$

Persamaan (3.2) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penerimaan pajak riil dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah non linier. Bila ditransformasi dalam bentuk persamaan logaritma ganda (*double-log functions*), dapat dinyatakan sebagai berikut,

$$\text{LTAXR}_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LTAXR}_{t-1} + \alpha_2 \text{LYRC}_t + \alpha_3 \text{LPRATA}_t + \alpha_4 \text{LKURS}_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana:

$\text{LTAXR}_t$  = Logaritma penerimaan pajak riil pemerintah pusat pada periode (tahun) t, yaitu penerimaan pajak nominal pada periode t dibagi deflator PDB pada periode t.

$\text{LTAXR}_{t-1}$  = Logaritma penerimaan pajak riil satu tahun sebelumnya

$\text{LYRC}_t$  = Logaritma PDB harga konstan 2000 per kapita Indonesia pada tahun t

$\text{LPRATA}_t$  = Logaritma harga rata-rata BBM utama yaitu harga rata-rata solar dan bensin pada tahun t

$\text{LKURS}_t$  = Logaritma nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (Rp/US\$) pada tahun t

$\alpha_0$	=	Konstanta, yaitu logaritma $A_0$
$\alpha_i$	=	Koefisien regresi variabel bebas ke $i$
$\varepsilon_t$	=	Gangguan ( <i>error</i> )

### Variabel Dummy (*Dummy Variables*)

Dalam analisis model pertama, ada tiga variabel yang menggambarkan perubahan-perubahan kualitatif dan diperkirakan mempengaruhi penerimaan pajak riil pemerintah pusat, yaitu krisis ekonomi 1997-1999, reformasi pajak tahun 2000 dan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif sejak tahun 2001. Untuk itulah ketiga variabel tersebut diperlakukan sebagai variabel dummy (*dummy variables*).

Secara teoritis variabel dummy digunakan untuk mengamati pengaruh perubahan-perubahan yang sifatnya tidak dapat dikuantifisir, misalnya pengaruh perbedaan musim, jenis kelamin, atau peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap variabel terikat yang sedang diamati. Sumodiningrat (2010) menyatakan bahwa variabel dummy biasanya digunakan dalam penelitian ekonometri untuk mewakili faktor-faktor kualitatif, seperti: jenis profesi/pekerjaan, agama, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya. Variabel kualitatif tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa ditandai sifatnya antara ada dan tidak ada

Variabel dummy yang digunakan dalam studi ini adalah variabel dummy intercept (*intercept dummy*), yaitu variabel dummy yang diasumsikan tidak merubah slope kurva regresi, melainkan hanya titik potong dengan sumbu vertikal saja. Nilai variabel dummy yang digunakan adalah 0 dan 1. Nilai 1 diberikan kepada observasi ke  $i$  yang memenuhi persyaratan kriteria dummy. Sedangkan nilai 0 diberikan kepada observasi ke  $i$  yang tidak memenuhi persyaratan kriteria dummy. Karena variabel terikat dinyatakan dalam nilai logaritma maka tafsiran koefisien regresi variabel dummy adalah pada pada saat kondisi dummy terjadi, maka variabel terikat berubah dalam satuan persen. Besar persentasinya adalah sebesar koefisien regresi (Studenmund, 2006).

Misalkan digambarkan dalam persamaan sederhana antara dua variabel, yaitu pajak riil sebagai variabel terikat (TAXR) dan otonomi daerah sebagai variabel bebas OTO yang merupakan variabel dummy:

$$\text{TAXR} = \pi_0 + \pi_3 \text{OTO} + \varepsilon_t \quad \dots\dots\dots(3.4)$$

dimana: TAXR = penerimaan pajak riil

OTO = variabel dummy otonomi daerah

Tahun dimana UU otonomi daerah diberlakukan, OTO diberi nilai satu, dan tahun penelitian dimana UU otonomi daerah belum diberlakukan, diberi nilai nol. Dengan demikian, model tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:

$$\text{TAXR} = \pi_0 + \pi_3 \text{OTO} + \varepsilon_t$$

OTO = 1, jika UU otonomi daerah diberlakukan (tahun 2000 selanjutnya)

OTO = 0, jika UU otonomi daerah belum diberlakukan (sebelum tahun 2000)

Dengan asumsi variabel gangguan ( $\varepsilon_t$ ) memenuhi semua asumsi dasar OLS, maka dari penaksiran (3.1), diperoleh:

Jika OTO = 0, maka  $E[\text{TAXR}] = \pi_0$

Jika OTO = 1, maka  $E[\text{TAXR}] = \pi_0 + \pi_3$

Secara lengkap dengan memasukkan variabel-variabel dummy, maka model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.

$$\text{LTAXR}_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LTAXR}_{t-1} + \alpha_2 \text{LYRC}_t + \alpha_3 \text{LPRATA}_t + \alpha_4 \text{LKURSt} \\ + \alpha_5 \text{KRISIS} + \alpha_6 \text{OTO} + \alpha_7 \text{R2000} + \varepsilon_t \quad \dots\dots\dots(3.5)$$

dimana:

$\text{LTAXR}_t$  = Logaritma penerimaan pajak riil pemerintah pusat pada tahun t, yaitu penerimaan pajak nominal pada tahun t dibagi deflator PDB pada tahun t.

$\text{LTAXR}_{t-1}$  = Logaritma penerimaan pajak riil satu tahun sebelumnya

$\text{LYRC}_t$  = Logaritma PDB harga konstan 2000 per kapita Indonesia pada tahun t

OTO = Dummy pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Periode sebelum tahun 2001 adalah nol, sedangkan tahun 2001 dan seterusnya adalah satu

R2000	=	Dummy pelaksanaan reformasi pajak pada tahun 2000. Nilai pada periode sebelum tahun 2000 adalah nol, sedangkan periode tahun 2000 dan seterusnya adalah satu
KRISIS	=	Dummy krisis ekonomi 1997-1999, dimana nilai pada tahun 1997-1999 sama dengan satu. Sedangkan nilai tahun 1996 dan sebelumnya, serta tahun 2000 dan sesudahnya adalah sama dengan nol
LPRATA <sub>t</sub>	=	Logaritma harga rata-rata BBM utama yaitu harga rata-rata solar dan bensin pada tahun t
LKURS <sub>t</sub>	=	Logaritma nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (Rp/US\$) pada tahun t
$\alpha_0$	=	Koefisien regresi yang menunjukkan besar logaritma konstanta
$\alpha_i$	=	Koefisien regresi variabel bebas ke i
$\varepsilon_t$	=	Gangguan ( <i>error</i> )

### 3.5.1.1. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel-variabel yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan pada Model 1

Variabel	Cara Pengukuran/ Penghitungan	Data yang Dibutuhkan
Nilai riil penerimaan pajak	Nilai penerimaan pajak nominal pemerintah pusat dibagi dengan deflator PDB	- Nilai penerimaan pajak berdasarkan laporan APBN - PDB harga berlaku dan PDB harga konstan 2000
Output riil per kapita	PDB Harga konstan 2000 dibagi jumlah penduduk atau jumlah penduduk	- PDB harga berlaku dan PDB harga konstan 2000 - Jumlah penduduk

(Sambungan tabel 3.3)

Reformasi Pajak Tahun 2000	Variabel dummy	Diberlakukan sebagai variabel dummy karena sifatnya kualitatif. Nilai = 0 adalah untuk periode sebelum tahun 2000 dan nilai = 1 untuk tahun 2000 dan sesudahnya
Krisis Ekonomi	Variabel dummy	Berdasarkan pengamatan tren pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator pokok, periode krisis terjadi antara tahun 1997-1999. Nilai= 1 untuk periode 1997-1999 dan nilai= 0 untuk tahun-tahun selain 1997-1999
Otonomi	Variabel dummy	Otonomi daerah dianggap dimulai tahun 2001. Hal ini berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah, selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU tersebut diberlakukan. Dengan demikian untuk tahun 2000 dan sebelumnya nilai variabel adalah nol, sedangkan untuk tahun 2001 dan sesudahnya nilai variabel adalah satu.
Nilai Tukar Nominal rupiah terhadap US\$	Rp/US\$	Berdasarkan cara penulisan kurs nominal maka bila nilainya membesar, nilai tukar rupiah melemah. Begitu juga sebaliknya

### 3.5.1.2. Hasil yang Diharapkan

Berdasarkan telaah teoritis, maka pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (kinerja pajak), adalah seperti pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4  
Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 1

Variabel	Hasil yang Diharapkan (Prediksi Teoritis)
Penerimaan pajak riil satu tahun sebelumnya	Positif, jika penerimaan pajak riil pemerintah pusat pada tahun $t$ tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah pusat setahun kemudian akan meningkat.
Pendapatan riil perkapita	Positif, jika variabel ini tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah pusat meningkat
Otonomi Daerah	Negatif, pada saat pelaksanaan otonomi daerah penerimaan pajak riil pemerintah pusat berkurang
Reformasi Pajak tahun 2000	Positif, pada era pelaksanaan reformasi pajak tahun 2000 dan selanjutnya penerimaan pajak riil pemerintah pusat meningkat
Krisis ekonomi 1997-1999	Negatif, pada saat krisis ekonomi 1997-1999 penerimaan pajak riil pemerintah pusat menurun
Harga rata-rata BBM	Negatif, jika harga rata-rata BBM naik, penerimaan pajak riil pemerintah pusat menurun
Nilai tukar nominal rupiah terhadap US\$	Positif, jika nilai rupiah melemah maka penerimaan pajak riil pemerintah pusat meningkat

### 3.5.2. Model 2: Kinerja Pajak Pemerintah Provinsi Periode 1994-2006

Tujuan estimasi model 2 adalah mengetahui tingkat signifikansi, besar dan arah hubungan antara kinerja pajak pemerintah pusat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk model 2 data yang digunakan adalah data tahun 1994-2006. Karena keterbatasan data termasuk masalah konsistensinya, maka variabel-variabel yang digunakan relatif terbatas dibanding dengan model 1.

#### 3.5.2.1. Model Regresi

Jika dinyatakan dalam persamaan matematika, maka hubungan antara penerimaan pajak riil pusat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti diringkas dalam Tabel 3.1 di atas, dinyatakan sebagai berikut,

$$\text{TAXR} = f(\text{TAXR}_{-1}, \text{YRC}, \text{PRATA}, \text{KURS}, \text{PORMO}) \dots \dots \dots (3.6)$$

Bila dinyatakan dalam bentuk persamaan yang lebih eksplisit,

$$\text{TAXR} = B_0 \text{TAXR}_{-1}^{\beta_1} \text{YRC}^{\beta_2} \text{PRATA}^{\beta_3} \text{KURS}^{\beta_4} \text{PORMO}^{\beta_5} e^{\varepsilon} \dots \dots \dots (3.7)$$

Persamaan (3.7) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penerimaan pajak riil dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah non linier. Bila ditransformasi dalam bentuk persamaan logaritma ganda (*double-log functions*), dapat dinyatakan sebagai berikut,

$$\text{LTAXR}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LTAXR}_{it-1} + \beta_2 \text{LYRC}_{it} + \beta_3 \text{LPRATA}_t + \beta_4 \text{LKURS}_t + \beta_5 \text{LPORMO}_{it} + \varepsilon \dots \dots \dots (3.8)$$

dimana:

$\text{LTAXR}_{it}$  = Logaritma penerimaan pajak riil pemerintah provinsi i pada tahun t, yaitu penerimaan pajak nominal pada tahun t dibagi deflator PDRB pada tahun t

$\text{LTAXR}_{it-1}$  = Logaritma penerimaan pajak riil provinsi i satu tahun sebelumnya

$\text{LYRC}_t$  = Logaritma PDB harga konstan 2000 per kapita, provinsi i pada tahun t

$\text{LPRATA}_t$  = Logaritma harga rata-rata BBM utama yaitu harga rata-rata solar dan bensin pada tahun t

$\text{LKURS}_t$  = Logaritma nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (Rp/US\$) pada tahun t

$\text{LPORMO}_{it}$  = Logaritma peranan (porsi) sektor modern dalam perekonomian provinsi i pada tahun t. Yang dimaksud dengan sektor modern adalah sektor sekunder dan tersier

$\beta_0$  = Konstanta, yaitu logaritma  $B_0$

$\beta_i$  = Koefisien regresi variabel bebas ke i

$\varepsilon_{it}$  = Gangguan (*error*)

### Variabel Dummy (*Dummy Variables*)

Dalam analisis model kedua, ada tiga variabel yang menggambarkan perubahan-perubahan kualitatif dan diperkirakan mempengaruhi penerimaan pajak riil pemerintah pusat, yaitu krisis ekonomi 1997-1999, reformasi pajak tahun 2000 dan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif sejak tahun 2001. Untuk itulah ketiga variabel tersebut diperlakukan sebagai variabel dummy (*dummy variables*).

Sama seperti pada model pertama, variabel dummy yang digunakan dalam model kedua adalah variabel dummy intercept (*intercept dummy*). Secara lengkap dengan memasukkan variabel-variabel dummy, maka model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.

$$LTAXR_{it} = \beta_0 + \beta_1 LTAXR_{it-1} + \beta_2 LYRC_{it} + \beta_3 LPRATA_t + \beta_4 LKURS_t + \beta_5 LPORMO_{it} + \beta_6 KRISIS + \beta_7 OTO + \beta_8 R2000 + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.9)$$

dimana :

$LTAXR_{it}$  = Logaritma penerimaan pajak riil pemerintah provinsi i pada tahun t, yaitu penerimaan pajak nominal pada periode t dibagi deflator PDRB pada tahun t

$LTAXR_{it-1}$  = Logaritma penerimaan pajak riil provinsi i satu tahun sebelumnya

$LYRC_{it}$  = Logaritma PDRB harga konstan 2000 per kapita provinsi i pada tahun t

$LPORMO_{it}$  = Logaritma peranan (porsi) sektor modern dalam perekonomian provinsi i pada tahun t. Yang dimaksud dengan sektor modern adalah sektor sekunder dan tersier

$OTO$  = Dummy pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Periode sebelum tahun 2001 adalah nol, sedangkan periode tahun 2001 dan seterusnya adalah satu

$R2000$  = Dummy pelaksanaan reformasi pajak pada tahun 2000. Nilai pada periode sebelum tahun 2000 adalah nol, sedangkan periode tahun 2000 dan seterusnya adalah satu

KRISIS	=	Dummy krisis ekonomi 1997-1999, dimana nilai pada tahun 1997-1999 sama dengan satu. Sedangkan nilai tahun 1996 dan sebelumnya, serta tahun 2000 dan sesudahnya sama dengan nol
LPRATA <sub>t</sub>	=	Logaritma harga rata-rata BBM utama yaitu harga rata-rata solar dan bensin pada tahun t
LKURS <sub>t</sub>	=	Logaritma nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada tahun t (Rp/US\$)
$\beta_{it}$	=	Koefisien regresi
$\epsilon_{it}$	=	Gangguan ( <i>error</i> )

### 3.5.2.2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel-variabel yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan pada Model 2

Variabel	Cara Pengukuran/Penghitungan	Data yang Dibutuhkan
Nilai riil penerimaan pajak	Nilai penerimaan pajak nominal pemerintah provinsi i pada periode t dibagi dengan deflator PDRB provinsi i pada periode t	- Nilai penerimaan pajak berdasarkan laporan APBD - PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan 2000
Output riil per kapita	PDRB Harga konstan 2000 provinsi i pada periode t dibagi jumlah penduduk provinsi i pada periode t	- PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan 2000 - Jumlah penduduk

(Sambungan tabel 3.5)

Porsi Sektor Modern	Jumlah nilai PDRB harga konstan sektor sekunder dan tersier provinsi i pada periode t dibagi total nilai PDRB harga konstan tahun 2000 provinsi i pada periode t	PDRB harga konstan tahun 2000 berdasarkan sektor produksi
Reformasi Pajak Tahun 2000	Variabel dummy	Diberlakukan sebagai variabel dummy karena sifatnya kualitatif. Nilai = 0 adalah untuk periode sebelum tahun 2000 dan nilai = 1 untuk tahun 2000 dan sesudahnya
Krisis Ekonomi	Variabel dummy	Berdasarkan pengamatan tren pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator pokok, periode krisis terjadi antara tahun 1997-1999. Nilai= 1 untuk periode 1997-1999 dan nilai= 0 untuk tahun-tahun selain 1997-1999
Otonomi	Variabel dummy	Otonomi daerah dianggap dimulai tahun 2001. hal ini berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah, selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU tersebut diberlakukan. Dengan demikian untuk tahun 2000 dan sebelumnya nilai variabel adalah nol, sedangkan untuk tahun 2001 dan sesudahnya nilai variabel adalah satu.
Nilai Tukar Nominal (Kurs)	Rp/US\$	Berdasarkan cara penulisan kurs nominal maka bila nilainya membesar, nilai tukar rupiah melemah. Begitu juga sebaliknya

### 3.5.2.3. Hasil yang Diharapkan

Berdasarkan telah teoritis, maka pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (kinerja pajak), adalah seperti pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 2

Variabel	Hasil yang Diharapkan (Prediksi Teoritis)
Penerimaan pajak riil setahun sebelumnya	Positif, jika penerimaan pajak riil pemerintah provinsi pada tahun t tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah provinsi setahun kemudian akan meningkat.
Pendapatan riil per kapita	Positif, jika pendapatan perkapita provinsi tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan per kapita akan memperluas dan memperbesar basis pajak.
Otonomi Daerah	Positif, pada saat pelaksanaan otonomi daerah penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat. Hal ini disebabkan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah provinsi untuk memungut pajak daerah.
Reformasi pajak tahun 2000	Positif, pada era pelaksanaan reformasi pajak tahun 2000 secara teoritis seharusnya efisiensi dan efektivitas sistem pajak membaik, sehingga penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat. Pada tingkat provinsi reformasi pajak tahun 2000 dapat juga dikaitkan dengan diberlakukannya UU No.34/2000 tentang pajak dan redistribusi daerah. Pasal 2 ayat 1, UU tersebut memperluas cakupan penerimaan pajak daerah tingkat provinsi dengan menambah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang pada periode sebelumnya dimasukkan sebagai redistribusi daerah. Hal ini secara teoritis akan meningkatkan penerimaan pajak, karena menambah basis pajak provinsi.

(Sambungan tabel 3.6)

Krisis Ekonomi 1997-1999	Negatif, pada saat krisis ekonomi 1997-1999 penerimaan pajak riil pemerintah provinsi menurun karena menurunnya aktivitas perekonomian.
Harga rata-rata BBM	positif, jika harga rata-rata BBM naik, penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat. Hal ini disebabkan pajak-pajak yang berkaitan dengan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu PKB, Pajak Bea Balik Nama dan Pajak BBM berdasarkan UU No.34/2000 dipungut pemerintah provinsi. Data juga menunjukkan bahwa lebih dari 90% penerimaan pajak provinsi, berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor (PPKB) dan Pajak Bahan Bakar Minyak (PBBM).
Porsi Sektor Modern	Positif, pada saat porsi sektor modern semakin besar, permintaan kendaraan bermotor, pemakaian BBM dan penggunaan air untuk sektor industri dan jasa seperti hotel dan restoran semakin besar. Dengan demikian pada saat porsi sektor modern provinsi makin besar, maka potensi pajak provinsi makin besar.
Nilai tukar nominal rupiah terhadap US\$	Positif, jika nilai rupiah melemah maka penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat, karena membaiknya ekspor neto akan menstimulir kegiatan perekonomian kabupaten/kota.

### 3.5.3. Model 3: Kinerja Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2000 - 2007

Jika dinyatakan dalam persamaan matematika, maka hubungan antara penerimaan pajak riil pusat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti diringkas dalam Tabel 3.1 di atas, dinyatakan sebagai berikut,

$$\text{TAXR} = f(\text{YRC}, \text{TAXR}_{-1}, \text{PRATA}, \text{KURS}, \text{PMO}) \dots \dots \dots (3.10)$$

Bila dinyatakan dalam bentuk persamaan yang lebih eksplisit,

$$TAXR = C_0 TAXR_{-1}^{\gamma_1} YRC^{\gamma_2} PRATA^{\gamma_3} KURS^{\gamma_4} PMO^{\gamma_5} e^{\varepsilon} \dots\dots\dots(3.11)$$

Persamaan (3.11) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penerimaan pajak riil dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah non linier. Bila ditransformasi dalam bentuk persamaan logaritma ganda (*double-log functions*), dapat dinyatakan sebagai berikut,

$$LTAXR_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 LTAXR_{-it-1} + \gamma_2 LYRC_{it} + \gamma_3 LPRATA_t + \gamma_4 LKURS_t + \gamma_5 LPMO_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.12)$$

dimana:

$LTAXR_{it}$  = Logaritma penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota i pada tahun t, yaitu penerimaan pajak nominal pada tahun t dibagi deflator PDRB pada tahun t.

$LTAXR_{it-1}$  = Logaritma penerimaan pajak riil kabupaten/kota i satu tahun sebelumnya

$LYRC_{it}$  = Logaritma PDRB harga konstan 2000 per kapita kabupaten/kota i pada tahun t

$LPRATA_t$  = Logaritma harga rata-rata BBM utama yaitu harga rata-rata solar dan bensin pada tahun t

$LKURS_t$  = Logaritma nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (Rp/US\$) pada tahun t

$\gamma_0$  = Konstanta, yaitu logaritma  $C_0$

$\gamma_i$  = Koefisien regresi variabel bebas ke i

$\varepsilon_{it}$  = Gangguan (*error*)

### 3.5.3.1. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel-variabel yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.



Tabel 3.7

Variabel, Cara Pengukuran dan Data yang Dibutuhkan pada Model 3

Variabel	Cara Pengukuran/Penghitungan	Data yang Dibutuhkan
Nilai riil penerimaan pajak	Nilai penerimaan pajak nominal pemerintah kabupaten/kota $i$ pada periode $t$ dibagi dengan deflator PDRB kabupaten/kota $i$ pada periode $t$	- Nilai penerimaan pajak berdasarkan laporan APBD - PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan 2000
Pendapatan per kapita	PDRB Harga konstan 2000 kabupaten/kota $i$ pada periode $t$ dibagi jumlah penduduk kabupaten/kota $i$ pada periode $t$	- PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan 2000 - Jumlah penduduk
Porsi Sektor Modern	Jumlah nilai PDRB harga konstan sektor sekunder dan tersier kabupaten/kota $i$ pada periode $t$ dibagi total nilai PDRB harga konstan kabupaten/kota $i$ tahun 2000 pada periode $t$	PDRB harga konstan tahun 2000 berdasarkan sektor produksi
Tarif Dasar Listrik Provinsi Jatim	Data diperoleh dari publikasi PLN tentang Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia. Data yang digunakan dalam studi ini adalah TDL untuk Provinsi Jawa Timur	Khusus untuk analisis tingkat kabupaten/kota, dimana fakta menunjukkan sekitar 90% penerimaan pajak kabupaten/kota yang diteliti bersumber dari pajak penerangan jalan. Berdasarkan UU Pajak Penerangan jalan dipungut berdasarkan besaran tagihan PLN. Karena itu perubahan TDL akan mempengaruhi besarnya tagihan listrik dan akhirnya pajak penerangan jalan.
Nilai Tukar Nominal (Kurs)	Rp/US\$	Berdasarkan cara penulisan kurs nominal maka bila nilainya membesar, nilai tukar rupiah melemah. Begitu juga sebaliknya

### 3.5.3.2. Hasil yang Diharapkan

Berdasarkan telaah teoritis, maka pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (kinerja pajak), adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8  
Variabel dan Hasil yang Diharapkan pada Model 3

Variabel	Hasil yang Diharapkan (Prediksi Teoritis)
Penerimaan pajak riil setahun sebelumnya	Positif, jika penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota pada tahun $t$ tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota setahun kemudian akan meningkat.
Pendapatan riil per kapita	Positif, jika pendapatan perkapita kabupaten/kota tumbuh (meningkat) maka penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota meningkat. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan per kapita akan memperluas dan memperbesar basis pajak.
Tarif Dasar Listrik Provinsi Jawa Timur	Positif, pada periode tarif dasar listrik dinaikkan penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota meningkat. Hal ini berkaitan dengan UU N0.34/2000 bahwa pajak penerangan jalan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan besarnya tagihan listrik PPN. Data juga menunjukkan bahwa 90% penerimaan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur berasal dari pajak penerangan jalan.
Harga rata-rata BBM	Negatif, jika harga rata-rata BBM naik, penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota menurun. Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya produksi di sektor industri dan jasa. Sementara itu pajak yang berkaitan dengan kepemilikan/penggunaan kendaraan bermotor, tidak dipungut di kabupaten/kota.
Nilai tukar nominal rupiah $t$ terhadap US\$	Positif, jika nilai rupiah melemah maka penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota meningkat karena ekspor neto meningkat yang akan menstimulir kegiatan perekonomian.
Porsi Sektor Modern	Positif, jika peranan sektor modern meningkat maka penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota meningkat. Berdasarkan UU No.34/2000 pajak-pajak daerah yang berhubungan dengan perkembangan sektor manufaktur dan jasa, yaitu pajak –pajak; hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

### 3.6. Uji Asumsi-Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi Klasik yang harus dipenuhi oleh satu regresi adalah data terdistribusi normal, tidak ada masalah multikolinieritas, tidak ada masalah heterosekedastisitas, tidak ada masalah otokorelasi.

### 3.6.1. Uji multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti diantara atau semua variabel yang menjelaskan (variabel independen) dari model regresi. Dugaan multikolinearitas biasanya diketahui dari nilai  $R^2$  yang tinggi, tetapi sedikitnya koefisien yang signifikan, *sign* yang salah, dan koefisien korelasi ( $r$ ) yang tinggi antar variabel independennya.

Konsekuensi teoritis dari adanya multikolinieritas adalah multikolinieritas tidak membuat koefisien regresi menjadi bias dan masih tetap BLUE. Multikolinieritas secara esensial merupakan gejala regresi sampel, namun tetap dianggap bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas adalah independen. Konsekuensi praktis dari adanya multikolinieritas adalah: interval keyakinan cenderung membesar; statistik  $t$  satu atau beberapa variabel menjadi tidak signifikan, sekalipun nilai  $R^2$  tinggi; kesalahan baku (*standard error*) sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam data (Manurung et al., 2007).

#### Deteksi Multikolinieritas

Untuk melihat ada tidaknya permasalahan multikolinearitas dalam persamaan hasil regresi, maka dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ) antara variabel bebas yang digunakan. Bila sebagian besar nilai  $r$  tersebut  $< 80\%$  atau ada juga yang berpendapat lebih kecil dari nilai  $R^2$  maka dinilai tidak terdapat multikolinearitas yang mengganggu (Manurung et al., 2007).

Cara lain yang digunakan untuk deteksi multikolinieritas adalah melihat angka *variance inflation factor* (VIF). Menurut Studenmund (2006), *Estimated coefficient. A high VIF indicates that multicollinearity has increased the estimated variance of the estimated coefficient by quite a bit, yielding decreased t score.*” (hal.258)

Manurung et al. (2007), menyatakan:

”VIF menunjukkan bagaimana Kecepatan varians dan kovarians karena adanya multikolinearitas”

Tahapan pengujian nilai VIF yang digunakan dalam studi ini, mengacu pada Studentmund (2006).

Jika ada sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.14)$$

Untuk mendapatkan angka VIF dapat dilakukan beberapa langkah :

1. Regresi OLS salah satu variabel terikat ( $X_i$ ) terhadap variabel terikat lainnya, misalnya

$$X_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + v_t \dots \dots \dots (3.15)$$

2. Hitung Nilai VIF ( $\alpha_1$ ) hasil estimasi pada persamaan (1) dengan menggunakan formula

$$VIF = 1/(1-R_1^2) \text{ Dimana } R_1^2 \text{ adalah nilai unadjusted } R^2$$

3. Evaluasi Nilai VIF bila lebih besar dari 5, multikolinieritas mulai harus diperhatikan

Namun Studentmund juga menyatakan ada beberapa persoalan dengan evaluasi nilai VIF.

*“Thus, the VIF is a method of detecting multicollinearity that takes into account all the explanatory variables at once. Some authors and statistical software programs replace the VIF with its reciprocal,  $(1-R_i^2)$ , called tolerance, or TOL. Whether we calculate VIF or TOL is a matter of personal preference, but either way, the general approach is the most comprehensive multicollinearity detection technique we’ve discussed in this text. Unfortunately, there are a couple of problems with using VIF’s. First, as mentioned, there is no hard-and-fast VIF decision rule. Second, it’s possible to have multicollinear effects in an equation that has no large VIFs. For instance, if the simple correlation coefficient between  $X_1$  and  $X_2$  is 0,88, multicollinear effects are quite likely, and yet the VIF for the equation (assuming no other  $X$ s) is only 4.4. In essence, then, the VIF is sufficient but not necessary test for multicollinearity, just like the other test describe in this section. Indeed, as is probably obvious to the reader by now, there is no test that*

*allows a researcher to reject the possibility of multicollinearity with any real certainty.*" (Studentmund: 2006, hlm 260)

Dari pernyataan Studentmund, dapat dikatakan bahwa:

1. Belum ada kesepakatan tentang nilai ideal VIF, nilai yang dianggap dapat ditoleransi antara 5-10, bukanlah keharusan.
2. Bahkan nilai VIF yang rendah belum menjamin, tidak ada masalah multikolinieritas, sehingga nilai VIF hanya syarat cukup (*sufficient condition*) bukan syarat perlu (*necessary condition*).

Menurut Manurung et al.(2007) masalah multikolinieritas tidak selalu buruk jika tujuan untuk melakukan prediksi atau peramalan karena koefisien determinasi yang tinggi merupakan ukuran kebaikan dari prediksi atau peramalan. Oleh karenanya bila koefisien determinasi tinggi dan signifikansi koefisien slope tinggi maka model regresi pada umumnya tidak mengalami masalah multikolinieritas. Manurung et al. juga menyatakan bahwa menurut Klien (dikenal sebagai *Klien's rule of thumb*), multikolinieritas mungkin menimbulkan masalah hanya jika koefisien determinasi yang diperoleh dari auxiliary regression lebih besar dari koefisien determinasi secara keseluruhan.

### **Langkah-Langkah Perbaikan Multikolinieritas**

Beberapa langkah perbaikan yang disarankan untuk perbaikan multikolinieritas adalah:

1. Tidak perlu melakukan apapun, karena multikolinieritas tidak membuat hasil regresi menjadi tidak BLUE, walaupun standar error dapat bertambah besar. Bila upaya perbaikan multikolinieritas dilakukan misalnya dengan mengeluarkan salah satu atau beberapa variabel bebas, maka ada timbul masalah salah spesifikasi model
2. Penggunaan informasi ekstra yang diperoleh dari sumber-sumber lain di luar sampel yang digunakan untuk penaksiran. Informasi ekstra ini diperoleh dari teori ekonomi atau beberapa hasil penelitian empiris sejenis yang telah pernah dilakukan.
3. Memperbesar ukuran sampel (jumlah sampel ditambah). Dengan memperbesar ukuran sampel, maka kovarian di antara parameter-parameter dapat dikurangi.

Hal ini disebabkan karena kovarian berhubungan terbalik dengan ukuran sampel.

4. Tidak menggunakan model polinomial
5. Transformasi data dalam bentuk logaritma
6. Menggunakan differensiasi (*time lag*)
7. Menggunakan data panel, kombinasi antara data *cross section* dan *time series*

### 3.6.2. Uji Otokorelasi

Otokorelasi adalah sebuah kasus khusus dari korelasi. Kalau korelasi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel yang berbeda, maka otokorelasi menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Otokorelasi atau korelasi serial diartikan sebagai adanya korelasi gangguan pada satu observasi dengan observasi lain. Otokorelasi ini biasanya terjadi pada regresi yang menggunakan data *time series*. Adanya otokorelasi ini akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Varians residual (*error term*) yang diperoleh lebih rendah dari semestinya sehingga mengakibatkan  $R^2$  menjadi lebih tinggi dari seharusnya.
2. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t dan uji f menjadi tidak sah dan dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan.

### Deteksi Otokorelasi

Deteksi otokorelasi yang dilakukan dalam studi ini adalah uji Durbin Watson (DW). Nilai DW hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai tabel. Dari hasil regresi yang dilakukan, diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebesar 2,11. Uji diatas dilakukan dengan menggunakan *cross section weight*, yaitu untuk mengatasi masalah otokorelasi maka untuk penelitian ini diasumsikan tidak terdapat masalah otokorelasi

$H_0 = \rho = 0$  (Tidak ada otokorelasi)

$H_1 = \rho \neq 0$  (Ada otokorelasi)

otokorelasi Positif		Tidak ada masalah otokorelasi		otokorelasi Negatif
Daerah kritis	Daerah ketidak-pastian ( <i>inconclusive</i> )		Daerah ketidak-pastian ( <i>Inconclusive</i> )	Daerah kritis
Tolak $H_0$		Tidak menolak $H_0$		Tolak $H_0$

d =0                      dl                      du                      4-du                      4-dl                      d

Uji Durbin-Watson digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi ekonometri. Keuntungan dengan menggunakan uji Durbin-Watson ini adalah uji ini didasarkan atas taksiran residu. Oleh karena keuntungan tersebut, maka statistik Durbin-Watson (Statistik DW) ikut serta dilaporkan bersama-sama dengan ringkasan statistik lainnya seperti  $R^2$ ,  $\text{Adj } R^2$ , dan  $\text{ratio-t}$ .

Selain menggunakan metode DW, deteksi otokorelasi juga dapat dilakukan dengan metode *Breusch-Godfrey Test* dan *Geary Test (Run Test)*. Metode Breusch-Godfrey dilakukan dengan mengevaluasi residual test dengan *serial correlation LM Test*. *Geary Test* merupakan uji statistik non parametrik untuk pola residual hasil regresi.

### Koreksi Terhadap Masalah Otokorelasi

Koreksi terhadap masalah otokorelasi yang paling umum dilakukan adalah dengan melakukan diferensiasi (penggunaan *time lag*)

### 3.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas bermakna bahwa varians dari error setiap observasi adalah selalu sama. Heteroskedastisitas adalah pelanggaran terhadap asumsi Homoskedastisitas. Bila asumsi ini dilanggar, maka sekalipun penaksir-penaksir OLS masih tetap tidak bias, tetapi sudah tidak menjadi efisien lagi. Masalah heteroskedastisitas umumnya terjadi bila regresi menggunakan data *cross section*, dimana individu yang diamati cenderung sangat heterogen.

Beberapa asumsi dalam model regresi yang terkait dengan heteroskedastisitas antara lain adalah residual ( $e$ ) memiliki nilai rata-rata nol, keragaman yang konstan, dan residual pada model tidak saling berhubungan,

sehingga estimator bersifat BLUE. Jika asumsi ini dilanggar maka prediksi model yang dibuat tidak dapat diandalkan.

### **Deteksi Heteroskedastisitas**

Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas

#### 1. Uji Park

Uji Park dilakukan dengan meregresi logaritma residual kuadrat dengan variabel-variabel bebas yang digunakan. Bila ada variabel bebas yang signifikan dengan logaritma residual kuadrat, maka ada indikasi heteroskedastisitas.

#### 2. Uji Glejser

Uji Glejser sama dengan uji Park, hanya saja pada uji ini yang dijadikan variabel terikat adalah nilai absolut dari residual. Sedangkan variabel bebasnya adalah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam regresi utama. Bila hasil regresi signifikan berarti ada masalah heteroskedastisitas.

#### 3. Uji Koenker-Basset

Dalam uji ini yang diregresi adalah residual kuadrat dengan variabel bebas. Bila hasil regresinya signifikan, maka adalah masalah heteroskedastisitas.

### **Koreksi Terhadap Masalah Heteroskedastisitas**

Model dalam studi ini menggunakan data panel yang berarti juga menggunakan *cross sectional data* sehingga bisa saja terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Salah satu upaya untuk menangani masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan pembobotan. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, dilakukan regresi dengan *cross section weight*. Menu ini sudah disediakan oleh Eviews.

### **3.7. Nilai $R^2$ , Statistik t, Statistik F**

Setelah syarat-syarat asumsi Klasiknya terpenuhi, maka evaluasi terhadap nilai  $R^2$ , statistik t dan statistik F harus dilakukan untuk mengetahui apakah hasil regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.



### Nilai $R^2$

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk menerangkan berapa persen perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas, *ceteris paribus*. Untuk regresi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) dan data panel, umumnya disepakai bahwa nilai  $R^2$  harus mencapai  $\geq 70\%$ . Hal itu menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan minimal 70% perubahan pada variabel terikat. Sedangkan nilai  $R^2$  regresi yang menggunakan kerat lintang (*cross section*) yang disyaratkan adalah jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan data kerat lintang cenderung umumnya memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi.

### Uji Statistik t

Statistik t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai t-statistik  $>$  t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika nilai t statistik  $<$  t-tabel maka  $H_0$  diterima. Hipotesanya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_0$  = Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan. Sementara variabel bebas lain dianggap konstan.

$H_1$  = Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan. Sementara variabel bebas lain dianggap konstan.

Atau dapat ditulis sebagai berikut:

$H_0 = \beta_1 = 0$

$H_1 = \beta_2 \neq 0$

### Nilai Statistik F

Nilai statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesa dari uji statistik F adalah :

$H_0 =$  Variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1 =$  Variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$$

$H_1$  : tidak semua koefisien secara simultan = 0

Bila nilai statistik F lebih tinggi dari nilai statistik F tabel, maka  $H_0$  ditolak, yang artinya, variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi signifikan variabel terikat.



**BAB 4**  
**GRAFIKAN UMUM**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH**

Uraian dalam bab 4 berikut ini merupakan analisis deskriptif dari penerimaan pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Analisis deskriptif ini merupakan pengantar sekaligus melengkapi analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**4.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat**

Lima indikator penerimaan pajak yang akan di bahas dalam uraian deskriptif tentang penerimaan pajak pemerintah pusat adalah penerimaan pajak nominal, penerimaan pajak riil, rasio pajak dan struktur penerimaan pajak yang diukur dengan porsi penerimaan PPh dalam total penerimaan pajak, serta porsi penerimaan pajak dalam total penerimaan dalam negeri.

Pajak nominal adalah nilai rupiah total pajak yang berhasil dipungut pemerintah. Bila nilai penerimaan pajak nominal yang berhasil dipungut pemerintah meningkat, maka *ceteris paribus* penerimaan pajak pemerintah dikatakan makin naik.

Pajak riil adalah pajak nominal dibagi Indeks Harga Implisit (IHI) yang memberi gambaran tentang daya beli pajak yang berhasil dipungut pemerintah. Jika nilai pajak riil makin besar maka penerimaan pajak dikatakan makin baik.

Rasio pajak adalah persentasi penerimaan pajak nominal terhadap PDB harga berlaku. Secara absolut jika rasio pajak makin besar maka penerimaan pajak pemerintah dikatakan makin baik. Namun adalah lebih tepat, bila rasio pajak sebuah negara atau perekonomian dibandingkan dengan rasio pajak yang dicapai oleh negara atau perekonomian lain. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran prestasi relatif penerimaan pajak.

Perkembangan struktur penerimaan pajak diukur dengan perkembangan peranan atau porsi penerimaan pajak penghasil dalam total penerimaan pajak pemerintah pusat. Dasar pertimbangannya jika ditinjau dari sisi keadilan, pajak

langsung dalam hal ini PPh adalah lebih baik dibanding dengan pajak tidak langsung. Selain itu, karakteristik pajak langsung menyebabkan pemungutan pajak langsung lebih sulit dibanding dengan pajak tidak langsung. Dengan demikian bila porsi penerimaan pajak langsung dalam total penerimaan pajak makin besar, maka secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan potensi pajak dan atau peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak.

Porsi penerimaan pajak dalam total penerimaan dalam negeri pemerintah pusat, dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian fiskal pemerintah pusat. Bila porsi penerimaan pajak dalam total penerimaan dalam negeri pemerintah pusat makin besar, maka tingkat kemandirian fiskal pemerintah pusat dinilai membaik.

Perkembangan lima indikator penerimaan pajak pemerintah pusat tersebut di atas, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1  
Perkembangan Indikator Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat  
Periode 1971-2006

	Penerimaan Pajak Nominal (Rp miliar)	Penerimaan Pajak Riil (Rp miliar)	Rasio Pajak (% PDB Harga Berlaku)	Porsi Penerimaan PPh dalam Penerimaan Pajak (% Penerimaan Pajak)	Porsi Penerimaan Pajak Dalam Penerimaan Dalam Negeri (% PDN)
1971	259,1	186,4	6,8	29,9	62,6
1975	931,9	263,0	7,4	32,4	41,5
1980	2.911,7	334,6	6,4	35,9	29,3
1985	6.329,5	429,5	6,5	36,5	30,2
1990	22.010,9	1.028,4	11,2	37,5	52,2
1995	48.686,3	1.443,9	10,7	43,2	66,7
2000	101.436,8	1.014,4	7,3	37,9	53,1
2001	179.892,0	1.538,9	10,7	39,7	61,0
2002	219.627,5	1.741,1	11,6	38,4	71,0
2003	254.140,2	1.962,2	12,4	37,8	72,0
2004	280.559,0	2.024,3	12,2	42,6	69,6
2005	347.031,0	2.190,1	12,5	50,6	70,3
2006	409.203,0	2.263,6	12,3	51,0	64,3

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai pajak nominal selama periode 1975-2006 meningkat 1.579 kali lipat atau hampir 1600 kali lipat. Kendati nilai nominalnya hampir 1600 kali lipat, namun nilai riil penerimaan pajak selama periode yang sama hanya meningkat sebesar 12 kali lipat. Faktor penyebabnya adalah tingginya laju inflasi dalam periode 1971-2006 yang ditunjukkan dari meningkatnya nilai IHI sebesar 130 kali lipat.

Perkembangan yang terlihat sangat lambat adalah rasio pajak dan porsi penerimaan PPh dalam total penerimaan pajak. Selama periode 1971-2006, kedua indikator penerimaan pajak tersebut hanya meningkat kurang dari dua kali lipat.

Tabel 4.2 di bawah ini memberikan grafikan tentang laju pertumbuhan indikator-indikator penerimaan pajak pemerintah pusat, selama periode 1971-2006

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat Periode 1971-2006  
(% per tahun)

Tahun	Pajak Nominal	IHI (Inflasi)	Pajak Riil	Rasio Pajak	Porsi PPh Dalam Penerimaan Pajak
1971-1980	30,9	22,5	8,4	-0,7	2,0
1980-1990	22,4	10,9	11,5	5,8	0,4
1990-2000	16,5	16,7	-0,2	-4,2	0,1
2000-2006	26,2	10,4	15,8	9,5	5,1
1971-2006	23,3	14,9	8,4	1,8	1,5

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pajak nominal laju pertumbuhannya adalah yang paling tinggi. Selama periode 1971-2006 laju pertumbuhan pajak nominal adalah 23,3%. Sekalipun laju pertumbuhan pajak nominal relatif tinggi, namun laju pertumbuhan pajak riil selama periode 1971-2006 hanya 8,4% per tahun. Penyebabnya adalah laju inflasi yang tinggi selama periode 1971-2006, yaitu sebesar 14,9% per tahun, diukur dengan menggunakan IHI. Sementara itu laju pertumbuhan rasio pajak maupun porsi PPh dalam penerimaan pajak relatif rendah. Selama periode 1971-2006 laju pertumbuhan kedua indikator penerimaan pajak tersebut kurang dari 2% per tahun.

Tabel 4.3 memberikan grafikan tentang statistik deskriptif lima indikator penerimaan pajak pemerintah pusat selama periode 1971-2006

**Universitas Indonesia**

Tabel 4.3  
 Statistik Deskriptif Indikator-Indikator Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat  
 Periode 1971-2006

	PAJAK	PAJAK RIIL	RASIO PAJAK	PORSI PAJAK	RASIO PPH
Rata-Rata (Mean)	65.888,70	908,37	8,90	51,60	39,27
Nilai Tengah (Median)	14.214,35	821,20	8,19	54,61	38,15
Nilai Maksimum	409.203,0	2263,55	12,51	71,99	67,59
Nilai Minimum	259,10	186,39	5,33	26,33	25,96
Standar Deviasi	106.465,5	641,2	2,24	14,14	9,14

Selama periode 1971-2006 rata-rata penerimaan pajak nominal pemerintah pusat adalah Rp.65,9 triliun. Perbedaan antara nilai minimum (tahun 1971) dan nilai maksimum (tahun 2006) yang sangat besar, mengindikasikan tingginya pertumbuhan penerimaan pajak nominal. Namun bila melihat nilai tengah yang jauh lebih rendah dari nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa perkembangan nilai penerimaan pajak nominal baru terjadi pada periode akhir, selama periode 1971-2006.

Selama periode 1971-2006, nilai rata-rata penerimaan pajak riil adalah Rp.908 miliar. Nilai yang jauh lebih kecil dari nilai penerimaan pajak nominal, menunjukkan adanya laju inflasi yang tinggi selama periode yang sama. Selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum penerimaan riil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak riil tidak secepat laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal.

Nilai rata-rata rasio pajak selama periode 1971-2006 adalah 8,9%. Angka tersebut menunjukkan rendahnya penerimaan pajak pemerintah. Bila melihat nilai tengah yang tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa rasio pajak di Indonesia, dalam jangka waktu yang cukup lama selalu lebih rendah dari 10%. Sementara itu bila melihat perbedaan nilai minimum dan maksimum yang hanya sekitar 1,5 kali lipat dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan rasio pajak pemerintah pusat, relatif rendah.

Bila melihat perkembangan porsi penerimaan PPh dalam total penerimaan pajak selama periode 1971-2006 dapat dikatakan telah terjadi perbaikan atau

**Universitas Indonesia**

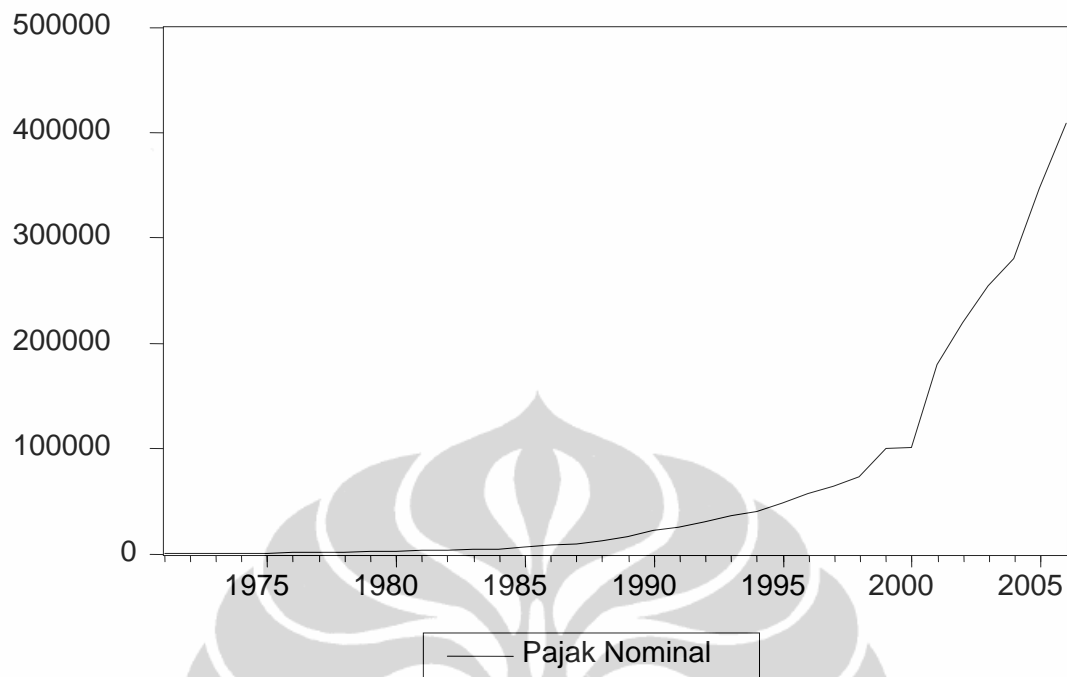
penguatan struktur penerimaan pajak pemerintah pusat. Pada tahun 1971 PPh hanya menyumbang 30% total penerimaan pajak. Pada tahun 2006 PPh telah menjadi sumber penerimaan utama pajak pemerintah pusat.

Indikator yang kelima adalah porsi penerimaan pajak dalam total penerimaan dalam negeri pemerintah pusat. Perkembangan nilai rasionya selama periode 1971-2006 menunjukkan ada perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2006 penerimaan pajak merupakan 75% total penerimaan dalam negeri pemerintah. Angka ini sekitar 50% lebih tinggi dari angka rata-rata dan nilai tengah selama periode 1971-2006. Namun demikian, sekalipun kemandirian fiskal pemerintah pusat menunjukkan perkembangan yang baik, angkanya masih jauh dibawah rata-rata peranan penerimaan pajak di negara-negara maju yang umumnya lebih besar dari 90%.

Uraian selanjutnya di bawah ini akan membahas secara lebih terperinci tentang perkembangan masing-masing indikator penerimaan pajak.

#### **4.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Nominal**

Grafik 4.1 menunjukkan kecenderungan jangka panjang dari penerimaan pajak nominal pemerintah pusat.



Grafik 4.1  
Perkembangan Penerimaan Pajak Nominal Pemerintah Pusat 1971-2006  
(Rp Miliar)

Grafik 4.1 di atas menunjukkan bahwa nilai nominal penerimaan pajak pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi tiga pola umum. Pola pertama adalah penambahan yang lambat, selama periode 1970 sampai dengan pertengahan periode 1980an. Pola peningkatan yang lebih cepat selama periode pertengahan 1980an sampai tahun 2000. Pola ketiga adalah peningkatan yang sangat cepat setelah tahun 2000.

Berdasarkan data laju pertumbuhan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.2, laju pertumbuhan pajak nominal yang tertinggi tercapai selama periode 1971-1980 sebesar 30,9% per tahun. Jika memperhatikan konteks 1971-1980 dimana pemerintah sedang menikmati rejeki minyak, maka laju pertumbuhan pajak nominal yang relatif tinggi tersebut, sepiantas sangat mengejutkan. Sebab selama periode rejeki minyak, dapat dikatakan pemerintah tidak memberikan prioritas pada sumber penerimaan pajak.



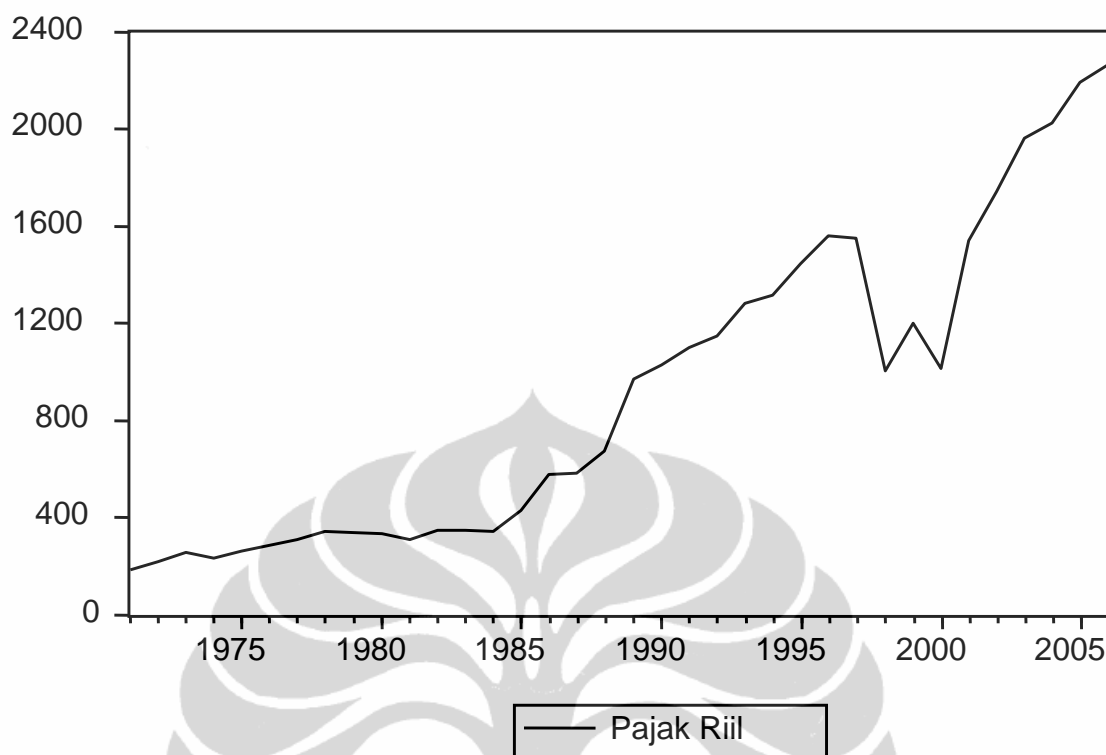
Setidak-tidaknya ada dua penjelasan terhadap gejala di atas. Pertama, adalah nilai nominal penerimaan pajak masih sangat rendah sehingga kenaikan nilai nominal yang tidak terlalu besar dapat menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi. Kedua, kenaikan pajak nominal selama 1971-1980 sebenarnya juga merupakan dampak dari rejeki minyak. Data menunjukkan bahwa penerima pajak yang berasal dari minyak dan gas, khususnya selama periode 1975-1980 relatif dominan.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal terendah terjadi selama periode 1990-2000 sebesar 16,5% per tahun. Rendahnya laju pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari perkembangan kondisi internal dan eksternal. Selama 1990an perekonomian dunia mengalami beberapa kali resesi sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di dalam negeri sendiri, selama periode 1997-1999 perekonomian Indonesia mengalami resesi yang tidak lepas dari Krisis Ekonomi Asia Timur.

Selama periode 2000-2006 laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal mencapai 26,2% per tahun. Laju pertumbuhan tersebut sekitar empat kali lipat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode yang sama. Tingginya laju penerimaan pajak nominal tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

#### **4.1.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Riil**

Laju pertumbuhan penerimaan pajak riil selama periode 1971-2006 adalah 8,4% per tahun. Laju pertumbuhan tertinggi tercapai selama periode 2000-2006 yaitu sebesar 15,8% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi selama periode 1990-2000 yaitu -0,2% per tahun. Laju pertumbuhan pajak riil merupakan selisih antara laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal dengan laju inflasi. Karena itu penerimaan pajak riil dapat saja mengalami penurunan, bila laju inflasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal. Grafik 4.2 di bawah ini menunjukkan bahwa tahun 1998-2000 yaitu pada periode krisis ekonomi penerimaan pajak riil mengalami penurunan.

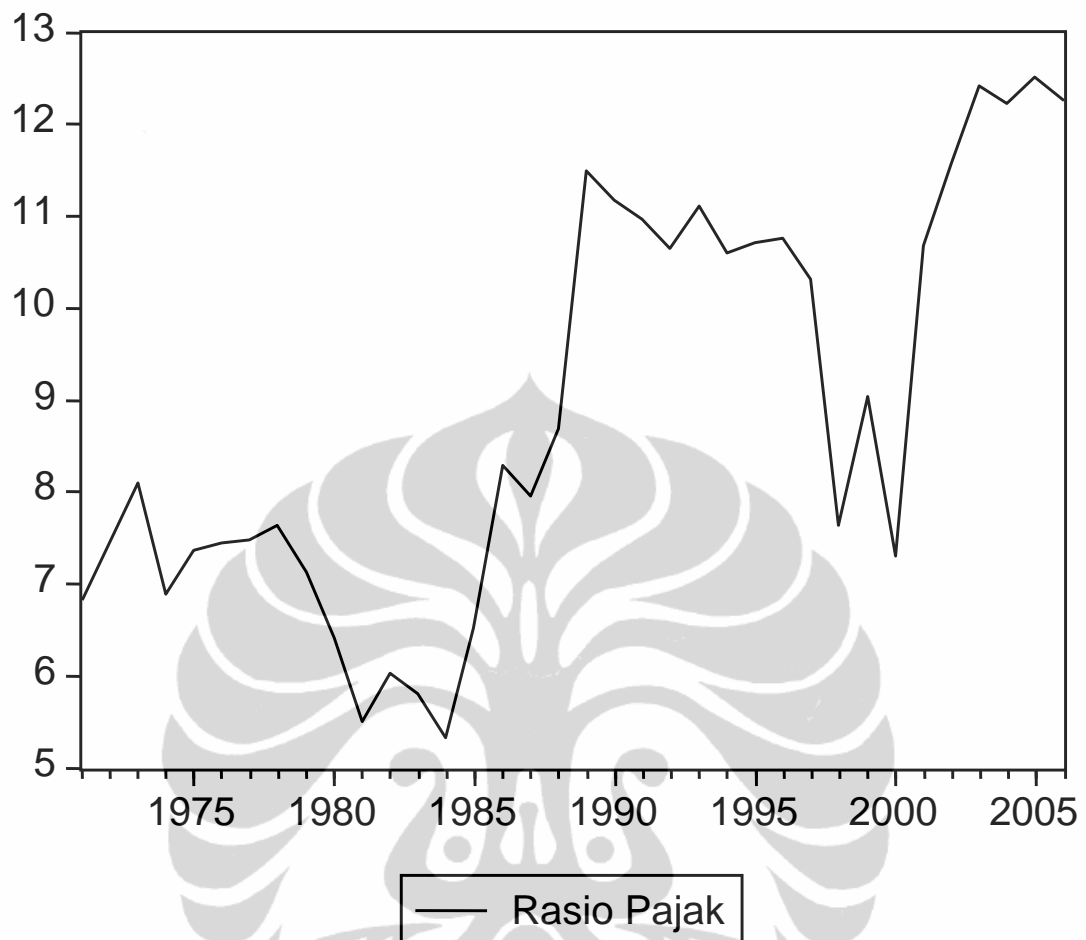


Grafik 4.2  
Perkembangan Penerimaan Pajak Riil Pemerintah Pusat Periode 1971-2006  
(Rp. Miliar)

Selama periode 1998-2000 penerimaan pajak nominal sebenarnya mengalami peningkatan, dari Rp64,7 Triliun pada tahun 1997 menjadi Rp101,4 Triliun Pada tahun 2000. Namun laju inflasi yang tinggi pada tahun 1998 (74%) menyebabkan penerimaan pajak riil mengalami penurunan. Barulah pada tahun 2001 penerimaan pajak riil kembali mendekati kondisi sebelum krisis.

#### 4.1.3. Perkembangan Rasio Pajak

Grafik 4.3 di bawah ini menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia selama periode 1971-2006 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 1971 rasio pajak adalah 6,8%. Sedangkan pada tahun 2006 mencapai 12,5% atau menjadi hampir dua kali lipat rasio pajak tahun 1971. Berdasarkan data-data ini dapat dikatakan penerimaan pajak Indonesia selama tiga dekade terakhir mengalami perbaikan.

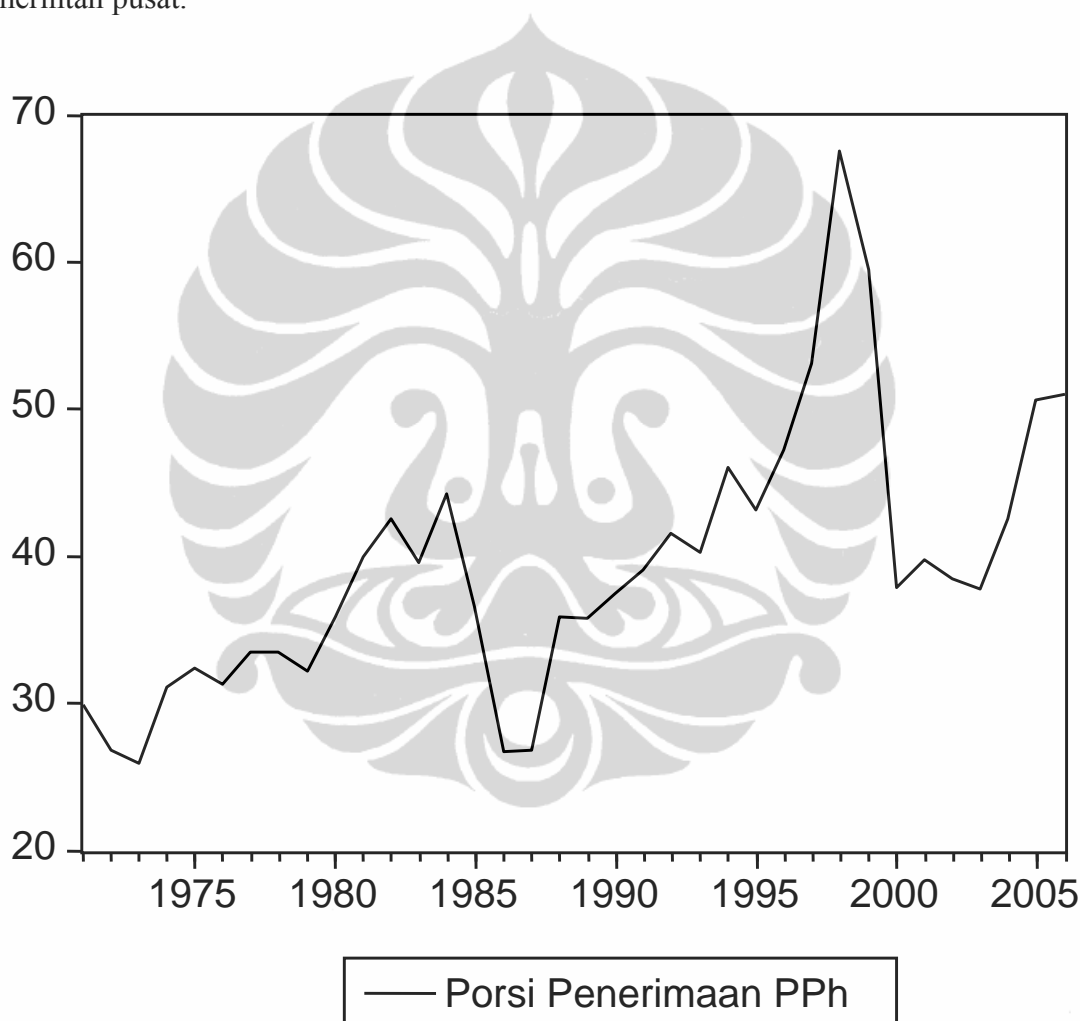


Grafik 4.3  
Perkembangan Rasio Pajak Indonesia Periode 1971-2006  
(% PDB Harga Berlaku)

Jika kembali kepada data pada Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan selama periode 1971-2006 dan diperkirakan berlanjut sampai saat ini (tahun 2009), rasio pajak Indonesia belum pernah mencapai angka 15%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia adalah terendah di antara negara-negara ASEAN, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia dan Philipina. Bahkan rasio pajak Indonesia, masih lebih rendah dari rasio pajak Cina dan India. Berdasarkan hal ini penerimaan pajak Indonesia dapat dikatakan paling rendah dibanding dengan negara-negara Asia yang dapat dianggap setara.

#### 4.1.4. Perkembangan Struktur Penerimaan Pajak

Grafik 4.4 di bawah ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak pemerintah pusat diukur dengan peranan penerimaan pajak langsung (PPh) dalam total penerimaan pajak, selama periode 1971-2006 menunjukkan kecenderungan membaik. Pada tahun 1971 penerimaan PPh hanya merupakan 29,9% penerimaan pajak, tetapi pada tahun 2006 telah mencapai 51% penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa PPh sudah menjadi sumber penerimaan pajak utama bagi pemerintah pusat.



Grafik 4.4

Perkembangan Porsi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam Total Penerimaan Pajak  
(% Total Penerimaan Pajak)

Sebenarnya, pada tahun 1997 PPh sudah sempat menjadi sumber utama penerimaan pajak pemerintah pusat. Pada tahun 1997 penerimaan PPh merupakan 53,1% penerimaan pajak pemerintah. Peranan PPh dalam penerimaan pajak pemerintah pusat mencapai puncaknya pada tahun 1998, yaitu sebesar 67,6% total penerimaan pajak pemerintah pusat. Kemudian sedikit menurun pada tahun 1999 menjadi 59,5% penerimaan pajak pemerintah pusat.

Selama periode 2000-2004 peran PPh dalam penerimaan pajak pemerintah pusat mengalami penurunan drastis menjadi kurang dari 40% total penerimaan pajak. Gejala di atas tidak terlepas dari krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia selama tahun 1997-1999.

Barulah sejak tahun 2005 PPh kembali dominan dalam penerimaan pajak pemerintah pusat, yaitu menyumbang 50,6% total penerimaan pajak.

#### **4.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah Provinsi**

Analisis penerimaan pajak pada tingkat pemerintah provinsi juga menggunakan indikator-indikator yang sama dengan analisis penerimaan pajak pemerintah pusat, kecuali indikator rasio penerimaan PPh dalam total penerimaan. Hal ini disebabkan pemungutan PPh maupun PPN dan PPN BM masih dilakukan oleh pemerintah pusat. UU No.33/2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menikmati penerimaan pajak dari daerahnya melalui mekanisme bagi hasil. Sedangkan untuk mengevaluasi perkembangan tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi adalah porsi penerimaan pajak dalam PAD. Jika angka rasionya makin besar, maka tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dikatakan membaik.

Tabel 4.4 memberikan gambaran perkembangan indikator penerimaan pajak provinsi di Indonesia, selama tahun 1994-2006. Indikator penerimaan pajak yang diamati adalah porsi penerimaan pajak daerah dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan rasio pajak daerah yaitu pajak nominal dibagi dengan PDRB harga berlaku. Data-data yang ditampilkan adalah beberapa provinsi terpilih.

Tabel 4.4  
Indikator Penerimaan Pajak Periode 1994-2006  
Beberapa Provinsi Terpilih

Provinsi	Porsi Pajak Dalam Pendapatan Asli Daerah (% PAD)	Rasio Pajak Provinsi (% PDRB Harga Berlaku)
SUMUT 1994	86	1.8
SUMUT 2000	93	3.4
SUMUT 2006	77	18.1
RIAU 1994	70	1.0
RIAU 2000	88	2.2
RIAU 2006	52	10.3
SUMSEL 1994	73	1.0
SUMSEL 2000	88	2.6
SUMSEL 2006	68	14.2
JABAR 1994	87	1.5
JABAR 2000	95	3.4
JABAR 2006	88	14.0
JATIM 1994	89	1.5
JATIM 2000	86	2.0
JATIM 2006	69	15.1
KALSEL 1994	74	1.4
KALSEL 2000	69	2.9
KALSEL 2006	59	22.2
KALTIM 1994	55	0.5
KALTIM 2000	73	1.0
KALTIM 2006	50	9.4
SULUT 1994	59	1.5
SULUT 2000	86	1.7
SULUT 2006	65	16.0
SULSEL 1994	70	1.9
SULSEL 2000	64	1.5
SULSEL 2006	63	20.8
NTB 1994	63	1.2
NTB 2000	63	2.2
NTB 2006	55	15.5
PAPUA 1994	71	0.9
PAPUA 2000	64	0.0
PAPUA 2006	45	10.5

Dua indikator yang akan dibahas secara ringkas dalam bagian ini adalah porsi penerimaan pajak daerah dalam PAD dan rasio pajak provinsi.

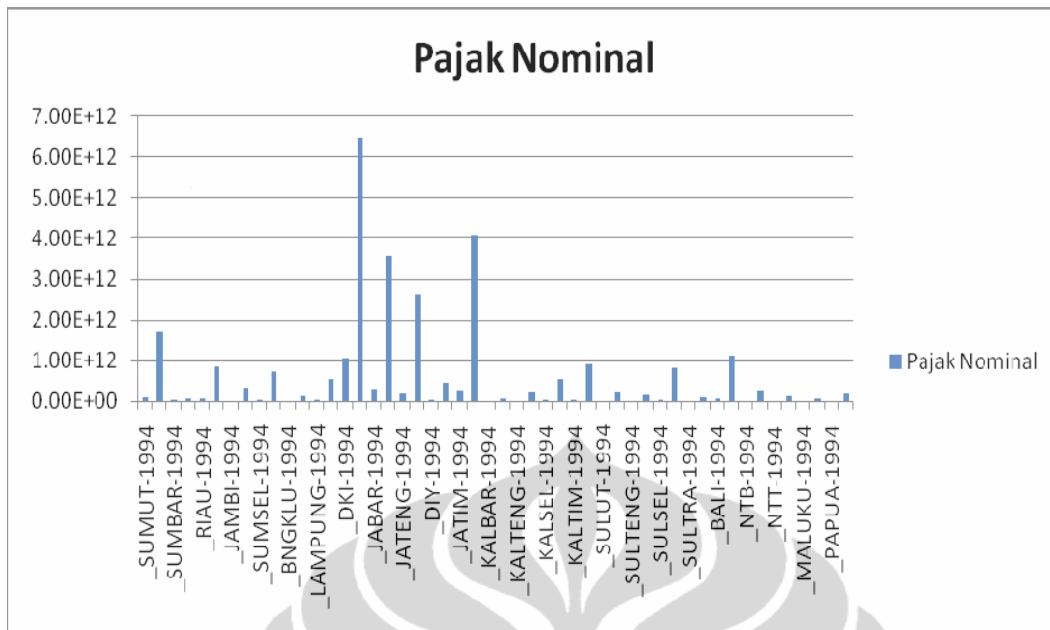
Perkembangan rasio pajak pada tingkat provinsi yaitu, pajak nominal provinsi dibagi PDRB nominal provinsi, secara keseluruhan menunjukkan perbaikan. Pada tahun 1994 dan 2000 rasio pajak provinsi umumnya masih sangat rendah, yaitu sekitar 2% PDRB harga berlaku. Peningkatan rasio pajak yang cukup cepat terjadi selama periode otonomi daerah. Pada tahun 2006 cukup banyak provinsi yang tax rasionya lebih besar dari 10%.

Berdasarkan porsi penerimaan pajak daerah dalam PAD, 25 provinsi selama periode 1994-2006 dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi yang diteliti memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik. Karena umumnya penerimaan pajak daerah lebih besar 50% Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tetapi terlihat kecenderungan umum, maka peranan pajak dalam PAD selama periode 1994-2006 mengalami penurunan. Selain itu juga terlihat gejala bahwa provinsi-provinsi tersebut umumnya memperoleh dana perimbangan khususnya DAU. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun kemandirian fiskalnya sudah relatif baik, namun kapasitas fiskalnya masih relatif rendah.

Uraian selanjutnya di bawah ini, akan membahas dengan lebih rinci perkembangan indikator-indikator penerimaan pajak pemerintah provinsi.

#### **4.2.1. Penerimaan Pajak Nominal**

Pada tingkat provinsi hanya beberapa yang mengalami kenaikan penerimaan pajak nominal yang pesat selama periode 1994-2006, yaitu Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Bali. Grafik 4.5 di bawah ini memberikan grafikan visual perkembangan penerimaan pajak nominal provinsi-provinsi yang diteliti, pada dua titik pengamatan, yaitu titik awal tahun 1994 dan titik akhir tahun 2006.



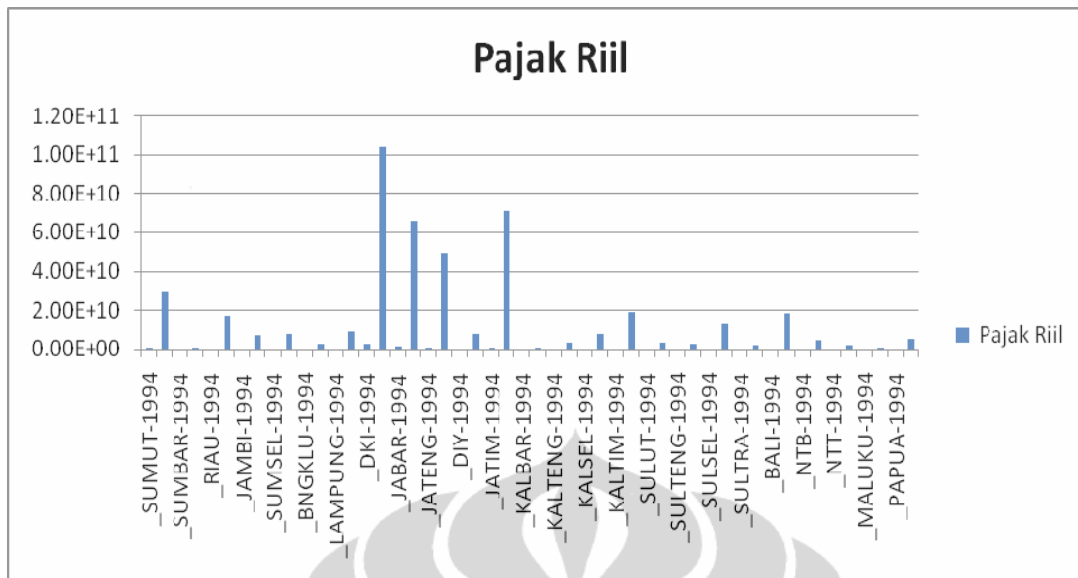
Gambar 4.1  
Perbandingan Pajak Nominal 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006  
(Rupiah)

Gambar 4.1 di atas menunjukkan beberapa provinsi yang penerimaan pajak nominalnya mengalami peningkatan yang relatif pesat, antara lain Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Perbedaan penerimaan pajak nominal pada tingkat provinsi tersebut di atas memberikan gambaran tentang begitu variatifnya tingkat efisiensi pemungutan dan atau potensi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan ketimpangan horizontal dalam hal potensi ekonomi dan atau tingkat kemajuan ekonomi, yang relatif besar di antara provinsi-provinsi yang diteliti.

#### 4.2.2. Perkembangan Pajak Riil

Gambar di bawah ini memberikan penjelasan visual tentang perkembangan penerimaan pajak riil 25 provinsi sampel, pada titik awal dan titik akhir periode pengamatan.



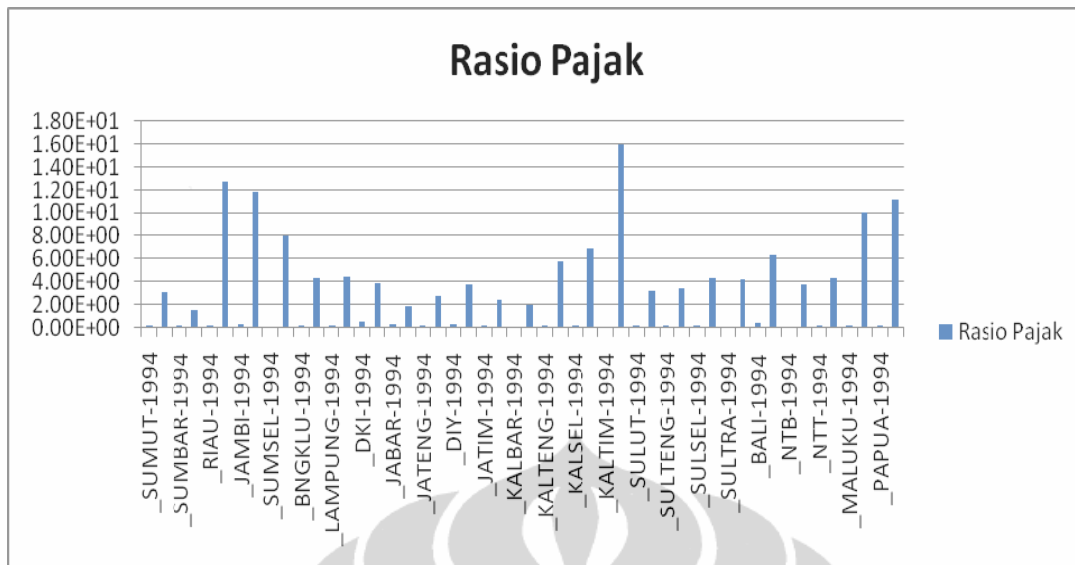


Gambar 4.2  
Perbandingan Pajak Riil 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006  
(Rupiah)

Bila melihat perkembangan pajak riil, juga hanya beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan relatif pesat, yaitu Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Bali. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya mengalami stagnasi.

#### 4.2.3. Perkembangan Rasio Pajak

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa selama periode 1994-2006 terjadi peningkatan yang cukup baik dalam hal rasio pajak provinsi. Namun demikian grafik maupun nilai statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di setiap provinsi sampel sangat variatif.



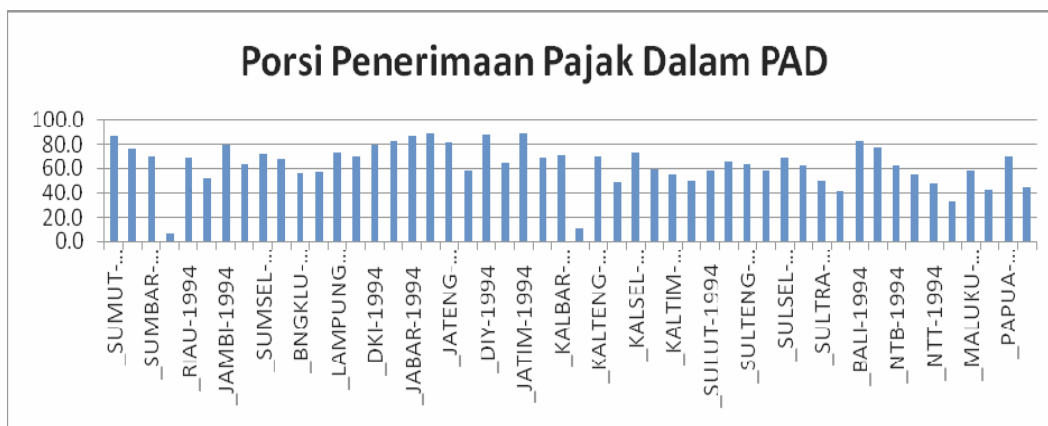
Gambar 4.3  
Perbandingan Rasio Pajak 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006  
(Rupiah)

Perkembangan yang paling menarik adalah rasio pajak. Pada tahun 1994 tidak ada satupun provinsi yang rasio pajaknya mencapai angka 1%. Rasio pajak tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu 0,6% dan Bali yaitu 0,4%. Provinsi-provinsi lainnya rasio pajaknya sekitar 0,1% sampai dengan 0,2%.

Pada tahun 2006 tidak ada satu provinsipun yang rasio pajaknya lebih kecil dari 1%. Hanya 3 provinsi yang rasio pajaknya lebih kecil dari 2%. Umumnya (13 provinsi) rasio pajak tingkat provinsi pada tahun 2006 diantara 2,1% sampai dengan 5%. Empat provinsi memiliki rasio pajak diantara 5,1% sampai dengan 10%. Lima provinsi yang rasio pajaknya lebih besar dari 10%. Ada dua provinsi yang rasio pajaknya lebih besar dari rasio pajak pemerintah pusat yang pada tahun 2006 hanya 12%. Kedua provinsi tersebut adalah Riau dengan rasio pajak 12,8% dan Kalimantan Timur dengan rasio pajak 16%.

#### 4.2.4. Perkembangan Struktur Penerimaan Pajak (Porsi Pajak dalam PAD)

Gambar di bawah memberikan gambaran visual tentang perkembangan porsi penerimaan pajak daerah dalam PAD 25 provinsi pada tahun 1994 dan 2006.



Gambar 4.4

Perbandingan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD 25 Provinsi Tahun 1994 dan 2006 (% Pajak dalam PAD)

Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa angka porsi penerimaan pajak dalam PAD 25 provinsi yang diteliti dapat dikatakan relatif hampir sama.

Jika diukur dengan porsi penerimaan pajak dalam PAD dapat dikatakan bahwa pada tahun 2006 sebagian besar provinsi yang diteliti memiliki kemandirian fiskal yang relatif baik karena porsi penerimaan pajak lebih besar dari 50% PAD.

Bahkan ada beberapa provinsi yang porsi penerimaan pajak dalam PAD mencapai angka  $\geq 80\%$ . Provinsi-provinsi tersebut antara lain adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Beberapa provinsi yang kaya dengan sumber daya, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua, angka porsi penerimaan pajak dalam PAD masih lebih rendah dari 80%.

Selama periode 1994-2006 hanya dua provinsi yang tingkat kemandirian fiskalnya dinilai tidak baik, yaitu Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Porsi pajak dalam PAD Sulawesi Tenggara pada tahun 2006 hanya 42,2%, sedangkan porsi pajak dalam PAD Nusa Tenggara Timur hanya 32,2%.

Namun secara keseluruhan selama periode 1994-2006 umumnya peranan pajak dalam PAD mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan yang sangat drastis, seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.

### 4.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator-indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam analisis penerimaan pajak pada tingkat pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator-indikator seperti pada analisis penerimaan pajak pemerintah provinsi. Hal inipun disebabkan pemungutan PPh maupun PPN dan PPN BM masih dilakukan oleh pemerintah pusat. UU No.33/2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menikmati penerimaan pajak dari daerahnya melalui mekanisme bagi hasil. Sedangkan untuk mengevaluasi perkembangan tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi adalah porsi penerimaan pajak dalam PAD. Jika angka rasionya makin besar maka tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dikatakan membaik.

Tabel 4.5 di bawah ini memberikan grafikan statistik deskriptif tentang empat indikator penerimaan pajak 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2000-2007.

Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif Indikator-Indikator Penerimaan Pajak  
25 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2000-2007

	Pajak	Pajak Riil	Rasio Pajak	Porsi Pajak Dalam PAD
Mean	19.214,60	140,33	0,44	49,11
Median	6697,00	49,99	0,13	27,60
Maximum	340.251,0	1.885,20	3,56	583,13
Minimum	616,00	6,16	0,01	0,28
Std. Dev.	45.484,64	301,97	0,80	87,91

Data-data tentang rasio pajak dan porsi penerimaan pajak dalam Tabel 4.5 menunjukkan beberapa hal.

Dilihat dari nilai rata-ratanya yang hanya 0,5%, dapat disimpulkan bahwa rasio pajak pemerintah kabupaten/kota sampel selama periode 2000-2007 adalah lebih rendah dari rasio pajak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan menyempitnya dan mengecilnya basis pajak bila tingkat

pemerintahan semakin rendah. Selanjutnya bila membandingkan nilai rata-rata dengan nilai tengah, dapat dikatakan bahwa umumnya rasio pajak kabupaten/kota sampel lebih rendah dari 0,44% atau lebih kecil dari 0,5%

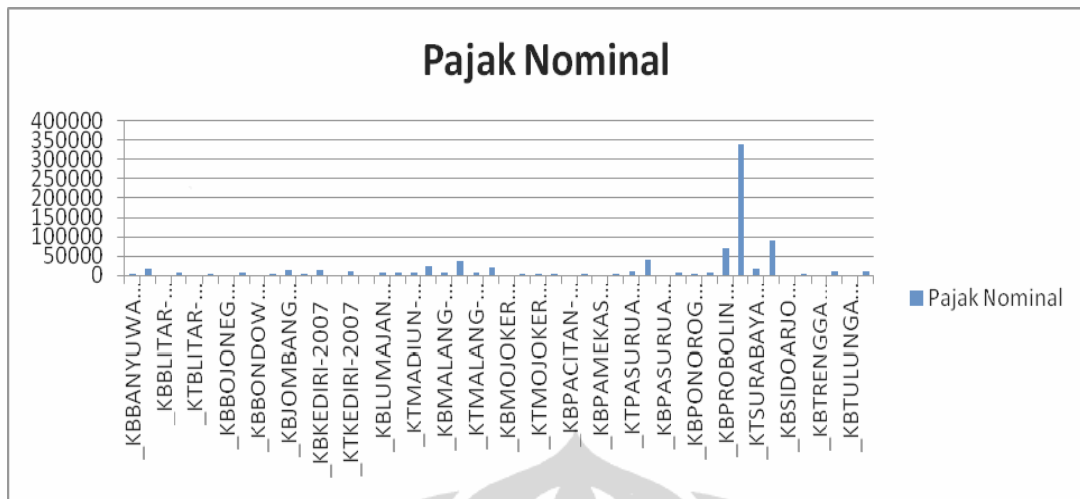
Bila dilihat dari angka rasio penerimaan pajak dalam PAD dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota sampel masih rendah. Hal ini disebabkan bahwa penerimaan pajak daerah menyumbang kurang dari separuh PAD. Bahkan bila berdasarkan nilai tengahnya, dapat dikatakan bagian besar dari kabupaten/kota sampel tingkat kemandirian fiskalnya masih sangat rendah. Umumnya sumbangan pajak terhadap PAD hanya 27,6% atau jauh lebih rendah dari 50%.

Uraian selanjutnya di bawah ini memberikan penjelasan tentang perkembangan indikator-indikator penerimaan pajak tingkat kabupaten/kota, 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2000-2007.

#### **4.3.1. Penerimaan Pajak Nominal**

Data-data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa nilai penerimaan pajak nominal 25 kabupaten/kota sampel selama periode 2000-2007 terus meningkat. Pada tahun 2007 Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat pertama penerimaan pajak nominal, yaitu sebesar Rp340.251 juta.

Namun jika mengamati angka statistik deskriptif pada Tabel 4.5 di atas, khususnya nilai standar deviasinya dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak 25 kabupaten/kota sampel sangat variatif. Gambar di bawah ini, juga menunjukkan secara visual ketimpangan kemampuan pemungutan pajak 25 kabupaten/kota sampel.

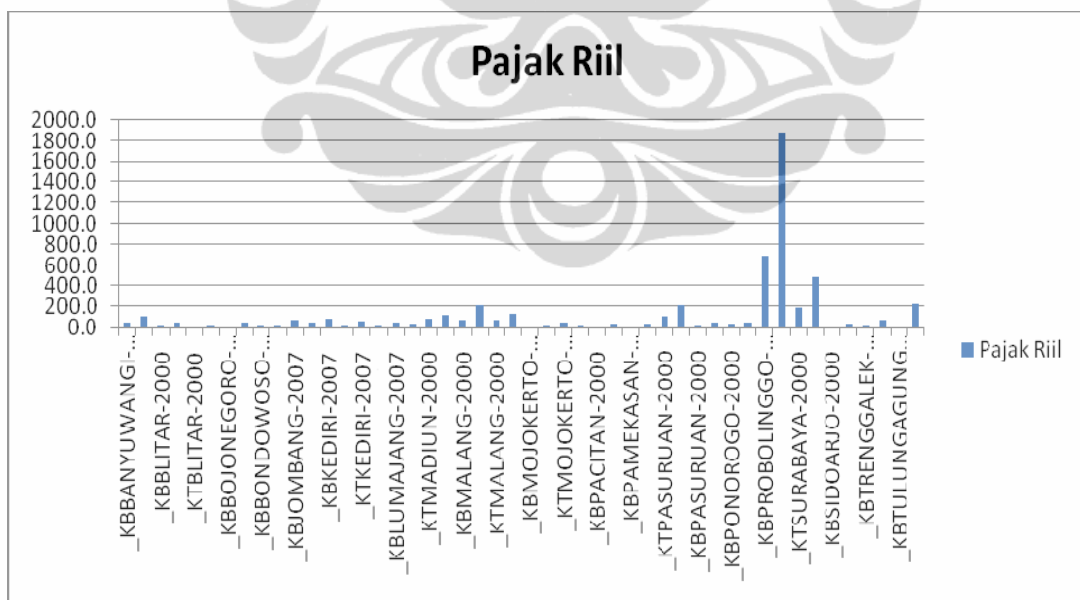


Gambar 4.5

Perbandingan Pajak Nominal pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 – 2007 (Rupiah)

#### 4.3.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Riil

Sama halnya dengan pajak nominal, penerimaan pajak pemerintah kabupaten/kota sampel diukur dengan penerimaan pajak riil ternyata juga sangat variatif, seperti yang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 4.6

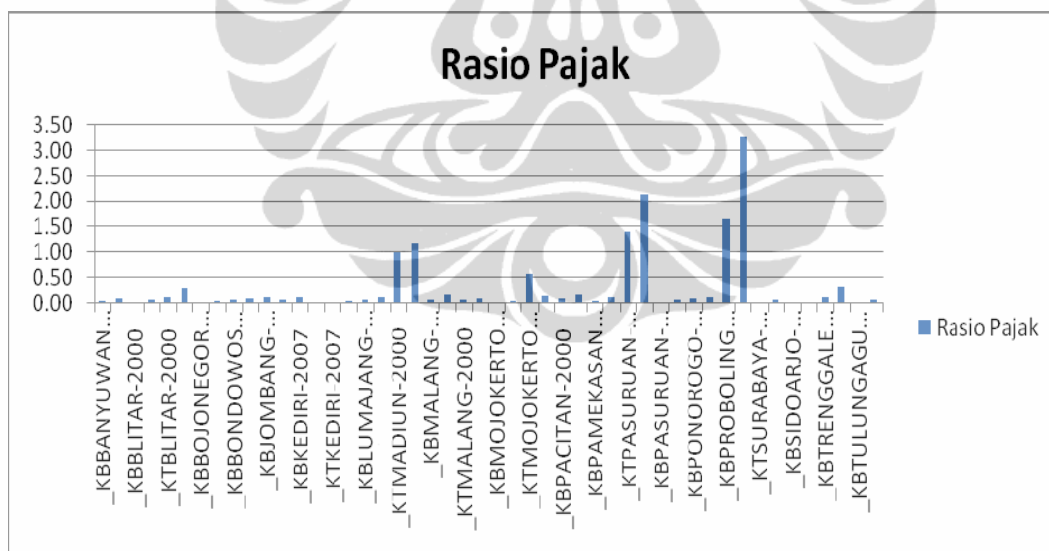
Perbandingan Pajak Riil pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 – 2007 (Rupiah)

Gambar di atas menunjukkan hanya kurang dari sepuluh kabupaten/kota yang penerimaan pajak riilnya relatif menonjol. Kesamaan pola penerimaan pajak nominal dengan pajak riil menunjukkan bahwa laju inflasi di 25 kabupaten/kota sampel relatif sama.

#### 4.3.3. Perkembangan Rasio Pajak

Rasio pajak tertinggi yang dapat dicapai oleh pemerintah 25 kabupaten/kota sampel pada tahun 2007 adalah 3,56% yaitu Kabupaten Probolinggo. Namun rasio pajak ini, bukanlah yang tertinggi yang dapat dicapai oleh Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2004 rasio pajak Probolinggo mencapai angka 3,56%. Rasio pajak yang terendah adalah Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2007 hanya mencapai 0,1%. Data juga menunjukkan masih cukup banyak kabupaten/kota sampel yang rasio pajaknya kurang dari 1%.

Gambar di bawah ini memberikan grafikan visual tentang ketimpangan rasio pajak 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4.7

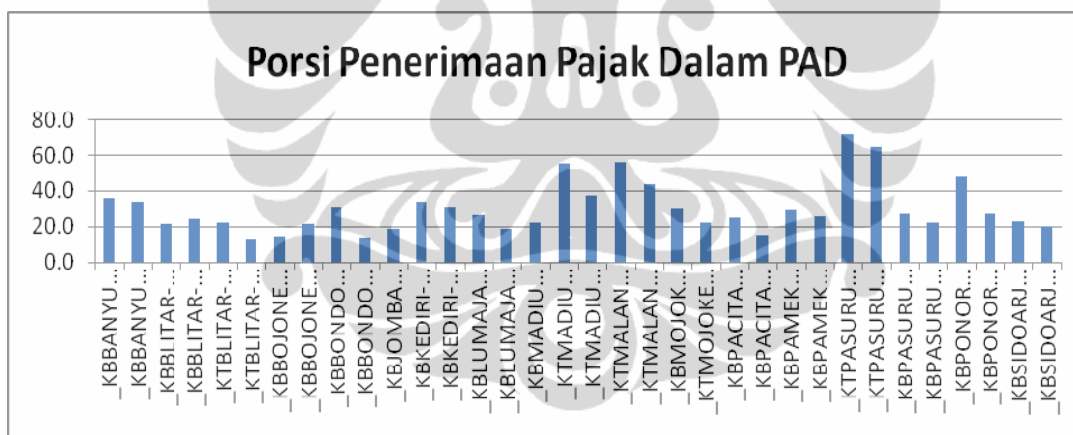
Perbandingan Rasio Pajak pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2000 – 2007 (% PDB Harga Berlaku)

Pada Gambar Diagram di atas amat jelas terlihat bahwa hanya sekitar 5 kabupaten/kota sampel yang rasio pajaknya lebih besar dari 1%. Bahkan sebagian diantaranya memiliki rasio pajak kurang dari 0,5%.

#### 4.3.4. Perkembangan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD

Bila diukur dengan menggunakan angka porsi penerimaan pajak dalam penerimaan PAD, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota sampel umumnya masih rendah/lemah. Data menunjukkan masih cukup banyak kabupaten/kota sampel yang porsi penerimaan pajak dalam PAD lebih rendah atau pernah lebih rendah dari 20%. Kabupaten/kota tersebut antara lain adalah Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lumajang.

Ketimpangan kemandirian fiskal antara kabupaten/kota sampel dapat diamati secara visual dari gambar di bawah ini.



Gambar 4.8

Perbandingan Porsi Penerimaan Pajak dalam PAD pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 - 2007 (% Pajak dalam PAD)

Data pada grafik di atas menunjukkan hanya beberapa kabupaten/kota yang diteliti porsi penerimaan pajak dalam PAD melebihi angka 50%. Kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Madiun, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan



## BAB 5

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PAJAK

Uraian dalam bab lima ini lebih ditekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak, pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Analisis dalam bab ini sangat terkait dengan analisis deskriptif yang telah diuraikan dalam bab empat.

#### 5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Pusat

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak pemerintah pusat dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) periode 1971-2008. Hasil regresi adalah seperti dapat dilihat di bawah ini,

Tabel 5.1  
Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Pusat

Variabel Bebas	Koefisien	Statistik t	Probabilita	
C	0,68	1,19	0,2451+	R <sup>2</sup> = 98,5% Adj.R <sup>2</sup> = 98,1 % Stat.F = 264,6 Stat.DW = 2,27
LTAXR <sub>-1</sub>	0,54	4,25	0,0002*	
LYRC	0,85	2,42	0,0136*	
OTO	0,51	3,78	0,0007*	
R2000	-0,59	-3,42	0,0019*	
KRISIS	-0,41	-3,44	0,0018*	
LPRATA	-0,15	-2,26	0,0313**	
LKURS	0,26	2,63	0,0136**	

Catatan: \* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 1% ; \*\* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 5% ; + = tidak signifikan

##### 5.1.1. Uji-Uji Asumsi Klasik

Hasil regresi di atas juga harus diuji apakah telah memenuhi asumsi-asumsi atau syarat-syarat regresi Klasik, yaitu tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

### Uji Otokorelasi

Masalah otokorelasi dievaluasi dengan melihat statistik DW hasil regresi yang dibandingkan dengan statistik DW Tabel. Regresi provinsi menggunakan observasi sebesar 37 dengan variabel bebas tujuh unit. Dengan  $\alpha$  5% maka statistik DW tabel adalah  $DU = 1,87$ , sehingga interval nilai DW yang menunjukkan tidak ada masalah otokorelasi antara  $DU$  sampai  $4-DU$  atau antara 1,82-2,13. Statistik DW regresi yang sebesar 2,27 menunjukkan tidak dapat disimpulkan ada otokorelasi atau tidak (ragu-ragu).

Berdasarkan hal di atas dilakukan runt test (*Geary test*), dengan pengujian 2 arah (*two tail*) dan tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) 5%. Hasil menunjukkan adalah 20 nilai residual yang positif dan 17 nilai residual yang negatif dan jumlah run adalah 17. Dengan menggunakan Tabel D.6A dan D6.B Gujarrati dapat disimpulkan tidak ada masalah otokorelasi karena jumlah run yang masuk dalam batas toleransi adalah antara 13-27.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan karena regresi menggunakan data runtut waktu (*time series*) sehingga dapat diasumsikan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan antara  $R^2$ , statistik F dan statistik t. Hasil regresi menunjukkan nilai  $R^2$  yang tinggi, statistik F yang signifikan pada derajat keyakinan ( $\alpha$ ) yang sangat tinggi dan statistik t seluruh variabel bebas juga signifikan pada  $\alpha$  yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang mengganggu.

Dengan menggunakan matriks korelasi, juga disimpulkan tidak ada masalah multikolinearitas yang mengganggu, sebab seluruh nilai  $R^2$  antara variabel bebas lebih kecil dari nilai  $R^2$  secara keseluruhan. Sehingga berlandaskan *Klien's Rule of thumb* tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu.

### **Tingkat Determinasi**

Tingkat determinasi atau kebaikan model menunjukkan seberapa baik, variabel-variabel bebas yang digunakan dalam regresi dapat menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Tingkat determinasi dievaluasi dengan melihat nilai  $R^2$ . Umumnya untuk model runtut,  $R^2$  yang disyaratkan adalah  $\geq 70\%$ . Hasil regresi menunjukkan angka  $R^2$  yang tinggi, yaitu lebih dari 90% menunjukkan bahwa perubahan lebih dari 90% pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan.

### **Statistik F**

Angka statistik F menunjukkan apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil regresi menunjukkan angka statistik F yang tinggi dan signifikan pada  $\alpha$  yang sangat tinggi. Artinya variabel-variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### **Statistik t**

Nilai statistik t menunjukkan apakah satu variabel bebas yang digunakan, secara parsial *ceteris paribus* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil regresi menunjukkan nilai statistik t seluruh variabel bebas umumnya signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) yang lebih tinggi dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikat.

#### **5.1.2. Interpretasi Hasil**

Interpretasi hasil regresi adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

#### **Penerimaan Pajak Riil Setahun Sebelumnya**

Variabel penerimaan pajak riil setahun sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil periode t. Jika penerimaan pajak riil pada tahun t naik sebesar 1% maka penerimaan pajak riil tahun yang akan datang *ceteris paribus* akan naik sebesar 0,54% .

**Universitas Indonesia**

Kecilnya koefisien regresi penerimaan pajak riil tahun sebelumnya terhadap penerimaan pajak riil pada tahun  $t$ , menunjukkan bahwa bila penerimaan pajak tahun ini meningkat 1%, maka tidak dapat diharapkan bahwa penerimaan pajak tahun depan akan naik sebesar 1 % juga. Lemahnya hubungan antara penerimaan pajak antar waktu berkaitan dengan faktor psikologis, teknis dan institusi. Hal ini disebabkan oleh banyak perubahan yang terjadi yang akhirnya mempengaruhi faktor psikologi, teknis dan institusi. Perubahan-perubahan ini berhubungan dengan perkembangan/dinamika perekonomian ataupun karena perubahan-perubahan kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pajak nasional.

### **PDB Harga Konstan 2000 Per Kapita**

PDB Harga konstan 2000 per kapita berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil. Jika PDB harga konstan per kapita pada tahun  $t$  tumbuh sebesar 1 %, maka *ceteris paribus* penerimaan riil pajak pada tahun yang sama akan naik sebesar 0,85%.

PDB riil per kapita memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak. Secara teoritis pertumbuhan PDB per kapita akan meningkatkan pendapatan pajak karena subyek dan obyek pajak semakin banyak dan beragam. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak riil pemerintah pusat kurang sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita. Kenaikan pendapatan per kapita sebesar satu persen hanya menaikkan penerimaan riil pajak sebesar 0,85%. Hasil regresi ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek.

Yang pertama, kurang sensitifnya penerimaan pajak riil terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita disebabkan oleh tingginya laju inflasi yang menurunkan nilai penerimaan riil pajak. Bahkan bila laju inflasi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal, maka laju pertumbuhan penerimaan pajak riil akan negatif. Selama periode 1971-2008, laju inflasi diukur dengan deflator PDB adalah rata-rata 14,9% per tahun. Sehingga sekalipun laju pertumbuhan penerimaan pajak nominal pada periode yang sama rata-rata lebih tinggi dari 20%, pertumbuhan penerimaan pajak riil kurang dari 10% per tahun.

Yang kedua, kurang sensitifnya penerimaan pajak riil terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita tidak lepas dari sikap lalai pemerintah menggali potensi penerimaan pajak selama periode rejeki minyak (*oil boom*) antara periode 1970an sampai dengan pertengahan dasa warsa 1980an.<sup>1</sup> Selama dan setelah periode rejeki minyak, pemerintah pusat juga mempunyai sumber penerimaan lain, yaitu utang luar negeri pemerintah. Barulah pada tahun 1984 pemerintah pusat kembali mulai memperhatikan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan.

Yang ketiga, sampai saat ini sekalipun efisiensi pemungutan pajak sudah terus berupaya di perbaiki, hasilnya belum sebaik yang diharapkan. Misalkan Indonesia masih berhadapan dengan masalah tingkat kepatuhan pajak yang rendah, kualitas pemeriksaan pajak yang masih harus diperbaiki, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Hadi Purnomo, 2009).

### **Otonomi Daerah**

Variabel dummy otonomi daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat. Koefisien regresi sebesar 0,51 menunjukkan pada saat pelaksanaan otonomi daerah semenjak tahun 2001 *ceteris paribus* penerimaan pajak riil pemerintah naik sebesar 0,51%.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat relatif kecil. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi fiskal tidak menurunkan daya kontrol pemerintah pusat terhadap sumber-sumber penerimaan pajak utama yaitu PPh dan PPN maupun PPN BM. Pelaksanaan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 lebih ditekankan pada pemberian wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pengeluaran atau belanja. Transfer keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk *block grant*

---

<sup>1</sup> Misalnya, seperti yang disampaikan Marzuki Usman (2007) dalam Abimanyu dan Megantara (2009), halaman 49.

misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) hanya berpengaruh besar terhadap wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran.

### **Krisis Ekonomi**

Variabel krisis ekonomi berpengaruh signifikan tetapi tidak besar terhadap penerimaan pajak riil. Hasil regresi menunjukkan bahwa pada saat periode krisis ekonomi 1997-1999, penerimaan pajak riil pemerintah pusat turun sebesar 0,41%. Secara teoritis krisis ekonomi tahun 1997-1999 menyebabkan turunnya penerimaan pajak riil karena menurunnya aktivitas ekonomi. Hasil regresi memang sesuai dengan teori.

Dalam konteks Indonesia, krisis ekonomi 1997-1999 disertai dengan melemah secara drastisnya nilai tukar nominal rupiah. Pada awal tahun 1997 nilai tukar nominal rupiah adalah Rp.2.500/US\$, tetapi pada tahun 1999 sekitar Rp.8.000/US\$. Pelemahan nilai tukar yang sangat drastis ini memberikan dua dampak yang bertolak belakang. Yang pertama adalah dampak kontraktif terhadap perekonomian karena menurunnya kemampuan impor bahan baku. Hal ini disebabkan ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku dan barang modal impor. Misalnya pada tahun 1996 impor non migas Indonesia yang terdiri atas bahan baku dan barang modal, adalah sebesar 39,3 US\$ miliar. Pada tahun 1997 sedikit menurun menjadi US\$ 37,8 miliar. Tetapi menurun pada tahun 1998 dan 1999 menjadi hanya US\$ 24,7 miliar (1998) dan US\$ 20,3 miliar (1999). Yang kedua, dampak ekspansif karena pelemahan nilai tukar nominal rupiah *ceteris paribus* memperbaiki ekspor neto, dengan menurunnya impor dan meningkatnya ekspor. Pada tahun 1997 ekspor neto Indonesia adalah defisit US\$ 1,7 miliar, tetapi pada tahun 1998-1999 mengalami perubahan yang sangat drastis, yaitu surplus sebesar US\$ 93,2 miliar (1998) dan US\$ 76,8 miliar (1999). Karena pelemahan drastis dari nilai tukar Rupiah, surplus perdagangan dalam rupiah meningkat beberapa kali lipat. Ekspor neto yang positif secara teoritis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga menumbuhkan basis pajak.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dampak neto dari krisis ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah negatif. Artinya pengaruh kontraksi krisis 1997-1999 terhadap penerimaan pajak, lebih besar dari pengaruh ekspansifnya.

## Reformasi Pajak Tahun 2000

Variabel dummy reformasi pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penerimaan pajak riil. Pada saat reformasi pajak 2000 dilaksanakan *ceteris paribus* penerimaan pajak riil pemerintah pusat turun sebesar 0,59 %.

Pada tahun 2000 pemerintah menetapkan lima undang-undang di bidang perpajakan, yaitu UU No.16 tahun 2000; UU No.17 tahun 2000, UU No.18 tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000 dan UU No.20 tahun 2000. Tiga diantaranya yang menggantikan undang-undang perpajakan tahun 1983 yaitu tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No.16/2000 pengganti UU No.6/1983), Pajak Penghasilan (UU No.17/2000 pengganti UU No.7/1983) dan PPN-BM (UU No.19/2000 pengganti UU No.8/1983), sedangkan dua undang-undang yang lain menggantikan undang-undang tahun 1997 yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UU No.19/2000 pengganti UU No.19/1997) dan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU No.20/2000 pengganti UU No.21/1997). Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah terus-menerus melakukan pembaruan perpajakan. Namun undang-undang tersebut umumnya bersifat perbaikan sisi manajemen dan citra direktorat jenderal pajak, sehingga dampaknya dalam jangka pendek bagi penerimaan pajak belum dapat dirasakan.

UU pajak yang relatif terus menerus dilakukan sejak tahun 1984, menyiratkan bahwa perkembangan masyarakat khususnya dalam hal pendapatan dan kesejahteraan sangat dinamis. Sehingga reformasi pajak terus menerus perlu dilakukan agar potensi pajak dapat terus tergarap. Bila reformasi pajak tahun 1984 lebih ditekankan pada pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assesment*. Maka pada periode-periode selanjutnya reformasi perpajakan lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak, peningkatan ketaatan pajak dan pemeliharaan ketatan pajak, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan citra administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun langkah-langkah penyempurnaan tersebut membutuhkan biaya dan waktu (Bawazier dan Kadir, 2009; Purnomo, 2009 dan Nasution, 2009). Langkah-langkah yang ruang lingkupnya relatif luas dan kompleks, memang

**Universitas Indonesia**

membutuhkan waktu untuk berhasil. Supriyadi (2009) menyatakan pandangan tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa sekalipun sudah terjadi perbaikan-perbaikan, namun belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan.

### **Harga Bahan Bakar Minyak**

Harga bahan bakar minyak (BBM) diukur dengan harga rata-rata bensin dan solar berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat. Jika harga BBM pada tahun  $t$  naik sebesar 1% maka penerimaan pajak riil pada tahun yang sama akan turun sebesar 0,15%.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM (2007), walaupun konsumsi BBM di Indonesia bukan hanya bensin dan solar, namun porsi penggunaan kedua jenis bahan bakar ini relatif besar. Sampai tahun 2006, konsumsi solar dan bensin merupakan 60% total konsumsi BBM nasional, tetapi merupakan sekitar 90% konsumsi BBM untuk transportasi. Karena itu kenaikan harga bensin dan solar berpengaruh terhadap kinerja ekonomi makro. Secara teoritis kenaikan harga energi akan menaikkan biaya produksi, khususnya sektor transportasi. *Ceteris paribus* kenaikan harga energi akan menyebabkan gangguan pada sisi pasokan agregat (*adverse supply shock*), yang selanjutnya akan menimbulkan kontraksi ekonomi. Dampak akhirnya adalah penurunan penerimaan pajak.

Namun pengaruh kenaikan harga BBM terhadap penerimaan pajak riil relatif kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan menurunnya porsi penggunaan BBM untuk kegiatan produksi. Data ESDM menunjukkan bahwa pada tahun 2006, porsi penggunaan BBM dalam total energi turun menjadi 54,4% dibanding tahun 2000 yang mencapai 63,7%. Sedangkan BBM yang dipakai untuk industri hanya 47%. Sedangkan industri menggunakan sekitar 27% minyak solar yang digunakan di seluruh Indonesia. Penggunaan bensin oleh industri sangat kecil mendekati 0%. Turunnya peranan BBM dalam penggunaan energi total disebabkan meningkatnya peranan batu bara dan listrik. Pada tahun 2000 peranan batu bara dalam penggunaan energi di Indonesia adalah 7,3%, tetapi pada tahun 2006 menjadi 15,4%. Pergeseran ke batu bara dan listrik tampaknya berhubungan dengan harga minyak bumi yang terus meningkat dan kekurangstabilan pasokan.



## Nilai Tukar Nominal

Unsur keterbukaan ekonomi dalam studi ini direpresentasikan dengan nilai tukar nominal rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (Rp/US\$). Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat. Bila nilai tukar nominal rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun  $t$  melemah 1%, maka *ceteris paribus* penerimaan riil pajak pemerintah pusat pada periode yang sama akan naik sebesar 0,26%. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh pelemahan nilai tukar terhadap penerimaan riil pajak pemerintah pusat sekalipun positif namun relatif kecil.

Hasil regresi di atas dapat di jelaskan sebagai berikut; melemahnya nilai tukar di satu sisi akan meningkatkan ekspor barang dan jasa yang akan mendorong aktivitas perekonomian domestik. Hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain, ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan kemampuan impor barang modal dan bahan baku. Hal ini akan mengurangi dampak ekspansif dari peningkatan ekspor barang/jasa, mengingat sekitar 90%-95% impor Indonesia merupakan impor bahan baku dan barang modal. Dimana impor bahan baku besarnya sekitar tiga kali lipat impor barang modal.<sup>2</sup>

### 5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Provinsi

Regresi Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak pemerintah provinsi metode efek tetap atau Fixed Effect Method (FEM). Pada analisis tingkat provinsi jumlah *time series* (T) yaitu 1994-2006 adalah lebih kecil dari jumlah *cross section* (N) yaitu 24 provinsi. Dalam kondisi seperti ini, maka regresi dengan menggunakan FEM dan Random Effect Model (REM) dapat memberikan hasil yang berbeda. Judge seperti yang dikutip Manurung et al. (2007) menyatakan bila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak maka FEM lebih tepat.

---

<sup>2</sup> Statistik 50 Tahun Indonesia Merdeka, BPS, diperkuat dengan data 15 tahun terakhir BPS (Statistik Indonesia, 2009)

Sebaliknya bila *cross section* acak maka REM lebih tepat. Dalam studi ini pemilihan sampel provinsi sebanyak 24 dari 33 provinsi adalah tidak acak. Hal ini disebabkan dasar pemilihan mempertimbangkan faktor homogenitas sehingga Provinsi DKI Jakarta tidak dimasukkan dalam studi, sekalipun pertimbangannya adalah konsistensi dan kelengkapan data. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka metode FEM adalah lebih tepat.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak pemerintah provinsi menggunakan data panel 24 provinsi di Indonesia periode 1994-2006. Hasil regresi adalah seperti dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5.2  
Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Provinsi

Variabel Bebas	Koefisien	Statistik t	Probabilita	$R^2 = 99,9 \%$ $Adj.R^2 = 99,9 \%$ $Stat.F = 20.360$ $Stat.DW = 2,03$
LTAXR (-1)	0,40	8,73	0,0000*	
LYRC	0,77	7,23	0,0000*	
LPORMO	-0,33	-1,82	0,0702***	
OTO	0,74	15,6	0,0000*	
R2000	0,38	2,59	0,0102**	
KRISIS	0,36	3,43	0,0000*	
LPRATA	0,29	3,87	0,0001*	
LKURS	-0,46	-4,10	0,0001*	

Catatan: \* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 1% ; \*\* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 5% ; \*\*\* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 10 %

Fixed Effects:

_SUMUT—C	14,82	_JATENG—C	15,50	_SULTENG—C	13,71
_SUMBAR—C	13,97	_DIY—C	14,32	_SULSEL—C	14,63
_RIAU—C	13,66	_JATIM—C	15,47	_SULTRA—C	13,47
_JAMBI—C	14,11	_KALBAR—C	13,88	_BALI—C	14,57
_SUMSEL—C	14,29	_KALTENG—C	13,21	_NTB—C	14,03
_BNGKLU—C	13,64	_KALSEL—C	13,99	_NTT—C	13,97
_LAMPUNG—C	14,48	_KALTIM—C	12,99	_MALUKU—C	13,50
_JABAR—C	15,56	_SULUT—C	13,84	_PAPUA—C	12,50

### 5.2.1. Uji-Uji Asumsi Klasik

Hasil regresi di atas juga harus diuji apakah telah memenuhi asumsi-asumsi atau syarat-syarat regresi Klasik, yaitu tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu, otokorelasi dan heteroskedastisitas.

#### Uji Otokorelasi

Masalah otokorelasi dievaluasi dengan melihat statistik DW hasil regresi yang dibandingkan dengan statistik DW Tabel. Regresi provinsi menggunakan observasi sebesar sekitar 280 dengan variabel bebas delapan unit. Dengan  $\alpha$  5% maka statistic DW tabel adalah  $DU = 1,85$ , sehingga interval nilai DW yang menunjukkan tidak ada masalah otokorelasi antara  $DU$  sampai  $4-DU$  atau antara  $1,85-2,15$ . Staistik DW regresi yang sebesar  $2,03$  menunjukkan tidak adalah masalah otokorelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Park, Glejser dan Koenker–Basset. Hasil regresi tanpa metode Park dan Glejser menggunakan *Fixed Effect* dan *Cross Section Weight* serta metode Koenker–Basset menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Karena itu, untuk perbaikan regresi dilakukan dengan menggunakan *Cross Section Weight*.

#### Uji Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan antara  $R^2$ , statistik F dan statistik t. Hasil regresi menunjukkan nilai  $R^2$  yang tinggi, statistik F yang signifikan pada derajat keyakinan ( $\alpha$ ) yang sangat tinggi dan statistik t seluruh variabel bebas juga signifikan pada  $\alpha$  yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu. Uji multikolinieritas juga dilakukan dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil *auxiliary regression* menunjukkan beberapa hal:

1. Bila tanpa menggunakan fixed effect dan cross section weight, nilai VIF lebih kecil dari 5, yang artinya memenuhi syarat cukup untuk menyimpulkan tidak ada multikolinieritas yang mengganggu.
2. Nilai  $R^2$  *auxiliary regression* lebih kecil dari nilai  $R^2$  secara keseluruhan, sehingga berlandaskan *Klien's Rule of thumb* tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu.

### **Tingkat Determinasi**

Tingkat determinasi atau kebaikan model menunjukkan seberapa baik, variabel-variabel bebas yang digunakan dalam regresi dapat menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Tingkat determinasi dievaluasi dengan melihat nilai  $R^2$ . Umumnya untuk model panel data,  $R^2$  yang disyaratkan adalah  $\geq 70\%$ . Hasil regresi menunjukkan angka  $R^2$  yang tinggi, yaitu lebih dari 90% menunjukkan bahwa perubahan lebih dari 90% pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan.

### **Statistik F**

Angka statistik F menunjukkan apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil regresi menunjukkan angka statistik F yang sangat tinggi. Artinya variabel-variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### **Statistik t**

Nilai statistik t menunjukkan apakah satu variabel bebas yang digunakan, secara parsial *ceteris paribus* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil regresi menunjukkan nilai statistik t yang umumnya signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) yang lebih tinggi dari 5% menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikat.

### 5.2.2. Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil regresi adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

#### **Efek Tetap (*Fixed Effect*)**

Regresi ini menggunakan efek tetap yang bermakna bahwa respon perubahan variabel terikat (pajak riil) terhadap perubahan variabel terikat *ceteris paribus* adalah sama, yaitu sebesar angka koefisien regresi. Misalkan jika pendapatan riil perkapita (PDRB harga konstan 2000 per kapita) berubah 1% maka *ceteris paribus* pada tahun yang sama penerimaan pajak riil akan naik sebesar 0,68 %, berlaku untuk semua provinsi yang diteliti.

Penggunaan efek tetap pada prinsipnya sama dengan dummy provinsi. Nilai efek tetap provinsi merupakan titik potong nilai penerimaan pajak riil provinsi ke *i*. Nilai tersebut menunjukkan besarnya penerimaan pajak riil provinsi ke *i* pada saat semua variabel bebas, nilainya sama dengan nol. Karena merupakan titik potong dengan sumbu vertikal maka nilai efek tetap dapat ditafsirkan sebagai penerimaan minimal pajak riil provinsi ke *i*. Jika nilai efek tetap makin besar, maka penerimaan minimumnya makin besar. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai efek tetap dapat menggambarkan kinerja pajak provinsi ke *i*.

Nilai efek tetap seluruh provinsi yang diteliti adalah lebih besar dari nol, yang menunjukkan bahwa bila seluruh variabel bebas bernilai nol, maka penerimaan pajak riil di seluruh provinsi masih bernilai positif.

Data-data di atas menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki kinerja pajak yang lebih baik dibanding provinsi-provinsi lainnya. Sedangkan 19 provinsi memiliki kinerja pajak yang relatif sama. Ada dua provinsi yang kinerja pajaknya lebih rendah dari rata-rata yaitu Kalimantan Timur dan Papua.

Relatif tingginya nilai efek tetap provinsi-provinsi di Pulau Jawa berhubungan dengan struktur produksi perekonomian yang tidak mengandalkan sektor primer, melainkan sektor modern khususnya industri dan jasa. Ketiga provinsi tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu jumlah penduduk yang hampir sama, pendapatan per kapita yang juga hampir sama, bukan

merupakan provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya alam dan struktur produksi agregat yang juga dapat dikatakan sama. Karakteristik-karakteristik tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan pajak daerah.

Rendahnya nilai efek tetap Provinsi Kalimantan Timur dan Papua, berkaitan dengan karakteristik kedua provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Sedangkan sektor industri dan jasa di kedua sektor tersebut belum berkembang. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur dan Papua memperoleh penerimaan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang sangat besar.

### **Penerimaan Pajak Riil Satu Tahun Sebelumnya**

Hasil regresi menunjukkan bahwa kinerja pajak satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja pajak periode  $t$ . Koefisien variabel sebesar 0,40 artinya *ceteris paribus* jika penerimaan pajak riil di provinsi  $i$  pada tahun  $t$  bertambah (tumbuh) sebesar 1%, maka *ceteris paribus*, penerimaan pajak riil pemerintah daerah provinsi  $i$  pada periode setahun kemudian bertambah sebesar 0,40%. Hasil regresi ini memberi indikasi bahwa ada kecenderungan kinerja pajak di tingkat provinsi terus meningkat.

Adanya hubungan antara kinerja pajak pada periode tahun  $t$  dengan periode setahun sebelumnya dapat dijelaskan dari sudut pandang faktor-faktor penyebabnya, yaitu kelembagaan, teknis dan psikologi.

Dari sudut kelembagaan, obyek pajak yang dipungut relatif tetap dari tahun ke tahun, sementara subyek pajaknya umumnya terus bertambah karena peningkatan pendapatan dan perubahan struktur produksi maupun pengeluaran. Umumnya jika perekonomian semakin maju dan modern, struktur produksi bergeser ke sektor industri dan jasa. Hal ini akan meningkatkan potensi penerimaan pajak langsung dan atau pajak tidak langsung.

Dimensi teknis berkaitan dengan siklus dan prosedur pemungutan pajak. Umumnya pajak yang dipungut memiliki siklus yang relatif tetap. Bila efisiensi pemungutan pajak membaik maka penerimaan pajak akan terus meningkat.

Sedangkan dimensi psikologi berkaitan dengan ekspektasi. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa para pengambil keputusan melandaskan ekspektasinya pada informasi-informasi yang relevan (*rational expectation*) dan atau berdasarkan pengalaman beberapa waktu terakhir (*adaptive expectation*). Penerimaan pajak yang semakin besar selama beberapa tahun terakhir menimbulkan ekspektasi bahwa penerimaan pajak dimasa yang akan datang terus meningkat.

Rendahnya koefisien regresi variabel kinerja pajak setahun sebelumnya, setidaknya mengindikasikan dua hal, yaitu (1) lambannya pertumbuhan subyek pajak dan lambannya laju perubahan struktural, (2) lambannya peningkatan efisiensi pemungutan pajak. Kedua hal tersebut berkaitan dengan sistem pemungutan pajak yang masih didominasi oleh pemerintah pusat. Selain itu perkembangan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa daerah hanya merupakan tempat aktivitas produksi, sedangkan pemilik perusahaan umumnya berdomisili di Jakarta atau ibu kota provinsi.

#### **PDRB Harga Konstan 2000 Per Kapita**

PDRB Harga konstan 2000 per kapita berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil pemerintah provinsi. Jika PDRB harga konstan per kapita di provinsi  $i$  pada tahun  $t$  tumbuh sebesar 1% *ceteris paribus*, maka penerimaan pajak riil pemerintah daerah provinsi  $i$  pada tahun yang sama tumbuh sebesar 0,77%.

PDRB per kapita memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak. Secara teoritis pertumbuhan PDRB per kapita akan meningkatkan pendapatan pajak. Dengan demikian hasil regresi sesuai dengan teori. Peningkatan pajak riil pada provinsi-provinsi yang diamati, walaupun cukup besar, tidak terlalu sensitif (tidak elastis) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Hal tersebut dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang.

Pertama, umumnya pendapatan per kapita di provinsi-provinsi yang diamati masih relatif rendah. Misalnya data tahun 2006 menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia di ukur dengan PDB harga konstan 2000 per kapita adalah Rp.8,3juta. Masih banyak provinsi yang pendapatannya lebih rendah

dari rata-rata nasional. Dari 23 provinsi yang diteliti 11 diantaranya memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional diantaranya adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ada tiga provinsi (tidak termasuk DKI Jakarta) yang pendapatan riil per kapitanya lebih dari dua kali lipat pendapatan per kapita nasional, yaitu Riau, Kalimantan Timur dan Papua. Namun provinsi-provinsi yang PDRB riil per kapitanya relatif sangat tinggi, lebih disebabkan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki. Rendahnya pendapatan per kapita menyebabkan lambannya pertumbuhan obyek dan subyek pajak.

Kedua, selain pendapatan per kapita yang masih relatif rendah, distribusi pendapatan di provinsi-provinsi yang diamati belum dapat dikelompokkan baik walaupun tidak buruk. Berdasarkan data BPS tahun 2009 tentang indikator kesejahteraan rakyat, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan selama periode 2006-2008 diukur dengan koefisien Gini tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 0,36. Angka koefisien Gini tersebut sebenarnya relatif tidak berubah selama tiga puluh tahun terakhir.

Ketiga, sampai saat ini sumber-sumber penerimaan pajak yang besar yaitu PPH dan PPN, hak pemungutannya masih ditangan pemerintah pusat. Sehingga bila dilihat dari sudut pandang penerimaan pajak, pemerintah pusat lebih menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan UU No.34 tahun 2004, pajak-pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah tidaklah jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No.28 Tahun 1999. Bahkan UU No.34/2000 sekalipun tidak memberikan perubahan yang mendasar dalam hal cakupan pemungutan pajak daerah.

Menurut Uppal (1986) dan Devas (1989), sekalipun jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah provinsi ada sekitar lima puluh, namun biaya pemungutannya masih lebih besar dari penerimaan pajak, sehingga pemerintah daerah enggan untuk menggarapnya. Apa yang disampaikan Uppal dan Devas beberapa dekade yang lalu sampai sekarang masih relevan karena sebagian besar penerimaan pemerintah berasal dari hanya beberapa jenis pajak saja. Misalkan data-data beberapa tahun terakhir di beberapa provinsi, yaitu Papua, Maluku,

**Universitas Indonesia**



Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan menunjukkan lebih dari 70% penerimaan pajak provinsi bersumber dari pajak-pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, yaitu Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).<sup>3</sup> Data pada Tabel 5.3 di bawah ini. Memberikan gambaran tentang dominasi penerimaan pajak-pajak tersebut dalam penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia.<sup>4</sup>

Tabel 5.3  
Peranan Penerimaan Pajak yang Berhubungan dengan Kepemilikan  
Kendaraan dalam Penerimaan Pajak Daerah Provinsi

Provinsi (tahun)	Nilai (Rp Miliar)			Peranan (% Pajak Daerah)			Peran Total PKB, BBNKB, PBBKB
	PKB	BBNKB	PBB KB	PKB	BBNKB	PBB KB	
Lampung 2001-2005	147,0	229,8	86,5	31,4	49,1	18,5	98,9
Jawa Tengah 2006	894,5	670,0	581,9	41,4	31,0	26,9	99,4
NTB 2006	62,1	61,2	66,3	32,6	32,1	34,8	99,5
Kalimantan Tengah 2006	43,8	61,3	72,4	24,6	34,5	40,7	99,9
Kalimantan Selatan 2006	145,6	140,4	180,2	30,4	29,3	37,7	97,4
Kalimantan Timur 2006	220,0	225,2	336,8	27,9	28,6	42,8	99,3
Sulawesi Tengah 2006	47,2	42,4	45,2	34,9	31,4	33,5	99,8
Sulawesi Utara 2006	49,4	51,7	0,0	40,4	42,2	0,0	82,6
Papua 2005	46,3	60,7	24,1	34,0	44,5	17,7	96,2
Maluku 2007	13,2	17,9	35,6	19,8	26,8	53,2	99,9
DKI Jakarta 2007	2,369	2,215	602	32,9	30,8	8,4	72,0

Sumber: Diolah dari Statistik Daerah Sub Bagian Keuangan Daerah

Catatan: PKB = Pajak Kendaraan Bermotor ; BBN-KB =Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,  
PBB-KB = Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor

<sup>3</sup> Data-data diambil dari buku Statistik Provinsi Tahunan Terbitan BPS, pada kelompok laporan keuangan dan harga-harga. Dalam bagian tersebut dilampirkan data-data APBD provinsi. Provinsi-provinsi yang disebut di atas adalah provinsi-provinsi yang laporan APBD-nya memasukkan rincian penerimaan pajak provinsi secara rinci berdasarkan jenis-jenis pajak daerah provinsi. Provinsi-provinsi yang lain, umumnya tidak membuat laporan penerimaan berdasarkan jenis-jenis pajak daerah.

<sup>4</sup> Sampel yang diambil adalah provinsi-provinsi yang memiliki laporan lengkap dan ada provinsi yang mewakili setiap pulau. DKI Jakarta, walaupun bukan merupakan obyek penelitian, dilampirkan sebagai pembanding.

Data pada Tabel 5.3 di atas menunjukkan seluruh provinsi sampel dan juga Provinsi DKI Jakarta mengandalkan penerimaan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai sumber penerimaan pajak provinsi. Total peranan ketiga pajak tersebut hampir mencapai 100%, kecuali DKI Jakarta yaitu 72%. Dengan demikian peran jenis pajak yang lain, seperti pajak pemanfaatan air tanah, dapat dikatakan tidak berarti atau kurang dari 3%.

Karena jumlah kendaraan yang dimiliki dan konsumsi BBM berhubungan dengan pendapatan per kapita, maka kenaikan pendapatan per kapita dapat menaikkan konsumsi kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor.

Pada tahun 2007 terlihat gejala bahwa penerimaan pajak daerah sudah lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan redistribusi daerah. Hal ini menyiratkan bahwa sampai sekarang biaya pemungutan pajak daerah selain pajak-pajak PKB, BBNKB dan PBB-KB kemungkinan besar masih lebih besar dari hasil pajak. Karena itu lebih baik menggarap redistribusi daerah.

### **Porsi Sektor Modern**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel porsi sektor modern berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Koefisien variabel sebesar -0,33 artinya bila porsi sektor modern di provinsi  $i$  pada periode  $t$  bertambah sebesar 1%, maka *ceteris paribus* penerimaan pajak riil pemerintah daerah provinsi  $i$  pada periode yang sama akan turun sebesar 0,33%.

Pengaruh modernisasi perekonomian terhadap penerimaan pajak riil di tingkat pusat ternyata berbeda dengan di tingkat pemerintah provinsi. Modernisasi perekonomian meningkatkan penerimaan pajak riil pemerintah pusat. Namun modernisasi perekonomian justru menurunkan penerimaan pajak riil pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan distribusi manfaat dari modernisasi perekonomian terhadap penerimaan pajak antara tingkatan pemerintah masih belum merata. Hasil regresi menunjukkan bahwa yang lebih menikmati manfaat pajak dari modernisasi perekonomian adalah pemerintah pusat. Gejala ini akan terus berlanjut selama kontrol atas sumber-sumber pajak yang besar dan gemuk yaitu PPh, PPN dan PPN BM masih dipegang oleh pemerintah pusat.

Struktur sektor industri dan jasa di tingkat provinsi khususnya provinsi-provinsi luar Jawa belum sebesar, sekuat dan sama modernnya dengan struktur industri dan jasa di Jakarta. Misalkan industri di DKI Jakarta, umumnya berskala besar dan padat modal. Sedangkan sektor jasa DKI Jakarta di dominasi oleh usaha-usaha jasa modern, seperti keuangan-perbankan, hotel, restoran, hiburan, serta transportasi/komunikasi. Sementara itu sektor manufaktur di daerah-daerah luar pulau Jawa umumnya berskala kecil dan sektor jasanya lebih didominasi oleh perdagangan.

Selanjutnya, cakupan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu pajak yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor dan penggunaan BBM dan penggunaan air tanah, seharusnya membesar pada saat peranan sektor modern meningkat. Dengan demikian seharusnya penerimaan pajak riil provinsi meningkat, pada saat porsi sektor modern meningkat. Namun hasil regresi yang justru negatif, dapat dijelaskan dari beberapa sebagai berikut:

1. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia lebih banyak untuk kebutuhan pribadi dan juga berkaitan dengan sistem pembayaran kredit. Karena itu peningkatan penggunaan kendaraan bermotor lebih dapat dijelaskan oleh peningkatan pendapatan per kapita.
2. Pada tingkat daerah, meningkatnya peranan sektor industri dan jasa dalam perekonomian justru lebih dinikmati oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebab menurut UU No.34/2000, pajak-pajak yang berkaitan dengan perkembangan sektor modern, yaitu pajak hotel, hiburan, restoran, reklame dan parkir dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Demikian juga dengan PBB yang secara teoritis meningkat pada saat perekonomian semakin modern, bagi hasilnya lebih dinikmati oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Masih rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak di provinsi yang menyebabkan masih tingginya tingkat kebocoran pajak.

### **Otonomi Daerah**

Variabel otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan riil pajak daerah provinsi dengan arah positif. Nilai koefisien regresi sebesar 0,74 artinya adalah pada periode otonomi daerah rasio pajak di provinsi yang diteliti bertambah atau meningkat sebesar 0,74%.

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berhasil meningkatkan kinerja pajak daerah provinsi. Berdasarkan UU No.34/2000 pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali potensi keuangan dengan menetapkan pajak-pajak daerah dan restribusi daerah yang belum diatur oleh UU No.34/2000. Namun demikian, kenaikan penerimaan pajak riil pemerintah provinsi tidaklah besar. Hal ini berkaitan dengan masih kecilnya basis pajak provinsi dan atau masih rendahnya kemampuan pemerintah provinsi dalam menggarap potensi pajak daerah. Selain itu, seperti telah disampaikan di atas, penerimaan pajak provinsi terkonsentrasi pada pajak-pajak yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak-pajak ini dapat dikatakan tidak terpengaruh oleh kebijakan otonomi daerah.

Selain itu kemungkinan besar kenaikan pajak provinsi berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil yang mencakup PBB, Kekayaan Alam, PPh pasal 25 dan 29 dan beberapa Dana Bagi Hasil lainnya. Rendahnya kenaikan penerimaan pajak sekalipun sudah ada pajak bagi hasil, disebabkan porsi pembagiannya lebih besar untuk kabupaten/kota penghasil.

### **Reformasi Perpajakan Tahun 2000**

Hasil regresi menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja pajak tingkat provinsi. Pada saat terjadi reformasi pajak di Indonesia pada tahun 2000, penerimaan pajak riil pemerintah provinsi meningkat sebesar 0,38%. Hasil regresi ini berbeda dengan hasil regresi pada tingkat pusat. Maknanya dampak reformasi pajak terhadap penerimaan pajak pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bila reformasi pajak tahun 2000 menurunkan penerimaan pajak riil pemerintah pusat,

namun reformasi tersebut berhasil menaikkan penerimaan pajak riil pemerintah provinsi.

Dalam konteks daerah, reformasi pajak tahun 2000 dapat juga dikaitkan dengan diberlakukannya UU No.34/2000 tentang pajak dan redistribusi daerah. Pasal 2 ayat 1, UU tersebut memperluas cakupan penerimaan pajak daerah tingkat provinsi dengan menambah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang pada periode sebelumnya dimasukkan sebagai redistribusi daerah.

Kecilnya pengaruh tersebut disebabkan minimnya perluasan basis pajak provinsi dan masih rendahnya efisiensi pemungutan pajak daerah disebabkan berbagai faktor seperti rendahnya tingkat ketaatan pajak dan rendahnya kapasitas petugas pajak yang menyebabkan masih tingginya tingkat kebocoran pajak.

### **Krisis Ekonomi**

Variabel krisis ekonomi signifikan terhadap penerimaan pajak riil pemerintah provinsi dengan arah positif. Pada periode krisis 1997-1999 penerimaan pajak provinsi meningkat sebesar 0,36 %. Dengan demikian pengaruh krisis terhadap penerimaan pajak provinsi dapat dikatakan kecil. Hal tersebut disebabkan dampak krisis terhadap perekonomian provinsi sifatnya mendua. Ada provinsi yang diuntungkan dari kondisi krisis, yaitu provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam dan atau komoditi pertanian ekspor (kopi, udang, dan lain-lain). Ada juga provinsi yang dirugikan akibat krisis, khususnya mereka yang mengandalkan sektor industri dan jasa. Faktor yang lain penyebab kecilnya pengaruh krisis adalah struktur penerimaan pajak provinsi yang tergantung pada pajak kendaraan.

Diperkirakan kenaikan ekspor daerah telah menstimulir pembelian kendaraan bermotor, khususnya mobil dan sepeda motor, baik yang baru maupun yang lama, di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan komoditi pertanian ekspor. Hal ini menyebabkan kenaikan penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor, maupun pajak bea balik nama.

### **Harga Bahan Bakar Minyak**

Hasil regresi menunjukkan bahwa harga rata-rata BBM yang diukur dengan harga rata-rata bensin dan solar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil daerah provinsi dengan arah positif. Bila harga rata-rata BBM pada tahun  $t$  naik sebesar 1% maka pada tahun yang sama penerimaan pajak provinsi  $i$  naik sebesar 0,29%.

Naiknya harga BBM *ceteris paribus*, seharusnya menurunkan permintaan kendaraan pribadi, sehingga menurunkan permintaan BBM. Salah satu tujuan kenaikan harga BBM akan menurunkan subsidi BBM. Namun di Indonesia, kenaikan harga BBM umumnya selalu diikuti dengan kenaikan harga transportasi umum, seperti tarif kereta api, pesawat terbang, bus dalam kota dan antar kota, jenis-jenis transportasi yang melayani lingkungan seperti angkot dan ojek motor. Kenaikan transportasi umum tersebut menyebabkan memiliki kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, secara finansial akan lebih menguntungkan. Data menunjukkan bahwa sejak kenaikan harga BBM yang tinggi pada triwulan empat tahun 2005, jumlah kendaraan pribadi khususnya sepeda motor terutama motor bebek meningkat pesat. Pada tahun 2005 jumlah sepeda motor di Indonesia adalah 28,6 juta unit. Pada tahun 2006 32,5 juta unit atau naik 13,6%. Pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 41,9 juta unit. Jadi sejak kenaikan harga BBM Oktober 2005, sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah sepeda motor meningkat sebesar 47%. Selain itu buruknya kondisi sarana transportasi umum menyebabkan kelompok berpenghasilan menengah ke atas cenderung memilih menggunakan mobil pribadi karena secara finansial akan menjadi lebih murah. Data BPS menunjukkan jumlah mobil selama 2005-2007 meningkat. Pada tahun 2005 jumlah mobil 5,5 juta unit, pada tahun 2007 8,9 juta unit atau naik sebesar 62,8%.

Jumlah mobil dan motor yang semakin banyak menyebabkan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama maupun pajak bahan bakar motor meningkat.

### **Nilai Tukar Nominal Rupiah**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel nilai tukar nominal rupiah (Rp/US\$) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penerimaan pajak

riil pemerintah provinsi. Jika nilai tukar nominal rupiah terhadap US\$ melemah 1 % maka penerimaan pajak riil provinsi akan turun sebesar 0,45 %.

Penurunan nilai tukar nominal rupiah *ceteris paribus* seharusnya menaikkan ekspor dan menurunkan impor, sehingga ekspor neto membesar. Kenaikan ekspor neto ini akan berdampak ekspansif terhadap output agregat. Selanjutnya hal tersebut akan menaikkan penerimaan pajak daerah.

Turunnya penerimaan pajak riil pemerintah provinsi pada saat nilai tukar melemah disebabkan beberapa faktor. Pertama, pelemahan nilai tukar yang menurunkan volume impor, justru berdampak negatif terhadap jumlah barang/jasa yang diproduksi. Hal ini disebabkan komponen impor dalam industri manufaktur di Indonesia atau ketergantungan kelangsungan industri terhadap impor bahan baku dan barang modal relatif sangat besar. Kedua, jika ekspor meningkat, maka yang lebih menikmati pajak adalah pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Bila komoditi yang diekspor adalah produk sektor pertambangan, maka yang lebih diuntungkan adalah pemerintah pusat. Untuk komoditi non tambang yang lebih diuntungkan adalah pemerintah kabupaten/kota, karena asal peningkatan ekspor ada di kabupaten/kota.

### **5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Sama halnya dengan analisis pada tingkat provinsi, regresi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga menggunakan metode efek tetap atau Fixed Effect Method (FEM). Pada analisis tingkat kabupaten/kota jumlah *time series* (T) yaitu 2000-2005 adalah lebih kecil dari jumlah *cross section* (N) yaitu 25 kabupaten/kota. Dalam kondisi seperti ini, maka regresi dengan menggunakan FEM dan Random Effect Model (REM) dapat memberikan hasil yang berbeda. Judge seperti yang dikutip Manurung et al. (2007) menyatakan bila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak maka FEM lebih tepat. Sebaliknya bila *cross section* acak maka REM lebih tepat. Dalam studi ini pemilihan sampel kabupaten/kota sebanyak 25 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur adalah tidak acak. Hal ini disebabkan dasar pemilihan konsistensi dan

kelengkapan data. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka metode FEM adalah lebih tepat.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota menggunakan data panel 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2000-2007. Pemilihan Provinsi Jawa Timur untuk bahan studi kasus adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Perekonomian Jawa Timur adalah perekonomian yang relatif maju setelah Jakarta, setidaknya tidaknya sejajar dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- Jumlah penduduk Jawa Timur masuk dalam tiga besar terbanyak dari 33 provinsi yang ada di Indonesia

Namun demikian karena keterbatasan data dan waktu penulisan, dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur yang digunakan sebagai sampel adalah 25 kabupaten/kota, yaitu 18 kabupaten dan 7 kota.

Karena selama periode pengamatan, yaitu 2000-2007 tidak termasuk periode krisis dan sebagian besar periode pengamatan tercakup dalam periode otonomi daerah, maka variabel dummy krisis dan pelaksanaan otonomi daerah tidak dimasukkan dalam model regresi.

### Hasil Regresi

Hasil regresi adalah seperti dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5.4

Hasil Regresi Model Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota

Variabel Bebas	Koefisien	Statistik t	Probabilita	$R^2 = 99,9 \%$ $Adj.R^2 = 99,8 \%$ $Stat.F = 4.773$ $Stat.DW = 2,08$
LTAXR <sub>-1</sub>	0,07	1,76	0,0829***	
LYRC	-0,37	-1,04	0,298 +	
LKURS	0,58	2,60	0,0109*	
TDL JATIM	1,12	9,20	0,0000*	
LPRATA	-0,11	-2,72	0,0077*	
LPMO	1,65	2,75	0,0077*	

Catatan: \* = signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 1% ; \*\*\*= signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) = 10%; + = tidak signifikan

Universitas Indonesia



## Fixed Effects:

_KBBANYUWANGI—C	-13,1	_KBMADIUN—C	-14,4	_KBPASURUAN—C	-14,7
_KBBLITAR—C	-13,8	_KTMADIUN—C	-13,5	_KBPONOROGO—C	-13,7
_KTBLITAR—C	-15,6	_KBMALANG—C	-13,0	_KBPROBOLINGGO—C	-10,7
_KBBOJONEGORO—C	-13,9	_KTMALANG—C	-13,6	_KTSURABAYA—C	-11,0
_KBBONDOWOSO—C	-14,6	_KBMOJOKERTO—C	-15,0	_KBSIDOARJO—C	-14,8
_KBJOMBANG—C	-13,9	_KTMOJOKERTO—C	-15,4	_KBTRENGGALEK—C	-14,0
_KBKEDIRI—C	-13,5	_KBPACITAN—C	-14,6	_KBTULUNGAGUNG--C	-14,2
_KTKEDIRI—C	-13,7	_KBPAMEKASAN—C	-12,1		
_KBLUMAJANG--C	-13,9	_KTPASURUAN—C	-13,2		

### 5.3.1. Uji-Uji Asumsi Klasik

Hasil regresi di atas juga harus diuji apakah telah memenuhi asumsi-asumsi atau syarat-syarat regresi Klasik, yaitu tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu, otokorelasi dan heteroskedastisitas.

#### Uji Otokorelasi

Masalah otokorelasi dievaluasi dengan melihat statistik DW hasil regresi yang dibandingkan dengan statistik DW Tabel. Regresi provinsi menggunakan observasi sebesar sekitar 125 dengan variabel bebas delapan unit. Dengan  $\alpha$  5% maka statistik DW tabel adalah  $DU = 1,82$ , sehingga interval nilai DW yang menunjukkan tidak ada masalah otokorelasi antara  $DU$  sampai  $4-DU$  atau antara  $1,82-2,18$ . Statistik DW regresi yang sebesar  $2,08$  menunjukkan tidak ada masalah otokorelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Park, Glejser dan Koenker–Basset. Hasil regresi tanpa metode Park dan Glejser menggunakan *Fixed Effect* dan *Cross Section Weight* serta metode Koenker–Basset menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Karena itu, untuk perbaikan regresi dilakukan dengan menggunakan *Cross Section Weight*.

### Uji Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan antara  $R^2$ , statistik F dan statistik t. Hasil regresi menunjukkan nilai  $R^2$  yang tinggi, statistik F yang signifikan pada derajat keyakinan ( $\alpha$ ) yang sangat tinggi dan statistik t variabel bebas juga signifikan pada  $\alpha$  yang tinggi. Hanya satu variabel bebas yang pengaruhnya tidak signifikan, yaitu pendapatan riil per kapita (YRC). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu. Uji multikolinieritas juga dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil *auxiliary regression* menunjukkan beberapa hal:

1. Bila tanpa menggunakan *fixed effect* dan *cross section weight*, nilai VIF lebih kecil dari 5, yang artinya memenuhi syarat cukup untuk menyimpulkan tidak ada multikolinieritas yang mengganggu.
2. Nilai  $R^2$  *auxiliary regression* lebih kecil dari nilai  $R^2$  secara keseluruhan, sehingga berlandaskan *Klien's Rule of thumb* tidak ada masalah multikolinieritas yang mengganggu.

### Tingkat Determinasi

Tingkat determinasi atau kebaikan model menunjukkan seberapa baik variabel-variabel bebas yang digunakan dalam regresi dapat menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Tingkat determinasi dievaluasi dengan melihat nilai  $R^2$ . Umumnya untuk model panel data,  $R^2$  yang disyaratkan adalah  $\geq 70\%$ . Hasil regresi menunjukkan angka  $R^2$  yang tinggi, yaitu lebih dari 90% menunjukkan bahwa perubahan lebih dari 90% pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan.

### Statistik F

Angka statistik F menunjukkan apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil regresi menunjukkan angka statistik F yang tinggi, serta signifikan pada  $\alpha$  yang sangat tinggi. Artinya variabel-variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

## Statistik t

Nilai statistik t menunjukkan apakah satu variabel bebas yang digunakan secara parsial *ceteris paribus* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil regresi menunjukkan nilai statistik t yang umumnya signifikan pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) yang lebih tinggi dari 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas umumnya berpengaruh parsial secara signifikan terhadap variabel terikat. Hanya variabel pendapatan riil per kapita yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil kabupaten/kota.

### 5.3.2. Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil regresi adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

#### Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Nilai efek tetap menunjukkan berapa besar penerimaan pajak riil pada saat seluruh variabel bebas bernilai nol. Karena itu nilai efek tetap dapat dipakai untuk menilai tingkat penerimaan pajak. Nilai efek tetap seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang diteliti bernilai negatif. Bahkan Kota Surabaya dan Kediri yang dikenal sebagai kota industri di Jawa Timur, memiliki angka efek tetap yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa bila semua variabel bebas bernilai nol, maka penerimaan pajak riil kabupaten/kota adalah negatif.

Hal di atas kemungkinan besar berkaitan dengan jenis-jenis pajak kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu pajak-pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, yang memang sangat terkait dengan tingkat perkembangan ekonomi.

#### Penerimaan Pajak Riil Satu Tahun Sebelumnya

Hasil regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak riil kabupaten/kota  $i$  satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil kabupaten/kota periode  $t$ . Koefisien variabel sebesar 0,07 artinya jika penerimaan pajak di kabupaten/kota  $i$  pada periode setahun sebelumnya bertambah sebesar 1%, maka *ceteris paribus* rasio pajak di provinsi  $i$  pada periode tahun  $t$  bertambah sebesar 0,07%. Hasil regresi ini memberi indikasi

bahwa ada kecenderungan kinerja pajak di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terus meningkat, namun keterkaitan kesinambungan antar waktu amat kecil.

Koefisien regresi variabel penerimaan pajak riil tahun sebelumnya pada tingkat kabupaten yang sebesar 0,07 adalah jauh lebih kecil dibanding koefisien regresi variabel penerimaan pajak riil tahun sebelumnya pada tingkat provinsi yang sebesar 0,40. Hal ini memberikan indikasi lemahnya hubungan penerimaan pajak riil antara satu periode dengan periode setahun sebelumnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diteliti.

Rendahnya tingkat kelembaman penerimaan pajak pada tingkat kabupaten/kota disebabkan struktur penerimaan pajak yang didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Pajak ini adalah pajak yang tidak terlalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

#### **PDRB Harga Konstan 2000 Per Kapita**

PDRB Harga konstan 2000 per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Seperti juga telah disampaikan sebelumnya bahwa PDRB per kapita memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak. Secara teoritis pertumbuhan PDRB per kapita akan meningkatkan pendapatan pajak. Namun pada tingkat kabupaten/kota kenaikan PDRB per kapita yang diteliti umumnya PDRB per kapita masih rendah. Selanjutnya makin rendah tingkat pemerintahannya, maka umumnya basis pajak makin terbatas sehingga potensi penerimaan pajak riil juga makin terbatas.

Untuk pajak-pajak yang sifatnya bukan bagi hasil yang dapat dikumpulkan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur juga masih rendah. Sampai tahun 2007 nilai nominal pajak yang dipungut rata-rata masih lebih kecil dari Rp.50 miliar. Bahkan lebih dari sepuluh kabupaten/kota yang penerimaan pajak nominalnya lebih kecil dari Rp.20 miliar. Hanya Kota Surabaya yang dapat mengumpulkan pajak nominal sebesar sekitar Rp.350 miliar.

Sebagai provinsi yang tidak kaya akan sumber daya alam, maka pajak bagi hasil yang diperoleh oleh kabupaten/kota juga relatif kecil. Misalkan, penerimaan PBB dan BPHTB Kota Pasuruan<sup>5</sup> pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1,9 miliar atau rata-rata Rp160 juta per bulan. Nilai penerimaan pajak perbulan tersebut, setara dengan gaji beberapa orang pucuk pimpinan perusahaan besar di Jakarta. Sedangkan penerimaan pajak hotel pada tahun yang sama adalah Rp.31,2 juta atau Rp.2,6 juta per bulan. Untuk kota terbesar di Jawa Timur, yaitu Surabaya, total penerimaan pajak tahun 2005, adalah sekitar Rp.270 miliar. Hampir separuh dari pajak yang diterima berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

Rendahnya potensi pajak-pajak daerah tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dari struktur penerimaan pajak yang didominasi oleh beberapa pajak saja, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan. Pada beberapa daerah *sample*, porsi terbesar dari penerimaan pajak kabupaten/kota adalah penerangan jalan. Misalkan, kabupaten/kota yang diteliti yaitu Kabupaten Banyuwangi (2006), Kabupaten Bondowoso (2006), Kabupaten Jombang (2007) dan Kabupaten Mojokerto (2007), penerimaan pajak penerangan jalan menyumbang sekitar 90% penerimaan pajak daerah. Bagi Kota Surabaya (2005) pajak penerangan jalan merupakan sumber penerimaan nomor tiga terbesar dan angkanya mencapai sekitar Rp.35 miliar. Tingginya peranan penerimaan pajak penerangan jalan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten/kota tidak (terlalu) tergantung pada perkembangan pendapatan per kapita.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Untuk memperkuat analisis dalam studi, telah dicoba melakukan eksplorasi data struktur penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak, dengan mempelajari APBD kabupaten/kota. Namun karena berbagai keterbatasan, khususnya konsistensi dan kontinuitas pelaporan, maka data pendukung yang dapat disampaikan sifatnya individualistik dan atau data-data pada tahun tertentu saja.

<sup>6</sup> Pajak penerangan jalan yang diterima oleh kabupaten/kota yang dipelajari dalam studi ini, dapat dikatakan seluruhnya berasal dari pajak penerangan jalan PLN. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kabupaten/Kota Jawa Timur tidak terlalu tergantung pada perkembangan ekonomi.

Rendahnya potensi penerimaan basis-basis pajak di kabupaten/kota di Jawa Timur, <sup>7</sup> merupakan gambaran umum untuk seluruh wilayah kabupaten/kota Indonesia. Fakta-fakta tersebut kelihatannya memotivasi pemerintah kabupaten/kota untuk menggarap redistribusi daerah. Data pada tahun 2007 menunjukkan bahwa secara rata-rata penerimaan pajak pada kabupaten di seluruh Indonesia lebih besar dari penerimaan redistribusi. Namun sebagian besar kabupaten/kota di 20 provinsi di Indonesia penerimaan pajaknya lebih rendah dari redistribusi. Bahkan masih banyak provinsi yang penerimaan pajak kabupaten/kota kurang dari separuh penerimaan redistribusi. Provinsi-provinsi tersebut antara lain<sup>8</sup>, Riau 33%, Bengkulu 41%, NTT 48%, Kalimantan Tengah 48%, Gorontalo 27% dan Papua 33%. Untuk Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2007 penerimaan pajak kabupaten/kota adalah 96% penerimaan redistribusi kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan, penerimaan pajak seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan redistribusi kabupaten/kota. Data pada Tabel 5.5 berikut ini, memberikan gambaran umum tentang perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan redistribusi daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia

---

<sup>7</sup> Contoh rendahnya potensi pajak, dapat dilihat dari daftar wajib pajak Kota Madiun 2008 di bawah ini, yaitu 30 hotel/losmen, 45 rumah kost, 27 restoran, 116 warung, 10 permainan ketangkasan, 2 diskotik, 5 biliar, 3 kolam renang, 36 video rental, 527 billboard perusahaan, 874 papan took.

<sup>8</sup> Angka persen memiliki arti penerimaan pajak sebagai persentasi redistribusi. Misalkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota adalah 33% penerimaan redistribusi daerah kabupaten/kota. Dilihat dari sisi yang lain, dapat dikatakan bahwa penerimaan redistribusi daerah adalah lebih dari tiga kali lipat penerimaan pajak daerah

Tabel 5.5  
Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Restribusi Pemerintah  
Kabupaten Kota di Indonesia

	Pajak Daerah	Restribusi	Pajak Daerah Sebagai Persentasi Restribusi
Sumatera	1.376.124.876	1.163.403.241	118,3
Jawa	6.990.551.910	3.075.015.386	227,3
Bali+NTT	570.173.225	615.055.353	92,7
Kalimantan	283.806.782	31.695.4649	89,5
Sulawesi	220.030.274	804.569.614	27,3
Maluku+Papua	76.217.364	110.22.1542	69,1
Indonesia	9.516.904.431	6.085.219.785	156,4

Sumber : BPS berbagai tahun

Data pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa pada Tahun 2007, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan adalah 56% lebih besar dari penerimaan retribusi kabupaten/kota. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota masih lebih besar dari retribusi. Di Pulau Jawa, penerimaan pajak daerah adalah lebih dari dua kali lipat dari penerimaan retribusi. Tetapi untuk wilayah-wilayah lain, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota lebih rendah dari penerimaan retribusi. Bahkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Wilayah Sulawesi hanya sekitar seperempat penerimaan retribusi.

### **Porsi Sektor Modern**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel porsi sektor modern dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penerimaan pajak riil. Bila porsi sektor modern di kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$  naik 1% maka penerimaan pajak riil di kabupaten/kota  $i$  pada tahun yang sama akan turun sebesar 1,65%. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak kabupaten/kota, sensitif terhadap perkembangan peranan output sektor manufaktur dan jasa dalam PDRB.

Membesarnya peranan sektor modern mempunyai implikasi semakin banyaknya jumlah dan beragamnya basis pajak atau obyek dan subyek pajak. Data menunjukkan bahwa selama periode 2000-2007 porsi sektor modern (industri

dan jasa) untuk wilayah-wilayah kabupaten umumnya kurang dari 50%. Sementara itu untuk wilayah-wilayah perkotaan porsi sektor modern rata-rata lebih dari 80%. Persoalannya adalah struktur dan kualitas sektor modern tersebut. Misalkan porsi sektor modern di Kota Kediri pada tahun 2007 dapat dikatakan mencapai 100% (99,8%), tetapi industri utamanya adalah rokok. Penerimaan utama dari industri rokok yaitu cukai tembakau, dipungut oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, sekalipun perekonomian kabupaten/kota semakin modern, namun kontrol pemerintah pusat terhadap pajak besar dan gemuk yaitu PPh dan PPN atau PPN-BM masih tetap besar.

Angka koefisien regresi yang elastis, seperti disampaikan sebelumnya dapat dilihat dari dua sisi.

Yang pertama, nilai awal penerimaan pajak riil di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada awalnya sangat rendah, sehingga kenaikan penerimaan pajak riil dalam besaran sepuluh miliar rupiah saja menyebabkan kenaikan persentasi yang relatif tinggi. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik sektor jasa di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur yang umumnya berskala kecil, seperti hotel non bintang dan losmen, rumah-rumah makan serta warung dan industri-industri kecil. Umumnya penerimaan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2000 relatif rendah. Dari 25 kabupaten/kota yang diteliti ada 12 kabupaten/kota yang penerimaan pajak riilnya pada tahun 2000 lebih rendah dari Rp.25 miliar/tahun. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang penerimaan pajak riil pada tahun 2000 lebih rendah dari Rp10 miliar. Diantaranya adalah Kota Blitar (Rp6,2 miliar), Kabupaten Mojokerto (Rp.9,7 miliar), Kabupaten Pamekasan (Rp.7,5 miliar) dan Kabupaten Sidoarjo (8,3 miliar). Selama periode 2000-2005 penerimaan pajak kab/kota di Jawa Timur umumnya meningkat sekitar 200%. Misalkan penerimaan pajak riil Kota Blitar tahun 2000 adalah Rp.19,9 miliar, tetapi pada tahun 2005 menjadi Rp53,0 miliar. Kabupaten Lumajang dari Rp.19,3 miliar di tahun 2000 menjadi Rp.57 miliar tahun 2005. Kabupaten Bojonegoro dari Rp.9,6 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp.53,5 miliar pada tahun 2005.

Yang kedua, UU No.34/2000 menyatakan bahwa pajak-pajak daerah yang berhubungan dengan perkembangan sektor modern, yaitu pajak-pajak; hotel,

**Universitas Indonesia**



restoran, hiburan, reklame dan perparkiran dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Perkembangan penerimaan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2000-2007 menyiratkan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah (UU No.22/1999), pemerintah kabupaten/kota giat memungut/menggarap pajak-pajak daerahnya.

Selanjutnya, manfaat kemajuan ekonomi kabupaten/kota terhadap penerimaan pajak bagi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diteliti khususnya maupun di seluruh Indonesia, diperoleh lewat penerimaan bagi hasil pajak. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk seluruh provinsi di Indonesia, pendapatan BHP kabupaten/kota adalah lebih besar dari pendapatan pajak daerah, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6  
Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Bagi Hasil Pajak  
Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2007

	Pajak Daerah	BHP	Pajak Daerah Sebagai Persentasi BHP
Sumatera	1.376.124.876	4.848.355.297	28,4
Jawa	6.990.551.910	5.165.442.488	135,3
Bali+NT	570.173.225	626.939.698	90,9
Kalimantan	283.806.782	2.199.359.676	12,9
Sulawesi	220.030.274	1.162.115.333	18,9
Maluku+Papua	76.217.364	1.307.600.614	5,8
Indonesia	9.516.904.431	15.309.813.106	62,2

Sumber: Diolah dari BPS: Statistik Keuangan Daerah Provinsi

Secara nasional, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota hanya sekitar 62% penerimaan BHP. Hanya kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa yang penerimaan pajak daerahnya rata-rata lebih besar dari penerimaan BHP. Sementara itu untuk Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota adalah 91% penerimaan BHP.

Besarnya peranan penerimaan pajak daerah dibanding dengan bagi hasil pajak di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan juga Bali serta NTT, kelihatannya berkaitan dengan fakta bahwa umumnya wilayah-wilayah tersebut miskin dengan sumber daya alam. Untuk Jawa Timur, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota

adalah 135,3% penerimaan BHP. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur harus mengandalkan pertumbuhan penerimaan pajaknya dari kemajuan sektor industri dan jasa.

Untuk wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku/Papua, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota maksimal hanya seperempat penerimaan BHP. Bahkan untuk Maluku dan Papua penerimaan pajak daerah kabupaten/kota hanya 5% total penerimaan BHP. Rendahnya peranan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota dibanding dengan penerimaan BHP di wilayah luar Jawa kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya taraf kemajuan ekonomi (dalam hal ini untuk wilayah Sulawesi) dan atau besarnya kekayaan alam (dalam hal ini untuk wilayah Kalimantan dan Papua).

### **Harga Bahan Bakar Minyak**

Hasil regresi menunjukkan bahwa harga BBM berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat penerimaan pajak riil kabupaten/kota. Bila harga rata-rata BBM naik sebesar 1% maka *ceteris paribus* penerimaan pajak riil kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diteliti akan turun sebesar 0,11%.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap penerimaan pajak riil kabupaten/kota berbeda dengan dampak kenaikan harga BBM terhadap penerimaan pajak riil provinsi. Bila pada tingkat provinsi kenaikan harga BBM menaikkan penerimaan pajak riil, maka pada tingkat kabupaten/kota justru menurunkan pendapatan pajak riil. Perbedaan dampak tersebut berhubungan dengan perbedaan struktur penerimaan pajak. Pada tingkat provinsi penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan pajak yang berhubungan dengan penggunaan atau kepemilikan kendaraan bermotor termasuk yang di atas air. Pada tingkat kabupaten/kota penerimaan pajak di dominasi oleh pajak penerangan jalan.

Besarnya porsi penerimaan pajak penerangan jalan pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang lain, seperti hotel, hiburan, reklame, galian dan parkir peranannya relatif kecil. Sektor usaha hotel, hiburan, reklame dan galian dapat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM melalui kenaikan harga biaya produksi. Namun rendahnya pengaruh negatif kenaikan

**Universitas Indonesia**

harga BBM menunjukkan bahwa intensitas penggunaan BBM untuk kegiatan usaha di Kabupaten/Kota Jawa Timur memang tidaklah besar. Selain itu kenaikan harga BBM juga menyebabkan kenaikan biaya produksi yang mengurangi dampak positif penerimaan pajak akibat kenaikan TDL.

### **Nilai Tukar Nominal Rupiah**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel nilai tukar nominal rupiah terhadap US\$ berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil. Bila nilai tukar rupiah pada tahun  $t$  melemah sebesar 1% maka penerimaan pajak riil kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama akan naik sebesar 0,57%. Sekalipun hubungan antara perubahan nilai tukar dengan penerimaan pajak kabupaten/kota sifatnya tidak langsung dan data-data yang tersedia relatif sedikit. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa nilai tukar nominal berpengaruh terhadap penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota. Angka koefisien regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak riil kabupaten/kota di Jawa Timur kurang sensitif terhadap perubahan nilai tukar nominal rupiah.

Pelemahan nilai tukar secara teoritis akan menaikkan ekspor dan menurunkan impor, sehingga selanjutnya menstimulir aktivitas perekonomian dan akhirnya akan menaikkan penerimaan pajak riil. Namun dalam konteks Indonesia, BPS tidak mempunyai laporan tentang struktur PDRB kabupaten/kota menurut pengeluaran agregat, sehingga tidak dapat ditelusuri komponen pengeluaran mana misalnya konsumsi atau investasi khususnya ekspor neto yang berubah, terkait dengan perubahan nilai tukar riil. Melemahnya nilai tukar akan mendorong ekspor yang berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur, misalnya produk-produk industri (pakaian, barang elektronik dan rokok), produk-produk pertanian maupun jasa. Peningkatan ekspor tersebut berarti peningkatan aktivitas ekonomi dan atau perluasan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan penerimaan pajak kabupaten/kota.

Data BPS (2010) menunjukkan bahwa volume ekspor melalui pelabuhan laut Tanjung Perak di Kota Surabaya merupakan peringkat kedua terbesar di Indonesia. Misalnya data Maret 2010 menunjukkan volume ekspor dari pelabuhan

Tanjung Perak sebanyak 594.000 ton adalah nomor dua terbesar setelah Pelabuhan Tanjung Priok, yang volume ekspornya sebesar 1.033.326 ton. Peringkat kedua terbesar volume ekspor juga terlihat pada data yang lebih panjang, misalnya sejak tahun 2000. Volume ekspor per Maret melalui Pelabuhan Tanjung Perak, selama periode 2000-2006 mengalami stagnasi atau pertumbuhan sekitar 0% per tahun. Sedangkan selama periode 2006-2010 mengalami pertumbuhan 3,7%. Peningkatan volume ekspor inilah yang secara teoritis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Rendahnya dampak kenaikan pajak riil pada saat nilai tukar rupiah melemah disebabkan adanya dampak kontraktif dari melemahnya nilai tukar rupiah melalui melemahnya daya impor perekonomian kabupaten/kota. Karena sebagian besar impor Indonesia berkaitan dengan impor barang modal dan bahan baku, maka melemahnya nilai tukar rupiah yang menurunkan kemampuan impor bahan baku yang pada akhirnya *ceteris paribus* dapat menurunkan produksi sektor manufaktur.

Data BPS (2010) menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2010 terlihat kecenderungan bahwa volume impor melalui Pelabuhan Tanjung Perak lebih besar dari volume ekspor. Misalkan pada tahun 2006, volume ekspor pada bulan Maret hanya 518.534 ton, sedangkan volume impor sebanyak 754.182 ton. Namun nilai ekspor neto yang negatif tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai defisit neraca perdagangan yang berkaitan dengan perubahan nilai tukar. Sebab ekspor-impor pada tingkat provinsi menurut BPS (2010) terdiri atas ekspor-impor antar provinsi dengan luar negeri (antar negara). Bila porsi ekspor-impor antar negara sangat besar, maka ekspor neto yang negatif memberikan gambaran tentang defisit perdagangan. Misalkan, Provinsi Yogyakarta komponen ekspor-impor antara negara hanya sekitar 10%. Sayangnya tidak semua provinsi melaporkan ekspor-impor antar negaranya.

## **Tarif Dasar Listrik Jawa Timur**

Hasil regresi menunjukkan bahwa pada periode kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur naik sebesar 1,12%. Artinya penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sensitif terhadap kenaikan TDL. Dalam konteks pemerintah kabupaten/kota hasil regresi ini dapat dipahami, karena sekitar 90% penerimaan pajak berasal dari pajak penerangan jalan.

UU No.34/2000, pasal 60 ayat 1 menyatakan penentuan besarnya pajak penerangan jalan adalah besarnya konsumsi listrik (tagihan listrik) PLN dan tarif yang batas maksimalnya 10%. Sedangkan dasar pengenaannya Nilai Jual Tenaga Listrik atau tagihan listrik yaitu biaya beban dan biaya pemakaian KWH. Untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik ditetapkan 30%. Ketentuan-ketentuan di atas menyebabkan penerimaan pajak penerangan jalan sangat ditentukan oleh jumlah penggunaan listrik dan tarif listrik.

Pada awal tahun 2003 pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dengan alasan mengurangi besarnya subsidi listrik melalui peningkatan penerimaan PLN. Kenaikan tarif dasar listrik tersebut meningkatkan penerimaan PLN, karena permintaan listrik cenderung bersifat inelastis. Selanjutnya kenaikan penerimaan PLN akan menaikkan penerimaan pajak penerangan jalan karena menurut UU No.34/2000, besarnya pajak penerangan jalan ditentukan berdasarkan tagihan listrik PLN.

Pada Desember tahun 2002, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/36/MEM/2002 tentang Ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang sifatnya membenarkan atas sistem manajemen tarif dasar listrik.

Keputusan-keputusan di atas menyebabkan bahwa selama periode 2000-2005 TDL termasuk di Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, keterkaitan antara kenaikan TDL dengan kenaikan

**Universitas Indonesia**

penerimaan pajak penerangan jalan umum, dapat dijelaskan dari sifat konsumsi listrik yang inelastis. Secara teoritis bila harga listrik naik 10%, maka jumlah listrik yang diminta akan turun tetapi kurang dari 10%. Inelastisnya permintaan suatu komoditi termasuk listrik khususnya dalam jangka pendek ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pengguna (konsumen) sangat banyak, sulit dicari substitusinya dan porsi belanja listrik dalam total belanja rumah tangga atau perusahaan, relatif kecil (Case dan Fair, 2007).

Data Kementrian ESDM tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 90% dari jumlah pelanggan PLN adalah rumah tangga yang mengkonsumsi 40% total penjualan listrik PLN. Peringkat kedua pengguna listrik terbesar adalah industri yang menggunakan 38% listrik yang dijual PLN. Data-data ini menunjukkan bahwa permintaan listrik di Indonesia termasuk di Jawa Timur adalah inelastis. Bila TDL naik 10% maka pengguna listrik khususnya rumah tangga tidak akan menurunkan konsumsi listriknya dalam persentasi yang besar. Atau bila TDL naik 10%, maka konsumsi listrik akan turun kurang dari 10%. Demikian halnya dengan industri, kenaikan TDL tidak akan menurunkan penggunaan listrik dalam jumlah besar selama pasar barang/jasa masih terus tumbuh. Akibatnya, kenaikan TDL justru akan menyebabkan kenaikan belanja listrik yang pada akhirnya bila diasumsikan tarif pajak tidak berubah, maka penerimaan pajak penerangan jalan umum akan meningkat.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

##### 6.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Riil

Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan penerimaan nominal pajak relatif tinggi, namun laju inflasi yang relatif tinggi menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lamban. Walaupun sudah ada perbaikan rasio pajak pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diteliti, namun pola bahwa bila tingkat pemerintahannya makin rendah maka rasio pajaknya makin rendah masih tetap terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan masalah ketimpangan vertikal dalam hal penerimaan pajak. Selain ketimpangan vertikal, Indonesia juga masih menghadapi masalah ketimpangan horisontal. Hal itu ditunjukkan oleh masih bervariasinya rasio pajak antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Hal ini kelihatannya berkaitan dengan belum membaiknya ketimpangan antara daerah atau sektor di Indonesia.

Dua perkembangan positif yang terlihat adalah; (1) makin besarnya peranan penerimaan pajak langsung pada tingkat pemerintah pusat yang saat ini sudah melebihi angka 50%. Hal ini diharapkan memperbaiki dimensi keadilan pemungutan pajak. (2) makin besarnya peranan penerimaan pajak daerah dalam PAD, yang umumnya juga sudah lebih besar dari 50%. Hal ini menunjukkan makin baiknya kemandirian fiskal pemerintah provinsi.

## **6.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Riil**

### **A. Potensi Penerimaan Pajak**

#### **Pendapatan Riil per Kapita**

Variabel pendapatan riil per kapita diukur dengan output agregat riil (PDB dan PDRB harga konstan 2000) per penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat dan provinsi dengan arah positif. Bila pendapatan riil per kapita tumbuh, maka penerimaan pajak riil meningkat. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Namun angka koefisien regresi yang lebih kecil dari satu menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak kurang sensitif (tidak elastis) terhadap pertumbuhan pendapatan riil per kapita. Inelastisnya penerimaan pajak riil terhadap pendapatan per kapita, menunjukkan bahwa penggarapan potensi pajak dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak masih harus terus diperbaiki.

Pada tingkat kabupaten/kota pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesa. Hal ini disebabkan bahwa secara keseluruhan pendapatan per kapita di kabupaten/kota yang diobservasi masih sangat rendah dan sampai sekarang pajak-pajak besar serta gemuk masih dikontrol oleh pemerintah pusat.

#### **Porsi Output Sektor Industri dan Jasa**

Porsi output sektor industri dan jasa terhadap total produksi agregat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil kabupaten/kota. Sedangkan pada tingkat pemerintah provinsi arah pengaruhnya negatif. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan UU N0.34/2000 pajak-pajak yang berhubungan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yaitu pajak-pajak: hotel, restoran, hiburan, reklame dan parkir dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.



## **B. Kebijakan Publik**

Variabel-variabel yang menggambarkan kebijakan publik adalah harga BBM, Tarif Dasar listrik, Reformasi Pajak tahun 2000 dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan mulai tahun 2001.

### **Harga BBM**

Harga BBM yang diukur dengan harga rata-rata bensin dan solar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil. Pada tingkat pemerintah pusat dan kabupaten/kota arah pengaruhnya negatif, yaitu bila harga BBM naik maka penerimaan pajak riil menurun. Pada tingkat pemerintah pusat dan kabupaten/kota, kenaikan harga BBM cenderung bersifat kontraktif karena mempengaruhi atau mengganggu sisi penawaran agregat (*supply shock*). Namun pada tingkat provinsi, pengaruh positif kenaikan harga BBM terhadap penerimaan pajak riil berhubungan dengan struktur penerimaan pajak pemerintah provinsi yang lebih dari 80% berasal dari pajak yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak BBM.

### **Otonomi Daerah**

Variabel otonomi daerah yang efektif dilaksanakan pada tahun 2001 berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat dan provinsi. Dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap penerimaan pajak riil terlihat lebih besar pada tingkat provinsi. Namun besar kenaikannya yang kurang dari 1% menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap penerimaan pajak riil tidak besar.

### **Reformasi Pajak Tahun 2000**

Pelaksanaan Reformasi Pajak Tahun 2000 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil. Pada pemerintah pusat arah pengaruhnya negatif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pajak

tahun 2000 belum berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak nasional. Pada tingkat pemerintah provinsi, arah pengaruhnya positif. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Namun nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa dampak reformasi pajak tahun 2000 terhadap penerimaan pajak riil pemerintah provinsi tidak besar.

Faktor yang menyebabkan reformasi pajak di tingkat pemerintah pusat, tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak adalah cakupan reformasi pajak yang relatif luas dan kompleks, sehingga keberhasilannya kemungkinan baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Faktor yang menyebabkan reformasi pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak provinsi adalah karena reformasi tersebut memungkinkan pemerintah provinsi melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dampak kenaikan pajak yang relatif kecil, menunjukkan bahwa reformasi pajak belum berhasil sepenuhnya memperdalam dan memperbesar basis pajak provinsi.

### **Kenaikan Tarif Dasar Listrik Jawa Timur**

Analisis pengaruh variabel kenaikan TDL terhadap penerimaan pajak riil, hanya dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.

Variabel kenaikan tarif dasar listrik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Nilai koefisien regresi yang lebih besar dari satu menunjukkan penerimaan pajak riil kabupaten/kota sensitif terhadap kenaikan TDL. Hasil ini berhubungan dengan struktur penerimaan pajak pada tingkat kabupaten/kota yang sekitar 90% berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil ini juga menyiratkan bahwa permintaan listrik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah inelastis.

### **C. Faktor-Faktor Lainnya**

Variabel-variabel yang menggambarkan faktor-faktor lainnya adalah variabel penerimaan pajak setahun sebelumnya, krisis ekonomi 1997-1999 dan nilai tukar nominal rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat yaitu dolar Amerika Serikat (US\$).

#### **Penerimaan Pajak Riil Setahun Sebelumnya**

Penerimaan pajak riil tahun sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak riil tahun  $t$ , baik pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Secara psikologis, kenaikan penerimaan pajak pada satu periode akan menimbulkan ekspektasi bahwa penerimaan pajak pada periode berikutnya akan naik. Ekspektasi akan menguat bila pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, karena menyebabkan basis pajak meluas dan nilainya membesar. Hanya saja nilai koefisien regresinya jauh lebih kecil dari satu dan nilai koefisien regresi makin rendah bila tingkat pemerintahannya makin rendah. Hasil ini menunjukkan lemahnya keterkaitan antar waktu pada penerimaan pajak riil yang berhubungan dengan persoalan ekspektasi, institusi dan teknis.

#### **Krisis Ekonomi 1997-1999**

Krisis ekonomi 1997-1999 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil. Pada tingkat pemerintah pusat, arah pengaruhnya negatif. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Sedangkan pada pemerintah provinsi arah pengaruhnya positif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesa. Perbedaan arah pengaruh ini menunjukkan perbedaan dampak krisis terhadap perekonomian. Pada pemerintah pusat, krisis ekonomi berdampak kontraktif, sedangkan pada pemerintah daerah krisis memiliki dampak ekspansif melalui peningkatan ekspor.

Pada pemerintah pusat, penurunan penerimaan pajak pada periode krisis, disebabkan dampak kontraktif yang ditimbulkannya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah pada tahun 1997 dan 1999 dan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi

**Universitas Indonesia**

-13%. Selain stagnasi, perekonomian nasional juga mengalami laju inflasi yang tinggi, khususnya tahun 1998 yang menyebabkan penerimaan pajak riil juga menurun. Pada tingkat provinsi, khususnya provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya alam dan provinsi-provinsi yang menghasilkan komoditi pertanian berorientasi ekspor, seperti kopi dan beberapa tanaman perkebunan lainnya, krisis ekonomi yang disertai menurunnya nilai tukar rupiah, justru mendorong ekspor yang menstimulir pertumbuhan ekonomi.

### **Nilai Tukar Nominal Rupiah**

Nilai tukar nominal rupiah diukur dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (Rp/US\$) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak riil. Pada tingkat pemerintah pusat dan kabupaten/kota arah pengaruhnya positif. Bila nilai tukar nominal rupiah melemah, penerimaan pajak riil meningkat. Hasil ini sesuai dengan hipotesa. Relatif kecilnya dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak riil disebabkan adanya dua dampak ganda. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah akan menimbulkan dampak ekspansi karena membesarnya nilai ekspor neto. Namun di sisi yang lain, melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan kemampuan impor barang modal dan terutama bahan baku, sehingga menurunkan output perekonomian, khususnya sektor manufaktur dan jasa.

Pada tingkat pemerintah provinsi pengaruhnya negatif. Bila nilai tukar nominal rupiah melemah, penerimaan pajak riil menurun. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesa. Hasil ini menunjukkan bahwa yang lebih diuntungkan dari melemahnya nilai tukar rupiah adalah pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Secara keseluruhan bila dikaitkan dengan tujuan utama studi yaitu dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan pemerintah kurang berdampak terhadap kenaikan penerimaan pajak riil, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini disebabkan bahwa kebijakan publik yang diputuskan pemerintah belum berhasil memperbaiki efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak secara signifikan. Kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan juga belum berhasil memperbesar dan atau

**Universitas Indonesia**

memperluas basis pajak. Untuk beberapa kebijakan publik, seperti penetapan harga BBM dan kenaikan TDL telah berhasil menaikkan pajak daerah, tetapi lebih disebabkan oleh karakteristik permintaan barang/jasa tersebut. Kenaikan BBM berhasil menaikkan penerimaan pajak daerah provinsi, karena permintaan BBM dalam jangka pendek relatif inelastis. Kenaikan TDL menyebabkan kenaikan penerimaan pajak kabupaten/kota naik, juga lebih disebabkan oleh permintaan listrik yang sifatnya inelastis.

## **6.2. Saran**

### **6.2.1. Saran Studi Lebih Lanjut**

Keterbatasan studi ini adalah kajian yang bervariasi pada beberapa tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di satu sisi, studi memberikan perbandingan yang lebih komprehensif. Namun di sisi lain, analisis tidak dapat dilakukan dengan lebih tajam dan dalam. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota penggunaan data panel memungkinkan menggunakan variabel bebas dengan lebih leluasa atau jumlah yang lebih besar. Namun dalam studi ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data dalam pengertian ketersediaan data, kontinuitas dan konsistensi data. Berdasarkan pengalaman dari studi ini, maka disarankan agar penelitian dilakukan pada satu tingkat pemerintahan tertentu khususnya provinsi atau kabupaten/kota. Selain studi-studi tentang penerimaan pajak pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota masih jarang dilakukan, banyaknya jumlah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia memungkinkan dilakukan analisis dengan menggunakan data *cross section* atau panel. Bila data-data APBD terus diperbaiki, kemungkinan besar pada waktu beberapa tahun kedepan sudah dapat dilakukan studi awal pada kabupaten/kota pemekaran atau studi pada tingkat provinsi dengan memasukkan provinsi-provinsi hasil pemekaran.

Keterbatasan kedua dan juga yang terutama dalam studi ini adalah tidak dimasukkannya variabel efisiensi sistem pemungutan pajak. Studi ini mencoba menangkap faktor efisiensi, secara tidak langsung dengan memasukkan variabel-

variabel dummy yang diperkirakan mempengaruhi tingkat efisiensi sistem perpajakan yaitu reformasi pajak tahun 2000 dan desentralisasi fiskal. Hasil regresi menunjukkan secara tidak langsung bahwa masalah inefisiensi dan efektifitas sistem pemungutan belum teratasi sepenuhnya melalui langkah-langkah reformasi dan otonomi. Namun hasil studi belum dapat mengungkapkan lebih jauh seberapa besar pengaruh efisiensi sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pemerintah. Untuk studi lebih lanjut diharapkan variabel-variabel efisiensi dimasukkan secara eksplisit.

### **6.2.2. Saran Kebijakan**

Ada beberapa saran kebijakan yang akan disampaikan, berdasarkan hasil studi.

#### **▪ Reformasi Pajak yang Lebih Komprehensif dan Cermat**

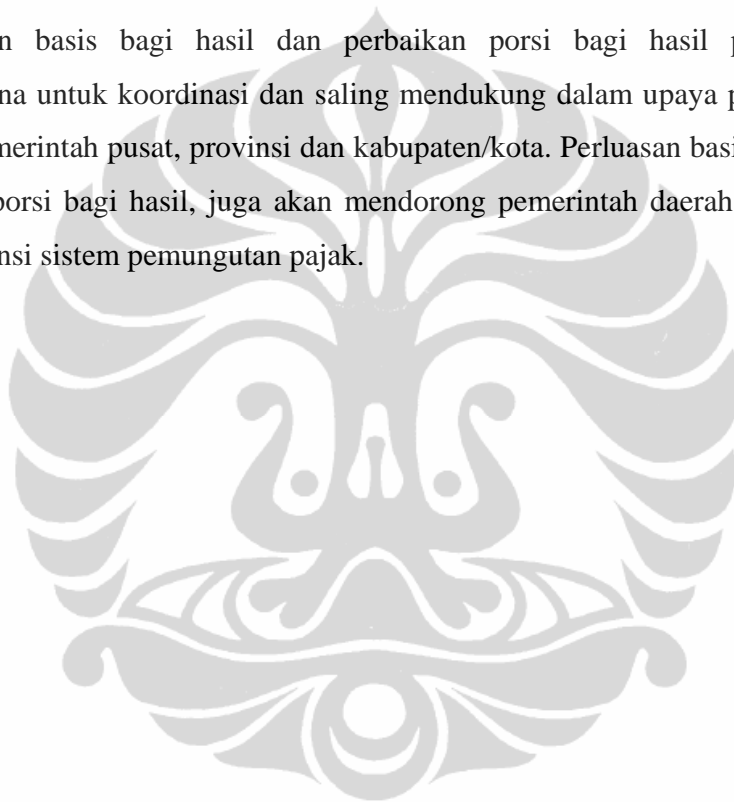
Setelah reformasi pajak tahun 1984, khususnya selama periode reformasi, pemerintah pusat terus menerus melakukan perubahan banyak undang-undang. Namun reformasi yang dilakukan, misalnya reformasi pajak tahun 2000, kurang memberi manfaat bagi penerimaan pajak riil pusat dan provinsi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa langkah-langkah reformasi belum dapat sepenuhnya memperbaiki efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun perluasan dan pendalaman basis pajak. Hal di atas disebabkan tidak ada perubahan yang substansial dalam undang-undang yang diberlakukan. Karena itu disarankan agar perubahan undang-undang dilakukan secara lebih seksama dan tidak terlalu sering. Dengan demikian reformasi pajak yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan cermat.

#### **• Perluasan Basis Bagi Hasil dan Perbaikan Porsi Bagi Hasil Pajak**

Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi kurang bermanfaat bagi peningkatan penerimaan pajak riil khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan pajak-pajak besar, gemuk dan mudah dipungut masih dikontrol oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hal ini maka perluasan pajak-pajak yang biasa dipungut selama ini, seperti yang telah berlangsung minimal selama sekitar satu generasi terakhir, tidak akan memperbaiki penerimaan pajak riil pemerintah

kabupaten/kota, secara mencolok. Karena itu disarankan agar dilakukan perluasan basis Bagi Hasil Pajak (BHP) dan porsi bagiannya terutama pada PPh dan PPN. Kebijakan ini akan meningkatkan motivasi pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian. Kebijakan tersebut juga akan menolong daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, untuk mengelola potensi ekonomi mereka khususnya industri dan jasa non migas.

Perluasan basis bagi hasil dan perbaikan porsi bagi hasil pajak, juga merupakan sarana untuk koordinasi dan saling mendukung dalam upaya pemungutan pajak antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perluasan basis bagi hasil dan perbaikan porsi bagi hasil, juga akan mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan efisiensi sistem pemungutan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, berbagai periode penerbitan.
- Bird, Richard, M., Francois Vaillancourt. (2000). *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Sedang Berkembang*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bird, Richard, M., Oliver Oldman. (1990). *Taxation in Developing Countries*. The John Hopkins University Press, United States of America.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Berbagai Tahun. Statistik Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Indonesia 60 Tahun Merdeka*, Jakarta – Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Berbagai Tahun. Jawa Timur Dalam Angka*.
- Bahl, Roy, Richard M. Bird. (2008). *Subnational Taxes in Developing Countries : The Way Forward*. Public Financial Publication, Inc.
- Barber, Sarah, Sri Moertiningsih Adioetomo, Abdillah Ahsan, Diahadi Setyonaluri. (2008). *Ekonomi Tembakau di Indonesia*. Lembaga Demografi FEUI, Depok.
- Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Anggaran. *Himpunan Peraturan Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ekananda, Mahyus. *Persamaan Simultan; Bahan Kuliah Ekonometrika Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*.
- Gunadi, John L. Hutagaol, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan Ilyas, Yoyok Satiotomo (1999). *Perpajakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hill, R. Carter., William E. Griffiths., George G., Judge. (2001). *Undergraduate Econometrics*. John Wiley & Sons, Inc., USA.



- James, Simon., Christopher Nobes. (1992). *The Economics of Taxation*. Prentice Hall International Ltd., UK.
- Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. (2006). *The Indonesian Tax in Brief*.
- Lumbantoruan, Sophar.. (1987). *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Manurung, J.Joni, Adler Hayman Manurung, Ferdinan Dehoutman Saragih. (2005). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo (M)
- Mugrave Richard A., Peggy B Musgrave. (1984). *Public Finance in Theory And Practice*. MCGraw-Hill.
- Mustopadidjaja. Mei (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purnomo, Bambang. (1994). *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Piliang, Indra,J., Dendi Ramdani., Agung Pribadi (Editor). (2003). *Otonomi Daerah: Evaluasi & Proyeksi*. Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
- Pusat Penyuluhan Perpajakan. Maret (2000). *Penataran Perpajakan Untuk Anggota dan Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta.
- Rosen, Harvey S. (1999). *Public Finance 5<sup>th</sup> Edition*. MCGraw-Hill.
- Shah, Anwar, Ziaa Qureshi. 1994. *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*. The International Bank for Reconstruction, Washington, D.C.
- Shah, Anwar. (2005). *Public Sector Governance and Accountability Series; Fiscal Management*. The International Bank for Reconstruction, Washington, D.C.
- Shah, Anwar, (2006). *Local Governance in Developing Countries*. The International Bank for Reconstruction, Washington D.C.

- Shome, Parthasarathi. (1995). Tax Policy Handbook. Tax Policy Division Fiscal Affairs Department International Monetary Fund, Washington D.C.
- Soemitro, Rochmat. (1991). Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum. PT. Eresco Bandung, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2010). Pengantar Ekonometrika, Yogyakarta: BPFE (SM)
- Supranto, J. (1995). Ekonometrik. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supranto, J. (2001). Ekonometrika. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Stiglitz, Joseph E. (1999). Economics of The Public Sector 3<sup>rd</sup> edition. WW. Norton & Company, Inc., New York.
- Studenmund, A.H. (2006). Using Econometrics a Practical Guide. Pearson Education, Inc., Boston.
- Subiyantoro, Heru., Singgih Riphahat. (2004). Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep Dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo Bintoro. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. (2007). Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan Eviews. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- World Bank. Berbagai tahun. Indonesian Country Report.

### **Jurnal**

- Devas, Nick. August (1988). Local Taxation in Indonesia : Opportunities for Reform. Dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.24 No.2.
- SR., Soemarsono. (1998). Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. Dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVI Nomor 3.

**Peraturan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah..

-----, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

-----, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

-----, Berbagai tahun. Nota Keuangan.

## LAMPIRAN

### 1. REGRESI PUSAT

Dependent Variable: LTAXR  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 16:24  
 Sample(adjused): 1972 2008  
 Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.684692	0.577066	1.186505	0.2451
LTAXR(-1)	0.543832	0.127893	4.252235	0.0002
LKURS	0.256384	0.097586	2.627252	0.0136
LYRC	0.853688	0.352721	2.420291	0.0220
KRISIS	-0.407920	0.118637	-3.438400	0.0018
OTO	0.511358	0.135358	3.777815	0.0007
R2000	-0.588253	0.172075	-3.418592	0.0019
LPRATA	-0.148916	0.065787	-2.263613	0.0313
R-squared	0.984584	Mean dependent var	6.636928	
Adjusted R-squared	0.980863	S.D. dependent var	0.803629	
S.E. of regression	0.111170	Akaike info criterion	-1.366700	
Sum squared resid	0.358405	Schwarz criterion	-1.018394	
Log likelihood	33.28395	F-statistic	264.6019	
Durbin-Watson stat	2.272698	Prob(F-statistic)	0.000000	

### Matriks Korelasi

	LTAXR(-1)	LYRC	OTO	KRISIS	R2000	LPRATA	LKURS
LTAXR(-1)	1	0.98	0.63	0.24	0.64	0.93	0.93
LYRC	0.98	1	0.61	0.25	0.63	0.96	0.94
OTO	0.63	0.61	1	-0.16	0.93	0.72	0.71
KRISIS	0.24	0.25	-0.16	1	-0.17	0.14	0.30
R2000	0.64	0.63	0.93	-0.17	1	0.73	0.77
LPRATA	0.93	0.96	0.72	0.14	0.73	1	0.95
LKURS	0.93	0.94	0.71	0.30	0.77	0.95	1

### Nilai Residual untuk Run Test

1971	NA	Run
1972	0.050680	1
1973	0.103127	1
1974	-0.114171	2
1975	0.077251	3
1976	0.081599	3
1977	0.078007	3
1978	-0.025598	4
1979	-0.068050	4
1980	-0.075145	4
1981	-0.201061	4
1982	0.002215	5
1983	-0.104121	6
1984	-0.165987	6
1985	0.067218	7
1986	0.100238	7
1987	-0.081214	8
1988	0.014147	9
1989	0.234426	9
1990	0.045027	9
1991	0.040043	9
1992	-0.010124	10
1993	0.063725	11
1994	-0.033018	12
1995	-0.023375	12
1996	-0.055836	12
1997	0.113847	13
1998	-0.284171	14
1999	0.170324	15
2000	-7.79E-15	16
2001	-0.014462	16
2002	-0.043452	16
2003	-0.003695	16
2004	-0.067980	16
2005	0.039693	17
2006	0.046582	17
2007	0.040268	17
2008	0.003047	17

Nilai Residual menunjukkan:

A.20 nilai residual positif (N1)

B.17 nilai residual negatif (N2)

C.17 Run

Berdasarkan Tabel D6A dan D6B Gujarati, jumlah run yang dalam batas toleransi adalah 13-26. Jadi dapat disimpulkan tidak ada masalah otokorelasi

## 2. REGRESI PROVINSI

### Regressi tanpa Cross Section Weight

Dependent Variable: LTAXR?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:02  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 286

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.905865	0.025597	35.38948	0.0000
LYRC?	0.110882	0.056401	1.965953	0.0503
OTO?	0.772323	0.120573	6.405446	0.0000
KRISIS?	-0.356661	0.112558	-3.168680	0.0017
R2000?	-0.560399	0.149904	-3.738376	0.0002
LKURS?	0.392005	0.078677	4.982482	0.0000
LPRATA?	-0.304198	0.085762	-3.547011	0.0005
LPORMO?	0.196855	0.116579	1.688603	0.0924
R-squared	0.943873	Mean dependent var	20.49822	
Adjusted R-squared	0.942460	S.D. dependent var	1.876464	
S.E. of regression	0.450119	Sum squared resid	56.32468	
F-statistic	667.8624	Durbin-Watson stat	2.113646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Heteroskedastisitas Metode Park

Dependent Variable: LRESIDK?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:07  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 286

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.341749	0.121578	-2.810943	0.0053
LYRC?	0.480865	0.267889	1.795019	0.0737
OTO?	-1.629079	0.572685	-2.844634	0.0048
KRISIS?	0.573479	0.534618	1.072690	0.2843
R2000?	1.511811	0.712000	2.123329	0.0346
LKURS?	0.930631	0.373691	2.490378	0.0133
LPRATA?	-0.095525	0.407343	-0.234507	0.8148
LPORMO?	-1.516469	0.553714	-2.738725	0.0066
R-squared	0.197438	Mean dependent var	-4.652036	
Adjusted R-squared	0.177230	S.D. dependent var	2.356968	
S.E. of regression	2.137928	Sum squared resid	1270.664	
F-statistic	9.770100	Durbin-Watson stat	1.866234	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Dependent Variable: LRESABS?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/07/10 Time: 14:06

Sample(adjusted): 1995 2006

Included observations: 12 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 24

Total panel (unbalanced) observations: 286

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.170875	0.060789	-2.810943	0.0053
LYRC?	0.240433	0.133944	1.795019	0.0737
OTO?	-0.814539	0.286342	-2.844634	0.0048
KRISIS?	0.286740	0.267309	1.072690	0.2843
R2000?	0.755906	0.356000	2.123329	0.0346
LKURS?	0.465315	0.186845	2.490378	0.0133
LPRATA?	-0.047762	0.203671	-0.234507	0.8148
LPORMO?	-0.758235	0.276857	-2.738725	0.0066
R-squared	0.197438	Mean dependent var	-2.326018	
Adjusted R-squared	0.177230	S.D. dependent var	1.178484	
S.E. of regression	1.068964	Sum squared resid	317.6661	
F-statistic	9.770100	Durbin-Watson stat	1.866234	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Heteroskedastisitas Metode Koenker-Basset bukan Logaritma

Dependent Variable: RESIDK?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/10/10 Time: 11:28  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 286  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAXR2?	-6.48E-24	3.63E-24	-1.784127	0.0756
Fixed Effects				
_SUMUT--C	0.026053			
_SUMBAR--C	0.374994			
_RIAU--C	0.029847			
_JAMBI--C	0.031460			
_SUMSEL--C	0.034385			
_BNGKLU--C	0.006922			
_LAMPUNG--C	0.020834			
_JABAR--C	0.043429			
_JATENG--C	0.015972			
_DIY--C	0.036183			
_JATIM--C	0.021340			
_KALBAR--C	0.263935			
_KALTENG--C	0.035674			
_KALSEL--C	0.017067			
_KALTIM--C	0.041930			
_SULUT--C	0.024568			
_SULTENG--C	0.020864			
_SULSEL--C	0.031061			
_SULTRA--C	0.039965			
_BALI--C	0.061883			
_NTB--C	0.027045			
_NTT--C	0.032208			
_MALUKU--C	0.267665			
_PAPUA--C	2.137113			

#### Weighted Statistics

R-squared	0.054868	Mean dependent var	0.578518
Adjusted R-squared	-0.032040	S.D. dependent var	0.867665
S.E. of regression	0.881455	Sum squared resid	202.7874
F-statistic	0.631331	Durbin-Watson stat	2.136765
Prob(F-statistic)	0.910373		

#### Unweighted Statistics

R-squared	0.202478	Mean dependent var	0.151903
Adjusted R-squared	0.129143	S.D. dependent var	0.947711
S.E. of regression	0.884402	Sum squared resid	204.1454
Durbin-Watson stat	1.629155		



### Uji Heteroskedastisitas Metode Koenker-Basset Logaritma

Dependent Variable: LRESIDK?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/10/10 Time: 11:31  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 286  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR2?	-0.076947	0.041054	-1.874265	0.0620
Fixed Effects				
_SUMUT--C	-1.496900			
_SUMBAR--C	-0.320950			
_RIAU--C	-1.391326			
_JAMBI--C	-2.243862			
_SUMSEL--C	-1.153243			
_BNGKLU--C	-3.120882			
_LAMPUNG--C	-2.280970			
_JABAR--C	-1.808025			
_JATENG--C	-2.162996			
_DIY--C	-2.046834			
_JATIM--C	-2.160922			
_KALBAR--C	-0.734836			
_KALTENG--C	-1.077714			
_KALSEL--C	-2.960809			
_KALTIM--C	-1.289233			
_SULUT--C	-1.612806			
_SULTENG--C	-1.990848			
_SULSEL--C	-1.594818			
_SULTRA--C	-2.297303			
_BALI--C	-0.712756			
_NTB--C	-1.063044			
_NTT--C	-1.811519			
_MALUKU--C	-0.514039			
_PAPUA--C	1.773322			

#### Weighted Statistics

R-squared	0.276753	Mean dependent var	-4.913217
Adjusted R-squared	0.210248	S.D. dependent var	2.478816
S.E. of regression	2.202874	Sum squared resid	1266.543
F-statistic	4.161364	Durbin-Watson stat	1.912403
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Unweighted Statistics

R-squared	0.199871	Mean dependent var	-4.652036
Adjusted R-squared	0.126295	S.D. dependent var	2.356968
S.E. of regression	2.203109	Sum squared resid	1266.813
Durbin-Watson stat	1.948584		

### Regresi Provinsi dengan Fixed Effect dan Cross Section Weight

Dependent Variable: LTAXR?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:09  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 286  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.397978	0.045575	8.732421	0.0000
LYRC?	0.772480	0.106902	7.226029	0.0000
OTO?	0.736203	0.047265	15.57618	0.0000
KRISIS?	0.360255	0.105017	3.430452	0.0007
R2000?	0.376533	0.145415	2.589366	0.0102
LKURS?	-0.464769	0.113495	-4.095057	0.0001
LPRATA?	0.284759	0.073639	3.866945	0.0001
LPORMO?	-0.333911	0.184308	-1.811703	0.0712
Fixed Effects				
_SUMUT—C	14.82062			
_SUMBAR—C	13.97314			
_RIAU—C	13.65900			
_JAMBI—C	14.11118			
_SUMSEL—C	14.28768			
_BNGKLU—C	13.63563			
_LAMPUNG—C	14.47975			
_JABAR—C	15.55860			
_JATENG—C	15.49591			
_DIY—C	14.32126			
_JATIM—C	15.46935			
_KALBAR—C	13.88040			
_KALTENG—C	13.21290			
_KALSEL—C	13.99453			
_KALTIM—C	12.99435			
_SULUT—C	13.84030			
_SULTENG—C	13.70793			
_SULSEL—C	14.62732			
_SULTRA—C	13.46525			
_BALI—C	14.56624			
_NTB—C	14.02997			
_NTT—C	13.96873			
_MALUKU—C	13.49770			
_PAPUA—C	12.49909			

Weighted Statistics			
R-squared	0.999598	Mean dependent var	42.42783
Adjusted R-squared	0.999549	S.D. dependent var	18.22856
S.E. of regression	0.387272	Sum squared resid	38.09484
F-statistic	20360.15	Durbin-Watson stat	2.025990
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.956552	Mean dependent var	20.49822
Adjusted R-squared	0.951249	S.D. dependent var	1.876464
S.E. of regression	0.414317	Sum squared resid	43.60120
Durbin-Watson stat	1.742242		

Jika menggunakan random effect, hasilnya near singular matriks

### Uji Multikolinearitas tanpa Fixed Effect dan Cross Section Weight

Dependent Variable: LYRC?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:14  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.209150	0.024068	8.689945	0.0000
OTO?	-0.043048	0.127671	-0.337184	0.7362
KRISIS?	0.252853	0.118322	2.136998	0.0335
R2000?	0.490413	0.156135	3.140958	0.0019
LKURS?	0.093851	0.083174	1.128367	0.2601
LPRATA?	0.064177	0.090806	0.706750	0.4803
LPORMO?	-1.044020	0.106632	-9.790846	0.0000
R-squared	0.635338	Mean dependent var	1.523707	
Adjusted R-squared	0.627524	S.D. dependent var	0.781605	
S.E. of regression	0.477020	Sum squared resid	63.71337	
F-statistic	81.30576	Durbin-Watson stat	0.170040	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: OTO?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:15  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.006375	0.012686	0.502503	0.6157
LYRC?	-0.009428	0.027962	-0.337184	0.7362
KRISIS?	0.197241	0.054565	3.614788	0.0004
R2000?	0.801880	0.056841	14.10731	0.0000
LKURS?	-0.274668	0.035392	-7.760657	0.0000
LPRATA?	0.344112	0.037233	9.242154	0.0000
LPORMO?	-0.034725	0.057781	-0.600978	0.5483
R-squared	0.805510	Mean dependent var	0.498258	
Adjusted R-squared	0.801342	S.D. dependent var	0.500870	
S.E. of regression	0.223243	Sum squared resid	13.95450	
F-statistic	193.2768	Durbin-Watson stat	2.471820	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

Dependent Variable: KRISIS?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:16  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.006596	0.013582	-0.485664	0.6276
LYRC?	0.063468	0.029700	2.136998	0.0335
OTO?	0.226048	0.062534	3.614788	0.0004
R2000?	-0.915113	0.057826	-15.82524	0.0000
LKURS?	0.439112	0.032492	13.51462	0.0000
LPRATA?	-0.270568	0.042567	-6.356239	0.0000
LPORMO?	-0.302863	0.059191	-5.116701	0.0000
R-squared	0.703497	Mean dependent var	0.250871	
Adjusted R-squared	0.697144	S.D. dependent var	0.434272	
S.E. of regression	0.238990	Sum squared resid	15.99255	
F-statistic	110.7237	Durbin-Watson stat	1.114990	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LKURS?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:18  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.009699	0.019433	-0.499117	0.6181
LYRC?	0.048232	0.042745	1.128367	0.2601
OTO?	-0.644495	0.083046	-7.760657	0.0000
R2000?	1.117490	0.092249	12.11384	0.0000
KRISIS?	0.899051	0.066524	13.51462	0.0000
LPRATA?	0.725279	0.048647	14.90908	0.0000
LPORMO?	0.788483	0.074991	10.51432	0.0000
R-squared	0.573876	Mean dependent var	8.822375	
Adjusted R-squared	0.564744	S.D. dependent var	0.518337	
S.E. of regression	0.341967	Sum squared resid	32.74362	
F-statistic	62.84753	Durbin-Watson stat	0.755408	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

Dependent Variable: LPRATA?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:19  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.122593	0.016258	7.540461	0.0000
LYRC?	0.027747	0.039260	0.706750	0.4803
OTO?	0.679293	0.073499	9.242154	0.0000
R2000?	-0.538710	0.099372	-5.421121	0.0000
KRISIS?	-0.466047	0.073321	-6.356239	0.0000
LKURS?	0.610168	0.040926	14.90908	0.0000
LPORMO?	-0.176983	0.080544	-2.197355	0.0288
R-squared	0.801940	Mean dependent var	7.074760	
Adjusted R-squared	0.797696	S.D. dependent var	0.697356	
S.E. of regression	0.313658	Sum squared resid	27.54679	
F-statistic	188.9526	Durbin-Watson stat	0.785884	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LPORMO?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 14:20  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.114607	0.011189	10.24298	0.0000
LYRC?	-0.244289	0.024951	-9.790846	0.0000
OTO?	-0.037098	0.061730	-0.600978	0.5483
R2000?	-0.379546	0.073421	-5.169412	0.0000
KRISIS?	-0.282329	0.055178	-5.116701	0.0000
LKURS?	0.358998	0.034144	10.51432	0.0000
LPRATA?	-0.095783	0.043590	-2.197355	0.0288
R-squared	0.326255	Mean dependent var	4.115770	
Adjusted R-squared	0.311818	S.D. dependent var	0.278152	
S.E. of regression	0.230746	Sum squared resid	14.90824	
F-statistic	22.59792	Durbin-Watson stat	0.167553	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

Dependent Variable: R2000?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 18:24  
 Sample(adjusted): 1995 2006  
 Included observations: 12 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.008444	0.010190	-0.828638	0.4080
LYRC?	0.069401	0.022095	3.140958	0.0019
LPORMO?	-0.229547	0.044405	-5.169412	0.0000
LPRATA?	-0.176327	0.032526	-5.421121	0.0000
LKURS?	0.307717	0.025402	12.11384	0.0000
OTO?	0.518119	0.036727	14.10731	0.0000
KRISIS?	-0.515930	0.032602	-15.82524	0.0000
R-squared	0.870873	Mean dependent var	0.581882	
Adjusted R-squared	0.868106	S.D. dependent var	0.494111	
S.E. of regression	0.179448	Sum squared resid	9.016425	
F-statistic	314.7334	Durbin-Watson stat	1.646388	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Multikolinieritas dengan Fixed Effect dan Cross Section Weight

Dependent Variable: LPORMO?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:21  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.025278	0.005644	-4.478447	0.0000
LYRC?	-0.024022	0.015624	-1.537511	0.1254
OTO?	-0.002791	0.007222	-0.386496	0.6995
R2000?	0.051196	0.020881	2.451738	0.0149
KRISIS?	0.036383	0.014859	2.448508	0.0150
LKURS?	-0.018061	0.015451	-1.168928	0.2435
LPRATA?	0.033936	0.010032	3.382815	0.0008
Fixed Effects				
_SUMUT--C	4.723156			
_SUMBAR--C	4.713418			
_RIAU--C	4.015619			
_JAMBI--C	4.542001			
_SUMSEL--C	4.526946			
_BNGKLU--C	4.522402			
_LAMPUNG--C	4.508431			
_JABAR--C	4.884691			
_JATENG--C	4.831596			
_DIY--C	4.827545			
_JATIM--C	4.875484			
_KALBAR--C	4.729273			
_KALTENG--C	4.455512			
_KALSEL--C	4.531146			
_KALTIM--C	4.552229			
_SULUT--C	4.644798			
_SULTENG--C	4.389086			
_SULSEL--C	4.499865			
_SULTRA--C	4.513792			
_BALI--C	4.823509			
_NTB--C	4.343030			
_NTT--C	4.455495			
_MALUKU--C	4.545769			
_PAPUA--C	3.579912			

Weighted Statistics			
R-squared	0.999876	Mean dependent var	7.770332
Adjusted R-squared	0.999861	S.D. dependent var	4.986439
S.E. of regression	0.058751	Sum squared resid	0.883630
F-statistic	68665.91	Durbin-Watson stat	0.932425
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.953179	Mean dependent var	4.115770
Adjusted R-squared	0.947692	S.D. dependent var	0.278152
S.E. of regression	0.063616	Sum squared resid	1.036033
Durbin-Watson stat	0.870819		

(Lanjutan)

Dependent Variable: LYRC?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 18:27  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.136808	0.019726	6.935528	0.0000
R2000?	-0.274036	0.075080	-3.649943	0.0003
LPORMO?	-0.192827	0.113306	-1.701823	0.0900
LPRATA?	0.268224	0.035287	7.601229	0.0000
LKURS?	0.616652	0.048505	12.71328	0.0000
OTO?	-0.026568	0.025710	-1.033392	0.3024
KRISIS?	-0.262952	0.053125	-4.949701	0.0000
Fixed Effects				
_SUMUT—C	-7.480113			
_SUMBAR—C	-7.436993			
_RIAU—C	-6.768771			
_JAMBI—C	-7.665748			
_SUMSEL—C	-7.589926			
_BNGKLU—C	-7.743950			
_LAMPUNG—C	-7.938156			
_JABAR—C	-7.770209			
_JATENG—C	-7.955958			
_DIY—C	-7.578202			
_JATIM—C	-7.699306			
_KALBAR—C	-7.483581			
_KALTENG—C	-7.126114			
_KALSEL—C	-7.406756			
_KALTIM—C	-5.827659			
_SULUT—C	-7.591669			
_SULTENG—C	-7.648509			
_SULSEL—C	-7.937315			
_SULTRA—C	-7.695617			
_BALI—C	-7.423756			
_NTB—C	-7.982413			
_NTT—C	-8.280608			
_MALUKU—C	-8.002055			
_PAPUA—C	-6.876403			
Weighted Statistics				
R-squared	0.987237	Mean dependent var	1.849053	
Adjusted R-squared	0.985741	S.D. dependent var	1.034844	
S.E. of regression	0.123571	Sum squared resid	3.909083	
F-statistic	660.0560	Durbin-Watson stat	1.438409	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.973378	Mean dependent var	1.523707	
Adjusted R-squared	0.970259	S.D. dependent var	0.781605	
S.E. of regression	0.134793	Sum squared resid	4.651319	
Durbin-Watson stat	1.192155			



(Lanjutan)

Dependent Variable: LPRATA?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:22  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.292087	0.025246	11.56975	0.0000
LYRC?	0.687644	0.079332	8.667881	0.0000
OTO?	0.132122	0.041405	3.190989	0.0016
R2000?	-0.396515	0.119535	-3.317132	0.0010
KRISIS?	-0.217470	0.087123	-2.496133	0.0132
LKURS?	-0.055143	0.093895	-0.587285	0.5575
LPORMO?	0.385872	0.155209	2.486142	0.0136
Fixed Effects				
_SUMUT—C	-1.363372			
_SUMBAR—C	-0.904856			
_RIAU—C	-1.445856			
_JAMBI—C	-0.562543			
_SUMSEL—C	-0.832375			
_BNGKLU—C	-0.100986			
_LAMPUNG—C	-0.509877			
_JABAR—C	-1.551488			
_JATENG—C	-1.260184			
_DIY—C	-0.846242			
_JATIM—C	-1.558893			
_KALBAR—C	-0.741916			
_KALTENG—C	-0.569818			
_KALSEL—C	-0.809942			
_KALTIM—C	-2.032486			
_SULUT—C	-0.443834			
_SULTENG—C	-0.293720			
_SULSEL—C	-0.636310			
_SULTRA—C	-0.015160			
_BALI—C	-1.219074			
_NTB—C	-0.104392			
_NTT—C	0.318750			
_MALUKU—C	0.271069			
_PAPUA—C	-0.439106			

Weighted Statistics			
R-squared	0.992128	Mean dependent var	7.875188
Adjusted R-squared	0.991205	S.D. dependent var	1.895948
S.E. of regression	0.177801	Sum squared resid	8.092979
F-statistic	1075.466	Durbin-Watson stat	1.538305
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.936898	Mean dependent var	7.074760
Adjusted R-squared	0.929503	S.D. dependent var	0.697356
S.E. of regression	0.185157	Sum squared resid	8.776499
Durbin-Watson stat	1.374335		

(Lanjutan)

Dependent Variable: LKURS?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:23  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.121448	0.017100	-7.102200	0.0000
LYRC?	0.531099	0.045396	11.69920	0.0000
OTO?	-0.006779	0.027281	-0.248504	0.8039
R2000?	1.077634	0.041103	26.21813	0.0000
KRISIS?	0.816498	0.026402	30.92526	0.0000
LPRATA?	-0.037520	0.037110	-1.011044	0.3129
LPORMO?	-0.086780	0.107984	-0.803644	0.4223
Fixed Effects				
_SUMUT--C	10.31875			
_SUMBAR--C	10.23825			
_RIAU--C	9.777789			
_JAMBI--C	10.31186			
_SUMSEL--C	10.29379			
_BNGKLU--C	10.30388			
_LAMPUNG--C	10.46760			
_JABAR--C	10.54430			
_JATENG--C	10.61640			
_DIY--C	10.33657			
_JATIM--C	10.50015			
_KALBAR--C	10.25074			
_KALTENG--C	9.967625			
_KALSEL--C	10.17950			
_KALTIM--C	9.353769			
_SULUT--C	10.26937			
_SULTENG--C	10.24591			
_SULSEL--C	10.48017			
_SULTRA--C	10.26064			
_BALI--C	10.28380			
_NTB--C	10.42173			
_NTT--C	10.57440			
_MALUKU--C	10.42345			
_PAPUA--C	9.658500			

Weighted Statistics			
R-squared	0.996380	Mean dependent var	9.326465
Adjusted R-squared	0.995956	S.D. dependent var	1.704800
S.E. of regression	0.108410	Sum squared resid	3.008696
F-statistic	2348.975	Durbin-Watson stat	2.416977
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.955889	Mean dependent var	8.822375
Adjusted R-squared	0.950720	S.D. dependent var	0.518337
S.E. of regression	0.115066	Sum squared resid	3.389485
Durbin-Watson stat	2.188529		

(Lanjutan)

Dependent Variable: OTO?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:24  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.045053	0.032153	1.401208	0.1624
LYRC?	-0.122181	0.112732	-1.083817	0.2795
LKURS?	-0.073274	0.130284	-0.562419	0.5743
R2000?	0.575511	0.169368	3.397996	0.0008
KRISIS?	0.030887	0.126000	0.245136	0.8065
LPRATA?	0.333694	0.077569	4.301897	0.0000
LPORMO?	-0.097209	0.227175	-0.427904	0.6691
Fixed Effects				
_SUMUT--C	-1.903413			
_SUMBAR--C	-1.859929			
_RIAU--C	-1.852253			
_JAMBI--C	-1.888679			
_SUMSEL--C	-1.898505			
_BNGKLU--C	-1.867134			
_LAMPUNG--C	-1.935336			
_JABAR--C	-1.954094			
_JATENG--C	-1.968236			
_DIY--C	-1.869176			
_JATIM--C	-1.943139			
_KALBAR--C	-1.853497			
_KALTENG--C	-1.802900			
_KALSEL--C	-1.864218			
_KALTIM--C	-1.683859			
_SULUT--C	-1.856453			
_SULTENG--C	-1.878496			
_SULSEL--C	-1.946159			
_SULTRA--C	-1.844418			
_BALI--C	-1.872466			
_NTB--C	-1.926122			
_NTT--C	-1.933730			
_MALUKU--C	-1.880240			
_PAPUA--C	-1.831345			

Weighted Statistics			
R-squared	0.808402	Mean dependent var	0.498608
Adjusted R-squared	0.785949	S.D. dependent var	0.501430
S.E. of regression	0.231990	Sum squared resid	13.77773
F-statistic	36.00436	Durbin-Watson stat	2.451673
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.807953	Mean dependent var	0.498258
Adjusted R-squared	0.785448	S.D. dependent var	0.500870
S.E. of regression	0.232002	Sum squared resid	13.77920
Durbin-Watson stat	2.449375		

(Lanjutan)

Dependent Variable: KRISIS?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:26  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.105033	0.017958	5.848691	0.0000
LYRC?	-0.199553	0.056996	-3.501203	0.0005
LKURS?	0.935270	0.030117	31.05464	0.0000
R2000?	-1.286443	0.030675	-41.93830	0.0000
OTO?	0.004780	0.030332	0.157576	0.8749
LPRATA?	-0.079063	0.040087	-1.972294	0.0497
LPORMO?	0.181891	0.116253	1.564607	0.1189
Fixed Effects				
_SUMUT--C	-9.385052			
_SUMBAR--C	-9.282576			
_RIAU--C	-9.040780			
_JAMBI--C	-9.264579			
_SUMSEL--C	-9.287549			
_BNGKLU--C	-9.200258			
_LAMPUNG--C	-9.339629			
_JABAR--C	-9.545216			
_JATENG--C	-9.543020			
_DIY--C	-9.338390			
_JATIM--C	-9.521382			
_KALBAR--C	-9.270146			
_KALTENG--C	-9.071080			
_KALSEL--C	-9.222996			
_KALTIM--C	-8.930721			
_SULUT--C	-9.235344			
_SULTENG--C	-9.181647			
_SULSEL--C	-9.361691			
_SULTRA--C	-9.162051			
_BALI--C	-9.356477			
_NTB--C	-9.249273			
_NTT--C	-9.288425			
_MALUKU--C	-9.220222			
_PAPUA--C	-8.811349			

Weighted Statistics			
R-squared	0.940003	Mean dependent var	0.253826
Adjusted R-squared	0.932972	S.D. dependent var	0.441169
S.E. of regression	0.114218	Sum squared resid	3.339696
F-statistic	133.6953	Durbin-Watson stat	3.027333
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.936179	Mean dependent var	0.250871
Adjusted R-squared	0.928700	S.D. dependent var	0.434272
S.E. of regression	0.115960	Sum squared resid	3.442336
Durbin-Watson stat	2.938000		

(Lanjutan)

Dependent Variable: R2000?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 14:27  
 Sample: 1995 2006  
 Included observations: 12  
 Number of cross-sections used: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 287  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.079667	0.013396	5.947121	0.0000
LYRC?	-0.086654	0.042046	-2.060937	0.0403
LKURS?	0.652169	0.024463	26.65980	0.0000
KRISIS?	-0.677582	0.016109	-42.06282	0.0000
OTO?	0.068388	0.021547	3.173947	0.0017
LPRATA?	-0.083258	0.028927	-2.878233	0.0043
LPORMO?	0.121922	0.084586	1.441395	0.1507
Fixed Effects				
_SUMUT--C	-6.532284			
_SUMBAR--C	-6.445266			
_RIAU--C	-6.332272			
_JAMBI--C	-6.417923			
_SUMSEL--C	-6.446401			
_BNGKLU--C	-6.354292			
_LAMPUNG--C	-6.461609			
_JABAR--C	-6.638967			
_JATENG--C	-6.622817			
_DIY--C	-6.475316			
_JATIM--C	-6.624805			
_KALBAR--C	-6.428886			
_KALTENG--C	-6.300283			
_KALSEL--C	-6.405510			
_KALTIM--C	-6.290078			
_SULUT--C	-6.392662			
_SULTENG--C	-6.354361			
_SULSEL--C	-6.481911			
_SULTRA--C	-6.325195			
_BALI--C	-6.506106			
_NTB--C	-6.386414			
_NTT--C	-6.387045			
_MALUKU--C	-6.346728			
_PAPUA--C	-6.142702			

Weighted Statistics			
R-squared	0.975843	Mean dependent var	0.589836
Adjusted R-squared	0.973012	S.D. dependent var	0.504469
S.E. of regression	0.082875	Sum squared resid	1.758260
F-statistic	344.7071	Durbin-Watson stat	3.093610
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.973715	Mean dependent var	0.581882
Adjusted R-squared	0.970635	S.D. dependent var	0.494111
S.E. of regression	0.084672	Sum squared resid	1.835365
Durbin-Watson stat	2.974971		

**Perbandingan Nilai VIF *Auxiliary Regression* Provinsi**

	Tanpa Fixed Effect Dan Cross Section Weight		Dengan Fixed Effect Dan Cross Section Weight	
	R <sup>2</sup>	VIF	R <sup>2</sup>	VIF
LTAXR(-1)	-	-	-	-
LYRC	0,64	2,8	0,987	750
OTO	0,80	5,0	0,80	5,0
KRISIS	0,70	3,4	0,94	17
LKURS	0,57	2,3	0,996	250
LPRATA	0,80	5,0	0,992	125
LPORMO	0,33	1,6	0,999	1000
R2000	0,83	6,0	0,975	40

Catatan: auxiliary regression tingkat provinsi untuk LTAXR(-1) dengan atau tanpa *fixed effect* dan *cross section weight*, hasilnya tidak keluar

### 3. Regresi Kabupaten/Kota

#### Regresi Tanpa Fixed Effect dan Cross Section Weight

Dependent Variable: LTAXR?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:25  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.941823	0.026660	35.32668	0.0000
LYRC?	0.056345	0.057682	0.976818	0.3306
LTDLJATIM?	-0.290900	0.216204	-1.345492	0.1810
LPMO?	-0.230456	0.153591	-1.500449	0.1361
LPRATA?	-0.295172	0.132083	-2.234737	0.0273
LKURS?	0.585285	0.107602	5.439359	0.0000
R-squared	0.919683	Mean dependent var	4.222106	
Adjusted R-squared	0.916309	S.D. dependent var	1.193566	
S.E. of regression	0.345292	Sum squared resid	14.18799	
F-statistic	272.5268	Durbin-Watson stat	1.904747	
Prob(F-statistic)	0.000000			

#### Uji Heteroskedastisitas Metode Park

Dependent Variable: LRESIDK?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:26  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.187503	0.208775	0.898112	0.3709
LYRC?	0.371056	0.451704	0.821458	0.4130
LTDLJATIM?	-4.117306	1.693069	-2.431860	0.0165
LPMO?	-1.947350	1.202758	-1.619071	0.1081
LPRATA?	0.758132	1.034332	0.732968	0.4650
LKURS?	2.260150	0.842619	2.682290	0.0084
R-squared	0.091534	Mean dependent var	-5.898787	
Adjusted R-squared	0.053363	S.D. dependent var	2.779118	
S.E. of regression	2.703950	Sum squared resid	870.0503	
F-statistic	2.398011	Durbin-Watson stat	1.720516	
Prob(F-statistic)	0.041245			

### Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Dependent Variable: LRESABS?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:28  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.093752	0.104387	0.898112	0.3709
LYRC?	0.185528	0.225852	0.821458	0.4130
LTDLJATIM?	-2.058653	0.846534	-2.431860	0.0165
LPMO?	-0.973675	0.601379	-1.619071	0.1081
LPRATA?	0.379066	0.517166	0.732968	0.4650
LKURS?	1.130075	0.421310	2.682290	0.0084
R-squared	0.091534	Mean dependent var	-2.949393	
Adjusted R-squared	0.053363	S.D. dependent var	1.389559	
S.E. of regression	1.351975	Sum squared resid	217.5126	
F-statistic	2.398011	Durbin-Watson stat	1.720516	
Prob(F-statistic)	0.041245			



### Uji Heteroskedastisitas Metode Koenker-Basset bukan dalam Bentuk Logaritma

Dependent Variable: RESIDK?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/10/10 Time: 12:02  
 Sample: 2001 2007  
 Included observations: 7  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 175  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAXR2?	3.82E-09	2.26E-09	1.690914	0.0929
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI-- C	0.003892			
_KBBLITAR--C	0.010505			
_KTBLITAR--C	0.006187			
_KBBOJONEGORO-- C	0.158678			
_KBBONDOWOSO-- C	0.004270			
_KBJOMBANG--C	0.005612			
_KBKEDIRI--C	0.011833			
_KTKEDIRI--C	0.060568			
_KBLUMAJANG--C	0.004892			
_KBMADIUN--C	0.011453			
_KTMADIUN--C	0.013485			
_KBMALANG--C	0.013210			
_KTMALANG--C	0.001626			
_KBMOJOKERTO--C	0.008092			
_KTMOJOKERTO--C	0.001903			
_KBPACITAN--C	0.013238			
_KBPAMEKASAN--C	1.034242			
_KTPASURUAN--C	0.010766			
_KBPASURUAN--C	0.008503			
_KBPONOROGO--C	0.001466			
_KBPROBOLINGGO-- C	-0.004652			
_KTSURABAYA--C	0.007432			
_KBSIDOARJO--C	0.090603			
_KBTRENGGALEK-- C	0.006526			
_KBTULUNGAGUNG --C	0.005086			

Weighted Statistics			
R-squared	0.183481	Mean dependent var	0.214259
Adjusted R-squared	0.046481	S.D. dependent var	0.260757
S.E. of regression	0.254625	Sum squared resid	9.660228
F-statistic	1.339275	Durbin-Watson stat	1.951864
Prob(F-statistic)	0.145075		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.424320	Mean dependent var	0.060441
Adjusted R-squared	0.327730	S.D. dependent var	0.310593
S.E. of regression	0.254662	Sum squared resid	9.663035
Durbin-Watson stat	2.083832		

### Uji Heteroskedastisitas Metode Koenker-Basset dalam Bentuk Logaritma

Dependent Variable: LRESIDK?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/10/10 Time: 12:05  
 Sample: 2001 2007  
 Included observations: 7  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 175  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR2?	-0.518916	0.122323	-4.242176	0.0000
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI-- C	-2.116704			
_KBBLITAR--C	-1.618693			
_KTBLITAR--C	-3.413267			
_KBBOJONEGORO-- C	0.289643			
_KBBONDOWOSO-- C	-2.959848			
_KBJOMBANG--C	-2.455354			
_KBKEDIRI--C	0.019888			
_KTKEDIRI--C	-0.325500			
_KBLUMAJANG--C	-2.508710			
_KBMADIUN--C	-2.037630			
_KTMADIUN--C	-0.165589			
_KBMALANG--C	-0.476263			
_KTMALANG--C	-3.038069			
_KBMOJOKERTO--C	-3.031603			
_KTMOJOKERTO--C	-5.225177			
_KBPACITAN--C	-2.125032			
_KBPAMEKASAN--C	4.356307			
_KTPASURUAN--C	-0.485119			
_KBPASURUAN--C	-4.056669			
_KBPONOROGO--C	-3.961038			
_KBPROBOLINGGO-- C	1.828809			
_KTSURABAYA--C	2.675846			
_KBSIDOARJO--C	-0.502154			
_KBTRENGGALEK-- C	-2.173006			
_KBTULUNGAGUNG --C	-2.411588			

Weighted Statistics			
R-squared	0.835625	Mean dependent var	-7.162629
Adjusted R-squared	0.808046	S.D. dependent var	5.265529
S.E. of regression	2.306965	Sum squared resid	792.9912
F-statistic	30.29861	Durbin-Watson stat	2.277158
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.364627	Mean dependent var	-5.812498
Adjusted R-squared	0.258021	S.D. dependent var	2.678220
S.E. of regression	2.306970	Sum squared resid	792.9943
Durbin-Watson stat	2.300816		

### Regresi Panel Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LTAXR?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 15:23  
 Sample: 2001 2005  
 Included observations: 5  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.071508	0.040796	1.752819	0.0829
LYRC?	-0.374092	0.357532	-1.046317	0.2981
LTDLJATIM?	1.119778	0.121779	9.195151	0.0000
LPMO?	1.652570	0.600293	2.752938	0.0071
LPRATA?	-0.109321	0.040159	-2.722220	0.0077
LKURS?	0.570888	0.219921	2.595880	0.0109
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	-12.95339			
_KBBLITAR--C	-13.76518			
_KTBLITAR--C	-15.58830			
_KBBOJONEGORO —C	-13.91801			
_KBBONDOWOSO— C	-14.63827			
_KBJOMBANG--C	-13.87237			
_KBKEDIRI--C	-13.54170			
_KTKEDIRI--C	-13.71855			
_KBLUMAJANG--C	-13.91399			
_KBMADIUN--C	-14.36572			
_KTMADIUN--C	-13.54086			
_KBMALANG--C	-12.92980			
_KTMALANG--C	-13.64391			
_KBMOJOKERTO--C	-15.02986			
_KTMOJOKERTO--C	-15.35799			
_KBPACITAN--C	-14.55598			
_KBPAMEKASAN--C	-12.14186			
_KTPASURUAN--C	-13.24912			
_KBPASURUAN--C	-14.66801			
_KBPONOROGO--C	-13.65943			
_KBPROBOLINGGO- -C	-10.67624			
_KTSURABAYA--C	-10.99595			
_KBSIDOARJO--C	-14.82967			
_KBTRENGGALEK— C	-14.02869			
_KBTULUNGAGUNG --C	-14.17162			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999344	Mean dependent var	7.725621	
Adjusted R-squared	0.999135	S.D. dependent var	5.219346	
S.E. of regression	0.153535	Sum squared resid	2.215853	
F-statistic	4773.475	Durbin-Watson stat	2.083800	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

Unweighted Statistics			
R-squared	0.985860	Mean dependent var	4.222106
Adjusted R-squared	0.981348	S.D. dependent var	1.193566
S.E. of regression	0.163010	Sum squared resid	2.497782
Durbin-Watson stat	2.299897		

### Uji Multikolinieritas tanpa Fixed Effect dan Cross Section Weight

Dependent Variable: LTAXR?(-1)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/10/10 Time: 12:21  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LYRC?	0.401912	0.194070	2.070960	0.0405
LTDLJATIM?	1.382648	0.729457	1.895447	0.0604
LPMO?	-0.292718	0.525228	-0.557315	0.5783
LKURS?	-0.624552	0.363998	-1.715808	0.0888
LPRATA?	0.234171	0.451758	0.518355	0.6052
R-squared	0.050432	Mean dependent var	4.222106	
Adjusted R-squared	0.018780	S.D. dependent var	1.193566	
S.E. of regression	1.182306	Sum squared resid	167.7417	
F-statistic	1.593307	Durbin-Watson stat	0.115798	
Prob(F-statistic)	0.180482			

(Lanjutan)

Dependent Variable: LTDLJATIM?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:35  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.021024	0.011092	1.895447	0.0604
LYRC?	-0.022811	0.024266	-0.940046	0.3491
LPMO?	0.070777	0.064528	1.096845	0.2749
LPRATA?	0.468766	0.035764	13.10737	0.0000
LKURS?	0.251252	0.039218	6.406571	0.0000
R-squared	0.547328	Mean dependent var	6.184947	
Adjusted R-squared	0.532239	S.D. dependent var	0.213168	
S.E. of regression	0.145792	Sum squared resid	2.550634	
F-statistic	36.27319	Durbin-Watson stat	1.778502	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LPMO?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:37  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.008820	0.015825	-0.557315	0.5783
LYRC?	0.264047	0.024379	10.83078	0.0000
LTDLJATIM?	0.140244	0.127861	1.096845	0.2749
LPRATA?	-0.065915	0.078273	-0.842120	0.4014
LKURS?	0.377109	0.053897	6.996793	0.0000
R-squared	0.500185	Mean dependent var	4.203803	
Adjusted R-squared	0.483524	S.D. dependent var	0.285565	
S.E. of regression	0.205225	Sum squared resid	5.054066	
F-statistic	30.02219	Durbin-Watson stat	0.020434	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

Dependent Variable: LPRATA?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:38  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.009540	0.018405	0.518355	0.6052
LYRC?	0.029466	0.039775	0.740813	0.4603
LTDLJATIM?	1.255987	0.095823	13.10737	0.0000
LPMO?	-0.089130	0.105840	-0.842120	0.4014
LKURS?	0.007604	0.074364	0.102255	0.9187
R-squared	0.607251	Mean dependent var	7.547066	
Adjusted R-squared	0.594159	S.D. dependent var	0.374602	
S.E. of regression	0.238643	Sum squared resid	6.834038	
F-statistic	46.38464	Durbin-Watson stat	1.932683	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LKURS?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/07/10 Time: 15:39  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.038341	0.022346	-1.715808	0.0888
LYRC?	-0.182716	0.046006	-3.971570	0.0001
LTDLJATIM?	1.014370	0.158333	6.406571	0.0000
LPMO?	0.768352	0.109815	6.996793	0.0000
LPRATA?	0.011458	0.112052	0.102255	0.9187
R-squared	-24.365209	Mean dependent var	9.156944	
Adjusted R-squared	-25.210716	S.D. dependent var	0.057219	
S.E. of regression	0.292939	Sum squared resid	10.29756	
Durbin-Watson stat	0.686004			

(Lanjutan)

Dependent Variable: LYRC?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/10/10 Time: 12:24  
 Sample(adjusted): 2001 2005  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.085858	0.041458	2.070960	0.0405
LTDLJATIM?	-0.320469	0.340908	-0.940046	0.3491
LPMO?	1.872103	0.172850	10.83078	0.0000
LKURS?	-0.635818	0.160092	-3.971570	0.0001
LPRATA?	0.154502	0.208557	0.740813	0.4603
R-squared	0.519034	Mean dependent var	1.575288	
Adjusted R-squared	0.503002	S.D. dependent var	0.775134	
S.E. of regression	0.546455	Sum squared resid	35.83354	
F-statistic	32.37444	Durbin-Watson stat	0.019985	
Prob(F-statistic)	0.000000			

#### Uji Multikolinieritas dengan Menggunakan *Fixed Effect* dan *Cross Section Weight*

Dependent Variable: LKURS?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 15:40  
 Sample: 2001 2005  
 Included observations: 5  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.000361	0.011316	0.031871	0.9746
LYRC?	0.586971	0.114526	5.125223	0.0000
LTDLJATIM?	-0.384523	0.032114	-11.97356	0.0000
LPMO?	1.028155	0.368717	2.788465	0.0064
LPRATA?	0.063290	0.018173	3.482620	0.0008
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	6.153611			
_KBBLITAR--C	6.350560			
_KTBLITAR--C	5.594721			
_KBBOJONEGORO —C	6.121960			
_KBBONDOWOSO— C	6.553621			
_KBJOMBANG--C	6.028531			
_KBKEDIRI--C	6.193188			
_KTKEDIRI--C	3.823933			
_KBLUMAJANG--C	5.970833			
_KBMADIUN--C	6.344565			
_KTMADIUN--C	5.560658			

(Lanjutan)

_KBMALANG--C	5.881425
_KTMALANG--C	4.873082
_KBMOJOKERTO--C	5.770624
_KTMOJOKERTO--C	5.100058
_KBPACITAN--C	6.594152
_KBPAMEKASAN--C	6.789375
_KTPASURUAN--C	5.507014
_KBPASURUAN--C	5.969661
_KBPONOROGO--C	6.627261
_KBPROBOLINGGO--C	6.000854
_KTSURABAYA--C	4.558162
_KBSIDOARJO--C	4.998937
_KBTRENGGALEK--C	6.294655
_KBTULUNGAGUNG--C	5.570897

---



---

**Weighted Statistics**


---

R-squared	0.998875	Mean dependent var	9.376776
Adjusted R-squared	0.998531	S.D. dependent var	0.956996
S.E. of regression	0.036676	Sum squared resid	0.127786
F-statistic	2908.010	Durbin-Watson stat	2.734985
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

**Unweighted Statistics**


---

R-squared	0.661721	Mean dependent var	9.156944
Adjusted R-squared	0.558456	S.D. dependent var	0.057219
S.E. of regression	0.038021	Sum squared resid	0.137332
Durbin-Watson stat	2.627536		

---



(Lanjutan)

Dependent Variable: LPRATA?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 15:42  
 Sample: 2001 2005  
 Included observations: 5  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.074999	0.056137	1.336003	0.1847
LYRC?	1.878951	0.490266	3.832516	0.0002
LTDLJATIM?	1.048612	0.227069	4.618036	0.0000
LPMO?	2.689934	2.034227	1.322338	0.1892
LKURS?	1.922420	0.479344	4.010520	0.0001
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	-30.23703			
_KBBLITAR--C	-29.54484			
_KTBLITAR--C	-31.51226			
_KBBOJONEGORO —C	-30.15990			
_KBBONDOWOSO— C	-28.82389			
_KBJOMBANG--C	-30.43457			
_KBKEDIRI--C	-29.98326			
_KTKEDIRI--C	-37.19787			
_KBLUMAJANG--C	-30.62999			
_KBMADIUN--C	-29.47707			
_KTMADIUN--C	-31.81378			
_KBMALANG--C	-30.95814			
_KTMALANG--C	-33.91054			
_KBMOJOKERTO--C	-31.08954			
_KTMOJOKERTO--C	-33.08278			
_KBPACITAN--C	-28.68779			
_KBPAMEKASAN--C	-28.30293			
_KTPASURUAN--C	-31.96000			
_KBPASURUAN--C	-30.50284			
_KBPONOROGO--C	-28.74432			
_KBPROBOLINGGO- -C	-30.81663			
_KTSURABAYA--C	-35.10734			
_KBSIDOARJO--C	-33.42456			
_KBTRENGGALEK— C	-29.58784			
_KBTULUNGAGUNG --C	-31.76172			
<b>Weighted Statistics</b>				
R-squared	0.935630	Mean dependent var	7.612812	
Adjusted R-squared	0.915981	S.D. dependent var	0.657204	
S.E. of regression	0.190498	Sum squared resid	3.447491	
F-statistic	47.61549	Durbin-Watson stat	2.837302	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Lanjutan)

## Unweighted Statistics

R-squared	0.801565	Mean dependent var	7.547066
Adjusted R-squared	0.740990	S.D. dependent var	0.374602
S.E. of regression	0.190646	Sum squared resid	3.452878
Durbin-Watson stat	2.831577		

Dependent Variable: LPMO?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 12/07/10 Time: 15:43

Sample: 2001 2005

Included observations: 5

Number of cross-sections used: 25

Total panel (balanced) observations: 125

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.004620	0.001659	2.784761	0.0065
LYRC?	-0.018463	0.009125	-2.023296	0.0459
LTDLJATIM?	0.016199	0.005315	3.047831	0.0030
LPRATA?	0.005863	0.001896	3.091738	0.0026
LKURS?	0.043058	0.009222	4.668944	0.0000
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	3.324341			
_KBLITAR--C	3.321638			
_KTBLITAR--C	3.981715			
_KBBOJONEGORO —C	3.533449			
_KBBONDOWOSO— C	3.371851			
_KBJOMBANG--C	3.613026			
_KBKEDIRI--C	3.517764			
_KTKEDIRI--C	4.119371			
_KBLUMAJANG--C	3.575714			
_KBMADIUN--C	3.426399			
_KTMADIUN--C	3.917276			
_KBMALANG--C	3.647938			
_KTMALANG--C	4.083975			
_KBMOJOKERTO--C	3.784438			
_KTMOJOKERTO--C	4.079615			
_KBPACITAN--C	3.395258			
_KBPAMEKASAN--C	3.199807			
_KTPASURUAN--C	4.015958			
_KBPASURUAN--C	3.739550			
_KBPONOROGO--C	3.199524			
_KBPROBOLINGGO- -C	3.509634			
_KTSURABAYA--C	4.086903			
_KBSIDOARJO--C	4.028026			
_KBTRENGGALEK— C	3.585929			
_KBTULUNGAGUNG --C	3.832799			

## Weighted Statistics

(Lanjutan)

R-squared	0.999999	Mean dependent var	8.407999
Adjusted R-squared	0.999998	S.D. dependent var	6.643926
S.E. of regression	0.008945	Sum squared resid	0.007600
F-statistic	2359160.	Durbin-Watson stat	1.013321
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

**Unweighted Statistics**


---



---

R-squared	0.999152	Mean dependent var	4.203803
Adjusted R-squared	0.998893	S.D. dependent var	0.285565
S.E. of regression	0.009502	Sum squared resid	0.008577
Durbin-Watson stat	0.700327		

---



---

Dependent Variable: LTDLJATIM?  
Method: GLS (Cross Section Weights)  
Date: 12/07/10 Time: 15:45  
Sample: 2001 2005  
Included observations: 5  
Number of cross-sections used: 25  
Total panel (balanced) observations: 125  
One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	0.132514	0.025065	5.286919	0.0000
LYRC?	1.328759	0.231031	5.751422	0.0000
LPMO?	1.474768	0.664104	2.220688	0.0287
LPRATA?	0.107406	0.033903	3.168063	0.0021
LKURS?	-1.429383	0.123570	-11.56735	0.0000
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	10.08770			
_KBBLITAR--C	10.64375			
_KTBLITAR--C	9.595397			
_KBBOJONEGORO —C	10.28780			
_KBBONDOWOSO— C	11.21761			
_KBJOMBANG--C	10.10208			
_KBKEDIRI--C	10.35985			
_KTKEDIRI--C	5.536581			
_KBLUMAJANG--C	9.961432			
_KBMADIUN--C	10.76186			
_KTMADIUN--C	9.187638			
_KBMALANG--C	9.667204			
_KTMALANG--C	7.784319			
_KBMOJOKERTO--C	9.786480			
_KTMOJOKERTO--C	8.479440			
_KBPACITAN--C	11.31496			
_KBPAMEKASAN--C	11.36991			
_KTPASURUAN--C	9.089140			
_KBPASURUAN--C	10.15549			
_KBPONOROGO--C	11.14366			
_KBPROBOLINGGO- -C	9.536339			

(Lanjutan)

_KTSURABAYA--C	6.733713
_KBSIDOARJO--C	8.230937
_KBTRENGGALEK— C	10.69968
_KBTULUNGAGUNG --C	9.265373

Weighted Statistics			
R-squared	0.997504	Mean dependent var	6.751778
Adjusted R-squared	0.996742	S.D. dependent var	1.281228
S.E. of regression	0.073128	Sum squared resid	0.508027
F-statistic	1309.266	Durbin-Watson stat	2.456701
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.893782	Mean dependent var	6.184947
Adjusted R-squared	0.861357	S.D. dependent var	0.213168
S.E. of regression	0.079373	Sum squared resid	0.598500
Durbin-Watson stat	2.337299		

Dependent Variable: LYRC?  
Method: GLS (Cross Section Weights)  
Date: 12/07/10 Time: 15:46  
Sample: 2001 2005  
Included observations: 5  
Number of cross-sections used: 25  
Total panel (balanced) observations: 125  
One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTAXR?(-1)	-0.000959	0.005852	-0.163834	0.8702
LTDLJATIM?	0.200404	0.017803	11.25657	0.0000
LPMO?	-0.258112	0.147959	-1.744489	0.0843
LPRATA?	0.047212	0.007555	6.248977	0.0000
LKURS?	0.336478	0.037305	9.019717	0.0000
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	-2.075474			
_KBLITAR--C	-2.410686			
_KTBLITAR--C	-2.099645			
_KBJONEGORO —C	-2.338048			
_KBBONDOWOSO— C	-2.840563			
_KBJOMBANG--C	-2.299390			
_KBKEDIRI--C	-2.442769			
_KTKEDIRI--C	0.784156			
_KBLUMAJANG--C	-2.139398			
_KBMADIUN--C	-2.559766			
_KTMADIUN--C	-1.955054			
_KBMALANG--C	-2.102365			
_KTMALANG--C	-1.006214			
_KBJOKERTO--C	-2.105415			

(Lanjutan)

_KTMOJOKERTO--C	-1.387657
_KBPACITAN--C	-2.948570
_KBPAMEKASAN--C	-3.000716
_KTPASURUAN--C	-2.016701
_KBPASURUAN--C	-2.387420
_KBPONOROGO--C	-2.708464
_KBPROBOLINGGO--C	-2.113238
_KTSURABAYA--C	-0.476604
_KBSIDOARJO--C	-1.129320
_KBTRENGGALEK--C	-2.723249
_KBTULUNGAGUNG--C	-1.835749

Weighted Statistics			
R-squared	0.999728	Mean dependent var	3.077026
Adjusted R-squared	0.999645	S.D. dependent var	1.740435
S.E. of regression	0.032812	Sum squared resid	0.102282
F-statistic	12026.62	Durbin-Watson stat	2.138362
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.998266	Mean dependent var	1.575288
Adjusted R-squared	0.997737	S.D. dependent var	0.775134
S.E. of regression	0.036876	Sum squared resid	0.129184
Durbin-Watson stat	1.424056		

(Lanjutan)

Dependent Variable: LTAXR?(-1)  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 12/07/10 Time: 15:47  
 Sample: 2001 2005  
 Included observations: 5  
 Number of cross-sections used: 25  
 Total panel (balanced) observations: 125  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LYRC?	0.159752	0.541519	0.295007	0.7686
LTDLJATIM?	1.585611	0.165417	9.585558	0.0000
LPMO?	2.306924	1.482277	1.556338	0.1230
LPRATA?	0.149482	0.062448	2.393706	0.0186
LKURS?	0.250988	0.342981	0.731785	0.4661
Fixed Effects				
_KBBANYUWANGI— C	-18.12801			
_KBBLITAR--C	-18.91311			
_KTBLITAR--C	-21.24303			
_KBBOJONEGORO —C	-19.25829			
_KBBONDOWOSO— C	-19.47548			
_KBJOMBANG--C	-19.12019			
_KBKEDIRI--C	-18.61050			
_KTKEDIRI--C	-20.94668			
_KBLUMAJANG--C	-19.24366			
_KBMADIUN--C	-19.44056			
_KTMADIUN--C	-18.99702			
_KBMALANG--C	-18.22604			
_KTMALANG--C	-19.68474			
_KBMOJOKERTO--C	-20.49743			
_KTMOJOKERTO--C	-21.01682			
_KBPACITAN--C	-19.39074			
_KBPAMEKASAN--C	-17.23241			
_KTPASURUAN--C	-18.72949			
_KBPASURUAN--C	-19.99353			
_KBPONOROGO--C	-18.39429			
_KBPROBOLINGGO- -C	-15.71806			
_KTSURABAYA--C	-17.18272			
_KBSIDOARJO--C	-21.15214			
_KBTRENGGALEK— C	-19.09905			
_KBTULUNGAGUNG --C	-19.81686			
Weighted Statistics				
R-squared	0.998036	Mean dependent var	9.850824	
Adjusted R-squared	0.997437	S.D. dependent var	6.319040	
S.E. of regression	0.319932	Sum squared resid	9.723888	
F-statistic	1664.776	Durbin-Watson stat	2.159745	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Unweighted Statistics

R-squared	0.938021	Mean dependent var	4.222106
Adjusted R-squared	0.919101	S.D. dependent var	1.193566
S.E. of regression	0.339483	Sum squared resid	10.94866
Durbin-Watson stat	1.776406		

## Perbandingan Nilai VIF Regresi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

	Tanpa Fixed Effect dan Cross Section Weight		Dengan Fixed Effect dan Cross Section Weight	
	R <sup>2</sup>	VIF	R <sup>2</sup>	VIF
LTAXR(-1)	0,05	1,05	0,998	500
LYRC	0,52	2,1	0,999	1000
LTDLJATIM	0,55	2,2	0,997	334
LPMO	0,50	2,0	0,999	1000
LKURS	-24	0,0	0,999	1000
LPRATA	0,60	2,5	0,94	17